

PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL BERLANJUT, DIDUKUNG STIMULUS KEBIJAKAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL



**LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI
KEUANGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL**

EDISI 2021

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI KEUANGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

EDISI 2021

Perkembangan Ekonomi Global

Kerja Sama Internasional



Bank Indonesia
Departemen Internasional

Redaksi mengharapkan komentar, saran, dan kritik
demi perbaikan terbitan ini.

Alamat Redaksi:

Kelompok Asesmen Internasional

Departemen Internasional

Bank Indonesia

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

Telepon: (021) 2981-6925, 2981-8631, Faksimili: (021) 2311529

http://bit.ly/PEKKI_Bank_Indonesia atau

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/default.aspx>

Prakata

Dalam menjalankan mandat sebagai bank sentral, Bank Indonesia mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam fora kerja sama internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, serta membangun persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia di kalangan investor, lembaga pemeringkat, organisasi internasional, dan pelaku ekonomi pada umumnya. Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) ini merupakan salah satu bentuk diseminasi kepada *stakeholder* mengenai perkembangan terkini ekonomi global dan berbagai isu yang dibahas dalam berbagai fora kerja sama internasional.

Laporan PEKKI kini diterbitkan secara tahunan untuk memberi gambaran yang lebih lengkap atas berbagai dinamika ekonomi dan substansi fora kerja sama internasional selama satu tahun. Pada edisi ini, Laporan PEKKI mengangkat tema “Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut, Didukung Stimulus Kebijakan dan Kerja Sama Internasional.” Secara umum, perekonomian global melanjutkan tren perbaikan setelah mengalami kontraksi pada 2020. Perbaikan ekonomi dunia tersebut terutama ditopang oleh stimulus kebijakan di berbagai negara, serta didukung pula oleh inisiatif dan kerja sama di berbagai fora internasional. Presidensi Indonesia pada forum G20 tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah tentang peran Indonesia dalam menuntun perekonomian global keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19.

Kami berharap informasi yang disampaikan dalam Laporan PEKKI ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita untuk berkontribusi nyata dalam perbaikan ekonomi Indonesia.

Jakarta, Desember 2021
Departemen Internasional
Bank Indonesia

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Singkatan	vi
Ringkasan EKsekutif	2

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

7

I.1. Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Global	8
--	----------

Boks. <i>Supply Bottlenecks</i> Menghambat Pemulihan Ekonomi Global 2021	12
---	-----------

I.2. Perkembangan Ekonomi Beberapa Negara dan Kawasan	14
--	-----------

I.2.1 Amerika Serikat	14
------------------------------	-----------

I.2.2 Kawasan Euro	16
---------------------------	-----------

I.2.3 Jepang	18
---------------------	-----------

I.2.4 Tiongkok	19
-----------------------	-----------

I.2.5 India	21
--------------------	-----------

I.2.6 Malaysia	23
-----------------------	-----------

BAB II**27****KERJA SAMA INTERNASIONAL**

II.1.	Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan	28
II.1.1.	Kerja Sama untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi	28
Boks	<i>Sovereign Credit Rating</i> Indonesia Terjaga di Tengah Divergensi Pemulihan Ekonomi	33
II.1.2.	Kerja Sama untuk Memperkuat Resiliensi Sektor Keuangan	35
II.1.3.	Kerja Sama Sistem Pembayaran dan Inovasi Digital	37
II.1.4.	Kerja Sama <i>Sustainable Finance</i>	39
Boks	Presidensi G20 Indonesia: Memimpin Pemulihan Global yang Merata dan Kuat	41
II.2.	Integrasi Ekonomi dan Keuangan	45
II.2.1	Kerja Sama Perdagangan Internasional	45
II.2.2	Promosi Perdagangan dan Investasi	47
II.3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kebanksentralan	49

LAMPIRAN**51**

Tabel 1	Produk Domestik Bruto	51
Tabel 2	Tingkat Pengangguran	52
Tabel 3	Inflasi IHK	53
Tabel 4	Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral	54
Tabel 5	Pertumbuhan Uang Beredar	55
Tabel 6	Neraca Fiskal	56
Tabel 7	Neraca Berjalan	57
Tabel 8	Cadangan Devisa	58
Tabel 9	Nilai Tukar Dunia terhadap USD	59
Tabel 10	Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Dunia	60
Tabel 11	Indeks Harga Saham	61
Tabel 12	Utang Pemerintah	62
Tabel 13	Harga Komoditas di Pasar Dunia	63

Tim Penyusun

Daftar Singkatan

ACC-BIS	Asian Consultative Council – Bank for International Settlements
ACCD	Appointed Cross Currency Dealer
ACT-A	Access to COVID-19 Tools Accelerator
AEs	Advanced economies
AFAS	ASEAN Framework Agreement on Services
AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
API	Application Programming Interfaces
APU-PPT	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kamboja
ASEAN+3	Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, Jeoang, dan Korea
BB	Building Block
BDCB	Brunei Darussalam Central Bank
BI	Bank Indonesia
BIS	Bank for International Settlements
BNM	Bank Negara Malaysia
BOE	Bank of England
BOJ	Bank of Japan
BOK	Bank of Korea
BRL	Bilateral Repo Line
BSA	Bilateral Swap Arrangement
CBDC	Central Bank Digital Currency

CBP	Cross Border Payments
CBRT	Central Bank of the Republic of Turkey
CBSL	Central Bank Sri Lanka
CBUAE	Central Bank of the United Arab Emirates
CCRT	Catastrophe Containment and Relief Trust
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CMIM	Chiang Mai Initiative Multilateralization
COVAX	COVID-19 Vaccines Global Access
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CPI	Consumer Price Index
DLP	De-Linked Portion
DSSI	Debt Service Suspension Initiative
ECB	European Central Bank
EMEAP	Executives' Meeting of Asia-Pacific Central Banks
EMs	Emerging economies
EU	European Union
FATF	Financial Action Task Force
FFR	Fed Fund Rate
FIMA	Foreign and International Monetary Authorities
FOMC	The Federal Open Market Committee
FSB	Financial Stability Board
FTA	Free Trade Agreement
FY	Fiscal Year
G20	Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Inggris, Tiongkok, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, Uni Eropa
GDP	Gross Domestic Product

GIRU	Global Investor Relation Unit
GPA	Global Policy Agenda
G-SIB	Global Systemically Important Banks
GST	Goods and Services Tax
GVC	Global Value Chain
HIPC	Heavily Indebted Poor Countries
IDR	Indonesian Rupiah
IMF	International Monetary Fund
IOSCO	International Organization of Securities Commissions
IRU	Investor Relation Unit
JI-SDR	Joint Initiative on Services Domestic Regulation
JMOF	The Japan Meeting of Furries
JSI e-commerce	Joint Statement Initiative on Electronic Commerce
JSI-IFD	Joint Statement Initiative on Investment Facilitation for Development
K/L	Kementerian/Lembaga
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LCBSA	Local Currency Bilateral Swap Agreement
LCS	Local Currency Settlement
LICs	Low Income Countries
LKNB	Lembaga Keuangan NonBank
MAS	Monetary Authority of Singapore
MDBs	Multilateral Development Banks
MLT	Multilateral Leaders Task Force
MMF	Money Market Fund
MoU	Memorandum of Understanding
MYR	Malaysian Ringgit

NGEU	The Next Generation EU
NRP	National Recovery Plan
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBOC/PBC	People's Bank of China
PCE	Personal Consumption Expenditure
PDB	Produk Domestik Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PEPP	Pandemic Emergency Purchase Programme
PMI	Purchasing Managers Index
PPI	Producer Price Index
PRGT	Poverty Reduction Growth Trust
PTA	Preferential Tariff Agreement
PTD	Penyelenggara Transfer Dana
QQE	Quantitative and Qualitative Monetary Easing
RBI	Reserve Bank of India
RFF	Recovery and Resilient Facility
RI	Republik Indonesia
RIRU	Regional Investor Relation Unit
RRR	Reserve Repo Rate
RST	Resilience and Sustainability Trust
SAMA	Saudi Central Bank
SBC	Structured Bilateral Cooperation
SCR	Sovereign Credit Rating
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SDR	Special Drawing Right

SEACEN	The South East Asian Central Banks
SFWG	Sustainable Finance Working Group
SGD	Singapore Dollar
SOE	State of Emergency
SP-IKD	Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan Digital
UEA	Uni Emirat Arab
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USD	United States Dollar
UU	Undang-undang
WB	World Bank
WEO	World Economic Outlook
WPI	Whole Price Index
WTO	World Trade Organization
YCC	Yield Curve Control
yoy	Year-on-Year

Pemulihan Ekonomi Global Berlanjut, Didukung Stimulus Kebijakan dan Kerja Sama Internasional

Perekonomian global selama 2021 melanjutkan perbaikan, didukung berbagai respons kebijakan dan kerja sama internasional, meski dengan laju yang tidak merata antara negara maju dan negara berkembang.

Perbaikan ekonomi didorong oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan. Kerja sama internasional di berbagai fora juga memberikan dukungan dalam mempercepat pemulihan perekonomian dunia melalui berbagai inisiatif. Namun laju pertumbuhan ekonomi mengalami divergensi antarnegara akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan besaran stimulus. Kapasitas vaksinasi dan stimulus kebijakan yang lebih baik menjadikan pemulihan ekonomi negara maju relatif lebih cepat daripada negara berkembang.

Pada paruh pertama 2021, perekonomian global secara umum melanjutkan tren perbaikan, setelah terkonsentrasi sangat dalam pada triwulan II 2020.

Pada triwulan I 2021, perekonomian AS berhasil keluar dari zona kontraksi, sementara Tiongkok dan India melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok triwulan I 2021 bahkan mencapai 18,3%, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan jasa seiring normalisasi aktivitas masyarakat, kenaikan permintaan ekspor, ekspansi industri, serta *base effect*. Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi makin kuat terutama di AS (12,2%), Kawasan Euro (14,2%), Jepang (7,6%), dan India (20,1%). Selain dipengaruhi oleh dukungan stimulus kebijakan dan percepatan vaksinasi, kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh faktor *base effect* sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 yang sangat rendah.

Perekonomian global kemudian tumbuh melambat dan berada di bawah prediksi pada triwulan III 2021 akibat penyebaran COVID-19 varian Delta dan hambatan suplai. Kasus infeksi varian Delta yang

meluas di berbagai kawasan, kembali menyebabkan penerapan pembatasan mobilitas. Restriksi ketat diberlakukan, terutama di Tiongkok yang menerapkan 'zero COVID strategy.' Restriksi di beberapa negara Asia telah menambah permasalahan hambatan suplai, termasuk semikonduktor. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 tertahan, antara lain di AS, Kawasan Euro, Jepang dan Tiongkok. Pemulihan ekonomi juga menghadapi tantangan kelangkaan energi yang meningkatkan harga komoditas energi global.

Setelah sempat tertahan pada triwulan III, pemulihan ekonomi global untuk keseluruhan 2021 diperkirakan berlanjut, kendati dengan laju pertumbuhan yang sedikit lebih lambat daripada perkiraan sebelumnya.

Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi global 2021 menjadi 5,7%, dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,8%. IMF juga merevisi *outlook* pertumbuhan ekonomi global menjadi 5,9% pada *World Economic Outlook* Oktober 2021 (dari perkiraan Juli 2021 sebesar 6%). Ke depan, pemulihan ekonomi dunia diperkirakan masih berlanjut. IMF memperkirakan PDB global pada 2022 akan tumbuh sebesar 4,9%.

Laju inflasi global cenderung meningkat. Tekanan inflasi diperkirakan akan berada pada level tinggi dalam durasi yang lebih lama daripada perkiraan awal akibat kendala suplai dan kenaikan harga komoditas. *Consumer price index* (CPI) AS dan Kawasan Euro telah berada di atas target. Inflasi di negara lain seperti Tiongkok dan India juga telah meningkat. Potensi kenaikan inflasi ke depan tetap perlu dicermati, terutama jika hambatan suplai berlanjut. IMF memperkirakan inflasi global 2021 lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, dan akan menurun pada 2022.

Divergensi pemulihan ekonomi dan perbedaan tekanan inflasi direspons dengan kebijakan yang berbeda oleh setiap negara. Sejumlah bank sentral telah meningkatkan suku bunga kebijakan untuk merespons kenaikan inflasi, seperti Bank Sentral Brasil, Meksiko, Selandia Baru, Hongaria, dan Rusia. Sementara itu, The Fed dan ECB masih mempertahankan suku bunga, tetapi telah menurunkan ekspansi likuiditas. Namun, the Fed telah menurunkan pembelian aset secara bertahap mulai November 2021. Demikian pula dengan ECB yang telah menetapkan pembelian aset dalam kerangka *Pandemic Emergency Purchase Programme* dengan jumlah yang lebih rendah hingga Maret 2022, tetapi meningkatkan jumlah pembelian aset dalam kerangka *Asset Purchase Programme*. Divergensi pemulihan ekonomi antarnegara menyebabkan perbedaan *timing* normalisasi kebijakan moneter antarnegara yang dapat menyebabkan dampak *spillover* negatif pada negara *emerging*. Dari sisi kebijakan fiskal, secara umum berbagai negara masih mempertahankan *stance* kebijakan yang akomodatif, bahkan AS menambah stimulus *Infrastructure Bill*.

Prospek pemulihan ekonomi global diperkirakan masih akan dihadapi pada berbagai faktor risiko. Dunia perlu mencermati berbagai risiko, seperti varian baru COVID-19, *supply-demand mismatches*, tekanan kenaikan harga, normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan, risiko perubahan iklim, serta ketegangan perdagangan dan teknologi. Selain itu, perlu dicermati *scarring effect* dari dampak pandemi pada sektor tenaga kerja dan pendidikan yang dapat menurunkan produktivitas.

Melalui berbagai fora kerja sama internasional, negara-negara di dunia berkomitmen mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi global. Diskusi pada fora kerja sama internasional diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan perekonomian global, serta merumuskan respons kebijakan yang tepat. IMF-WB *Annual Meeting* 2021 menekankan urgensi untuk melaksanakan kebijakan yang dapat mengatasi dan membatasi dampak pandemi (*scarring effect*) serta mendukung transformasi ekonomi global. Dengan tema *Vaccinate,*

Calibrate, Accelerate, IMF mendorong kerja sama global untuk mempercepat vaksinasi, menyesuaikan respons kebijakan dengan perkembangan pandemi, dan mendukung transformasi ekonomi global untuk mencapai pemulihan yang inklusif, lebih hijau, dan berbasis digital. G20 di bawah Presidensi Italia pada tahun 2021 juga berkomitmen mendukung respons kebijakan terhadap pandemi, mengarahkan koordinasi ekonomi internasional menuju pemulihan, serta mempersiapkan dunia pascapandemi. Sejalan dengan itu, ASEAN juga berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kawasan.

IMF mengeluarkan inisiatif untuk membantu negara miskin yang terlilit utang dan menambah alokasi *Special Drawing Rights* (SDR) sebagai tambahan cadangan devisa bagi negara anggota. IMF membantu negara miskin melalui pemberian *concessional loans* dan program penghapusan utang. Indonesia mendukung inisiatif tersebut dan berpartisipasi pada program penghapusan utang Sudan. Untuk menambah likuiditas global dalam upaya mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi, IMF juga menambah alokasi SDR sebesar USD650 miliar (sekitar SDR456 miliar) yang didistribusikan kepada seluruh negara anggotanya secara proporsional sesuai kuota masing-masing negara. Atas alokasi tersebut, Indonesia menerima tambahan SDR sebesar SDR4,46 miliar atau setara dengan USD6,31 miliar yang digunakan untuk menambah cadangan devisa negara.

Indonesia akan menjalankan peran strategis sebagai Presidensi G20 pada 2022. Dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan yang keberlanjutan dan inklusif. Presidensi G20 Indonesia memiliki enam agenda prioritas pada jalur keuangan, yaitu *Exit Strategy to Support Recovery, Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth, Payment Systems in the Digital Era, Sustainable Finance, Digital Financial Inclusion*, dan *International Taxation*.

Dalam konteks kerja sama bilateral, Bank Indonesia telah melakukan berbagai dialog dengan sejumlah bank sentral negara mitra. Kerja sama ditujukan untuk membangun dan menjaga hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, serta memperjuangkan kepentingan BI dan/atau perekonomian Indonesia. Pada 2021, dialog antara lain dilakukan dengan Bank Sentral Swiss, Singapura, Arab Saudi, Sri Lanka, dan Jepang, dimana telah dilakukan pertukaran pandangan mengenai perkembangan perekonomian terkini, serta peninjauan dan penguatan kerja sama bilateral antarbank sentral.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional pada sektor keuangan dan perdagangan. ASEAN+3 telah meningkatkan porsi fasilitas Chiang Mai *Initiative Multilateralization* yang dapat ditarik tanpa didahului dengan aktivasi fasilitas IMF (CMIM IMF *De-Linked Portion*) dari 30% menjadi 40%. Bank Indonesia kembali memperpanjang kerja sama *Bilateral Swap Arrangement* dengan Jepang, serta kerja sama *Local Currency Bilateral Swap Agreement* dan *Bilateral Repo Line* dengan Monetary Authority of Singapore. Selain itu, untuk meningkatkan pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi, Bank Indonesia melakukan penguatan implementasi

kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) dengan Bank Negara Malaysia, Japan Ministry of Finance, serta mengimplementasikan kerja sama LCS baru dengan People's Bank of China. Dalam konteks kerja sama perdagangan, Indonesia melanjutkan perundingan perjanjian perdagangan bilateral dengan beberapa negara mitra, antara lain Uni Eropa, Chili, dan Uni Emirat Arab. Indonesia juga terus mempererat integrasi jasa keuangan dan *e-commerce* dengan negara ASEAN dan mitra ASEAN, serta aktif dalam perundingan World Trade Organization.

Berbagai kebijakan yang ditempuh Indonesia dalam mengatasi pandemi telah mendapat tanggapan positif dari lembaga pemeringkat dan organisasi internasional. Indonesia dapat mempertahankan *Sovereign Credit Rating* pada 2021, yang mencerminkan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap kredibilitas kebijakan dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Sejalan dengan itu, IMF menilai positif sinergi kebijakan Indonesia dalam menghadapi pandemi sebagaimana dituangkan dalam laporan IMF *Article IV Consultation* 2020. Pandangan serupa juga disampaikan oleh OECD dan AMRO. Secara khusus, AMRO menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh dan *resilient* meski menghadapi tantangan pandemi COVID-19.





BAB 1

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Perekonomian global pada 2021 melanjutkan perbaikan, didukung berbagai respons kebijakan dan kerja sama internasional, meski dengan laju yang tidak merata antara negara maju dan negara berkembang. Kapasitas vaksinasi dan stimulus kebijakan yang lebih baik menjadikan perbaikan ekonomi di negara maju relatif lebih cepat daripada negara berkembang. Pada paruh pertama 2021, perekonomian global secara umum melanjutkan tren perbaikan, setelah berkontraksi dalam pada triwulan II 2020. Namun, laju pertumbuhan triwulan III 2021 kembali melambat dan berada di bawah prediksi, akibat penyebaran COVID-19 varian Delta dan hambatan suplai. Peningkatan permintaan di tengah terjadinya hambatan suplai dan kelangkaan energi memberi tekanan kenaikan inflasi global yang lebih lama dari perkiraan. IMF memperkirakan inflasi global 2021 lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya, tetapi akan menurun pada 2022. Divergensi pemulihan ekonomi antarnegara menyebabkan perbedaan *timing* normalisasi kebijakan moneter setiap negara, sehingga perlu dicermati dampak *spillover* kepada negara berkembang. Prospek pemulihan ekonomi global diperkirakan masih akan dihadapkan pada berbagai faktor risiko, dan perlu diantisipasi dengan respons kebijakan yang tepat.

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Global

Perekonomian global pada 2021 melanjutkan perbaikan dengan laju yang tidak merata, setelah terkontraksi cukup dalam pada 2020. Perbaikan ekonomi terutama didorong oleh *pent-up demand* baik dari pasar domestik maupun eksternal, seiring dengan pelonggaran restriksi mobilitas dan stimulus kebijakan. Divergensi laju pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh perbedaan akses terhadap vaksin dan besaran stimulus kebijakan antarnegara. Sejalan dengan tingkat vaksinasi yang jauh lebih baik dan stimulus kebijakan yang lebih besar, pemulihan ekonomi di negara maju (*advanced economies/AEs*) relatif lebih cepat dibandingkan negara berkembang (*emerging economies/EMs*).

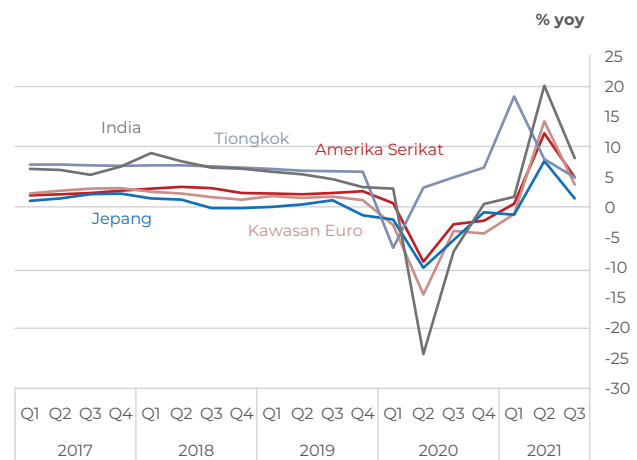
Pada paruh pertama 2021, perekonomian global secara umum melanjutkan tren perbaikan, setelah terkontraksi sangat dalam pada triwulan II 2020.

Pada triwulan I 2021, perekonomian AS berhasil keluar dari zona kontraksi, sementara Tiongkok dan India melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok triwulan I 2021 bahkan mencapai 18,3%, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan jasa seiring normalisasi aktivitas masyarakat, kenaikan permintaan ekspor, ekspansi industri, serta dipengaruhi faktor *base effect*. Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi makin kuat terutama di AS (12,2%), Kawasan Euro (14,2%), Jepang (7,6%), dan India (20,1%). Selain dipengaruhi oleh dukungan stimulus kebijakan dan percepatan vaksinasi, kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh faktor *base effect* pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah pada triwulan II 2020.

Pertumbuhan ekonomi global kembali tumbuh melambat dan berada di bawah prediksi pada triwulan III 2021 akibat penyebaran COVID-19 varian Delta dan hambatan suplai. Kasus infeksi COVID-19 varian Delta yang meluas pada kawasan Asia, Eropa, dan Amerika, kembali menyebabkan penerapan pembatasan mobilitas. Varian Delta memiliki karakteristik transmisi yang lebih cepat dan tingkat fatalitas lebih tinggi. Restriksi ketat

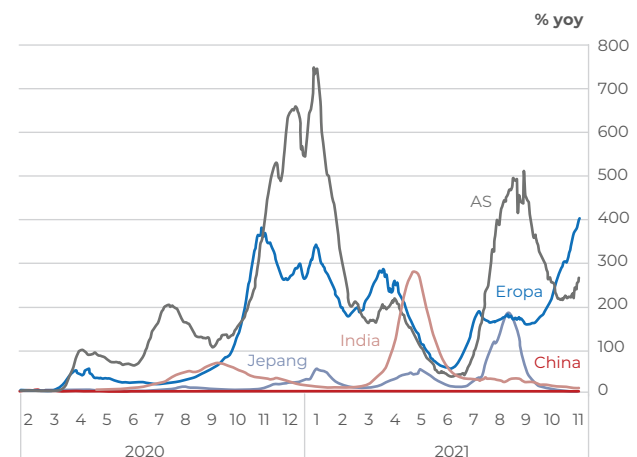
diberlakukan di banyak negara, termasuk di Asia untuk mengatasi kenaikan kasus. Langkah tersebut telah meningkatkan risiko kendala pasokan. Ekspansi sektor industri global yang tengah menghadapi problem kelangkaan *container*, kenaikan biaya distribusi, dan keterbatasan tenaga kerja, menjadi lebih tertahan oleh pengetatan restriksi. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan waktu pengiriman barang menjadi lebih lama (*suppliers' delivery times* memburuk) yang dapat memicu kelangkaan produk

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.2 Daily New Confirmed COVID-19 Cases per million people (7-day rolling average)



Sumber: Johns Hopkins University

Disrupsi rantai pasokan global menghadapi tantangan kebijakan penanganan pandemi di Asia yang ketat.

Tiongkok menerapkan kebijakan 'zero COVID strategy' yang dapat menghentikan kegiatan di berbagai sektor jika terdapat kasus COVID-19. Tiongkok sempat menutup beberapa terminal di pelabuhan Ningbo-Zhoushan yang merupakan pelabuhan tersibuk ketiga di dunia, serta menghentikan sejumlah operasional pabrik. Vietnam dan Malaysia juga menerapkan pembatasan mobilitas yang ketat antara lain menutup perbatasan dan beberapa pabrik. Pembatasan di Asia tersebut memperburuk hambatan suplai global dan menahan aktivitas produksi di sejumlah negara maju akibat kelangkaan bahan baku, termasuk semikonduktor.

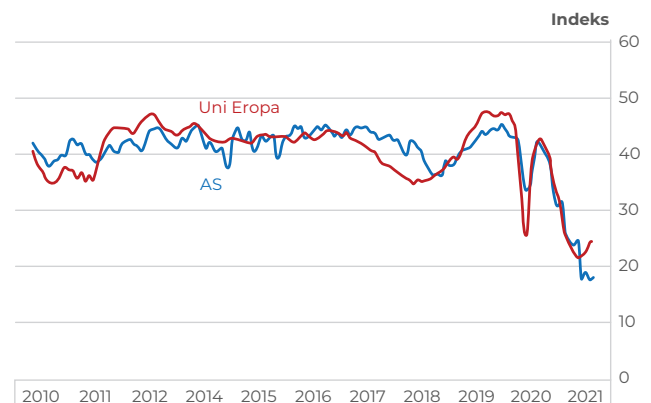
Pemulihan ekonomi global juga menghadapi kendala kelangkaan energi di sejumlah negara yang meningkatkan harga komoditas energi global.

Tiongkok dan India mengalami kekurangan pasokan batu bara, sementara Eropa menghadapi kendala pasokan gas. Keterbatasan energi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan permintaan global atas komoditas energi pascapelonggaran restriksi mobilitas yang tidak dapat diimbangi oleh pasokan, pembangkit listrik energi terbarukan (*hydro power*) terkendala faktor cuaca panas/kering, transisi kepada *green* energi meningkatkan permintaan gas dibandingkan *fossil fuel*, serta faktor *idiosyncratic* masing-masing negara. Di Tiongkok, pasokan juga terganggu oleh restriksi impor batu bara dari Australia sebagai implikasi dari tensi geopolitik. Di Eropa, jalur pipa Nord Stream 2 yang mengalirkan gas dari Rusia belum dapat digunakan. Di Inggris, terjadi kekurangan sopir truk pengangkut energi akibat pembatasan *low skilled worker* dari Eropa pasca-Brexit.

Peningkatan demand di tengah terjadinya disrupsi pasokan dan kelangkaan energi meningkatkan inflasi global. Tekanan kenaikan inflasi diperkirakan akan berada pada level tinggi dalam durasi yang lebih lama daripada perkiraan awal, akibat kendala suplai dan kenaikan harga komoditas. Indeks harga konsumen (CPI) AS telah mencapai 6,8% pada November 2021,

jauh di atas target rerata 2%. Demikian pula di Eropa, yang telah mencapai 4,9% pada November 2021, jauh di atas target inflasi simetris 2% terutama diakibatkan peningkatan harga energi. Inflasi konsumen di Tiongkok juga mulai meningkat, seiring transmisi dari kenaikan harga produsen dan makanan. Ke depan, tetap perlu dicermati transmisi kenaikan harga produsen terhadap harga konsumen, terutama jika hambatan suplai berlanjut.

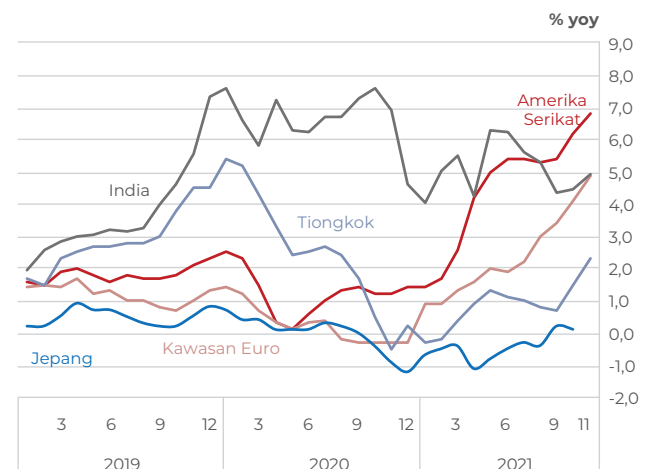
Grafik 1.3 Delivery Times AS dan Eropa



Sumber: IHS Markit.

Note: PMI=Purchasing Managers' Index. Readings above 50 indicate faster delivery times, readings at 50 signal no change, and readings below 50 indicate slower

Grafik 1.4 Indeks Harga Konsumen



Sumber: Bloomberg

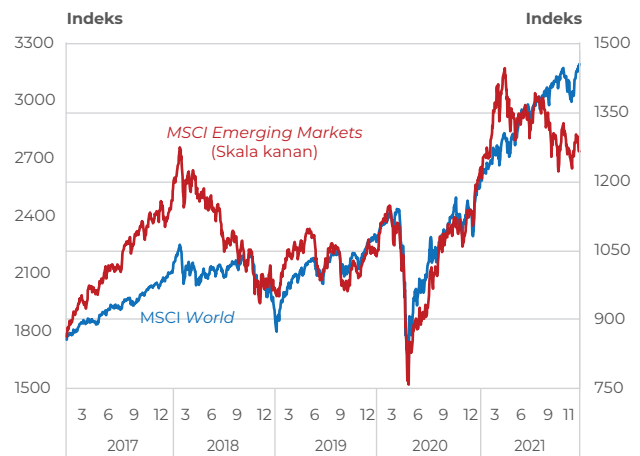
Inflasi global 2021 berada pada level yang tinggi dan dalam durasi yang lebih lama dari perkiraan sebelumnya. IMF dalam WEO Oktober 2021 memprediksi inflasi negara maju pada 2021 akan mencapai 2,8%, revisi ke atas dari 2,4% pada WEO Juli 2021. Tekanan inflasi diperkirakan menurun pada 2022 sejalan dengan asumsi bahwa disrupsi pasokan dapat teratasi dan permintaan global mulai mereda. IMF memprediksi inflasi negara maju pada 2022 akan menurun ke level 2,3%. Selanjutnya pada *emerging market and developing economies*, inflasi 2021 diperkirakan mencapai 5,5%, dan menurun pada 2022 menjadi 4,9%.

Kinerja pasar keuangan global secara umum lebih stabil dibandingkan 2020, meski pasar saham juga mengalami divergensi. Komunikasi the Fed yang lebih baik, transparan, dan konsisten mengenai arah kebijakan akomodatif menjadikan pasar lebih tenang. Pasar saham AEs (MSCI World) menguat signifikan hingga Agustus 2021 sejalan kebijakan akomodatif bank sentral. Meski demikian, isu *tapering* the Fed dan kenaikan inflasi AS yang lebih lama dari perkiraan sempat menahan penguatan tersebut. Sementara itu, kinerja pasar saham EMs (MSCI EMs) cenderung melemah selama 2021, terutama pada triwulan III 2021 dipengaruhi peningkatan kasus COVID-19. Koreksi cukup tajam terjadi pada pasar saham Tiongkok akibat pengetatan regulasi pada sejumlah sektor (*regulatory crackdown*).

Kinerja obligasi pemerintah selama 2021 cenderung tertekan, di tengah berlanjutnya penguatan indeks dolar AS. Di pasar obligasi, investor mengantisipasi pengurangan pembelian aset oleh the Fed dan peningkatan *Fed Fund Rate* (FFR) yang lebih cepat, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang meningkat dan mendorong kenaikan *UST yield 10Y*. Sementara itu, tren penguatan indeks dolar AS (DXY) berlanjut, dipengaruhi *outlook* ekonomi AS yang membaik dan ekspektasi normalisasi kebijakan moneter.

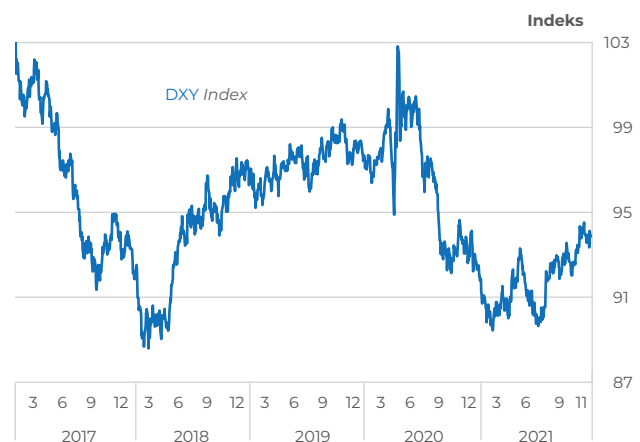
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, perekonomian global pada 2021 tetap dapat melanjutkan pemulihan dengan laju yang divergen. Namun penyebaran virus COVID-19 dan hambatan suplai menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia tidak secepat perkiraan sebelumnya. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2021 sekitar 5,7%, revisi dari estimasi sebelumnya sebesar

Grafik 1.5 Indeks MSCI



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.6 Dollar Index (DXY)



Sumber: Bloomberg

5,8%. Revisi *outlook* tersebut sejalan dengan IMF yang juga merevisi ke bawah *outlook* pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 5,9% pada WEO Oktober 2021, dari perkiraan Juli 2021 sebesar 6%. Ke depan, pemulihan ekonomi dunia diperkirakan tetap berlanjut. IMF memperkirakan PDB global pada 2022 akan tumbuh sebesar 4,9%.

Divergensi pemulihan ekonomi dan perbedaan tekanan inflasi yang direspons oleh perbedaan kebijakan masing-masing negara, berpotensi menimbulkan risiko *spillover* pada negara berkembang. Sejumlah bank sentral telah meningkatkan suku bunga kebijakan untuk merespons kenaikan inflasi, antara lain Bank Sentral Brasil, Meksiko, Selandia Baru, Hongaria, dan Rusia. Namun, sejumlah bank sentral lain masih mempertahankan kebijakan

akomodatif dan belum meningkatkan suku bunga. The Fed dan ECB masih mempertahankan suku bunga, tetapi telah mengurangi jumlah pembelian aset secara bertahap. The Fed telah menurunkan jumlah pembelian surat berharga sejak November 2021.¹ Selanjutnya pada FOMC 14-15 Desember 2021, the Fed kembali mengumumkan pengurangan laju pembelian *US Treasury* dan *Mortgage Backed Securities* masing-masing sebesar USD20 miliar/bulan dan USD10 miliar/bulan. Sementara ECB menetapkan pembelian aset dalam rangka *Pandemic Emergency Purchase Programme* dengan jumlah yang lebih rendah hingga akhir Maret 2022, namun meningkatkan jumlah pembelian aset dalam kerangka *Asset Purchase Programme*.

Kebijakan fiskal akomodatif masih berlanjut untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah AS telah menerbitkan *Emergency Relief Funds* senilai USD900 miliar pada Januari 2021 dan *American Rescue Plan* senilai USD1,8 triliun pada Maret 2021 untuk mendukung sektor kesehatan, rumah tangga, dan bisnis. AS juga akan meluncurkan stimulus *bipartisan infrastructure deal (Infrastructure Investment and Jobs Act)* senilai USD1,2 triliun. Di Eropa, European Commission telah merilis *the Next Generation EU (NGEU)* untuk mendukung negara anggota yang terdampak pandemi COVID-19 senilai EUR750 miliar.

¹ Pada FOMC November 2021, dilakukan penurunan pembelian aset sebesar USD15 miliar/bulan, terdiri dari pengurangan pada *US Treasury* USD10 miliar dan *MBS* USD5 miliar.

Prospek pemulihan ekonomi global diperkirakan masih akan dihadapkan pada berbagai faktor risiko.

Dunia perlu mencermati varian baru COVID-19, *supply-demand mismatches*, tekanan kenaikan harga yang lebih lama, normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat, stimulus fiskal AS yang lebih rendah, risiko perubahan iklim, serta ketegangan perdagangan dan teknologi. Selain itu, juga perlu dicermati *scarring effect* dampak pandemi pada sektor tenaga kerja dan pendidikan yang dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan kesenjangan sosial. Perbedaan *exit policy* antarnegara juga berpotensi menimbulkan risiko *spillover* terutama pelarian arus modal dari negara EMs. Kondisi ini menjadi *concern* berbagai fora kerja sama internasional. Diskusi mengenai langkah untuk menghindari *spillover* negatif dari normalisasi kebijakan negara maju terus bergulir, selain tetap melanjutkan diskusi upaya mempercepat pemulihan ekonomi.

Supply Bottlenecks Menghambat Pemulihan Ekonomi Global 2021

Pemulihan ekonomi dunia pada 2021 menghadapi tantangan hambatan suplai. Berbagai kendala suplai menyebabkan permintaan yang tinggi pasca *reopening*, stimulus kebijakan, dan vaksinasi, tidak dapat terpenuhi oleh peningkatan pasokan yang memadai. Sejumlah produsen sempat menutup atau menghentikan operasional untuk menahan penyebaran infeksi. Selain itu, juga terdapat permasalahan kemacetan pada Terusan Suez, kelangkaan tenaga kerja, dan kongesti di pelabuhan.

Kelancaran arus barang mengalami hambatan yang memperlambat waktu pengiriman barang.

Kapal kontainer Ever Given yang terjebak di kanal terusan Suez selama enam hari telah menghalangi lalu lintas pelayaran global. Terusan Suez merupakan salah satu terminal pengiriman tersibuk di dunia yang menjadi jalur tercepat pengiriman barang dari Asia ke Eropa. Badai Ida yang terjadi di AS juga telah mengganggu distribusi barang di AS secara temporer, dipengaruhi penutupan Pelabuhan New Orleans dan pengalihan sebagian truk untuk mengirimkan bantuan. Selain itu, terdapat persoalan kongesti di Pelabuhan Los Angeles dan Pelabuhan Long Beach akibat keterbatasan *labor* dan *space*, yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga semester I 2022.

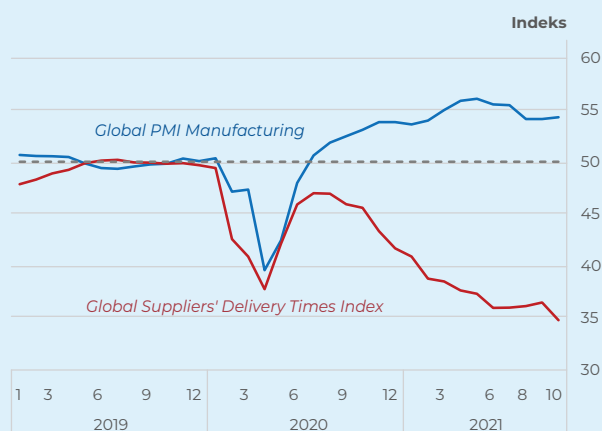
Peningkatan COVID-19 menyebabkan pemberlakuan kembali *containment measures* dan menambah permasalahan suplai.

Kasus infeksi COVID-19 di Asia kembali meningkat akibat penyebaran varian Delta. Restriksi ketat di Vietnam menyebabkan penutupan aktivitas pabrik. Di Tiongkok, restriksi ditandai dengan penutupan *container* terminal Ningbo-Zhoushan (pelabuhan tersibuk ketiga di dunia) yang menyebabkan *shortage of container shipping* akibat tertahannya bongkar muat. Sementara di Amerika Serikat, infeksi COVID-19 telah menghambat bongkar muat di pelabuhan dan membatasi ketersediaan truk untuk distribusi akibat penghentian sementara tenaga kerja. Dinamika tersebut menyebabkan waktu pengiriman barang menjadi lebih lama dan memicu kenaikan harga produk.

Supply bottlenecks menyebabkan penurunan kinerja sektor manufaktur dan meningkatkan harga.

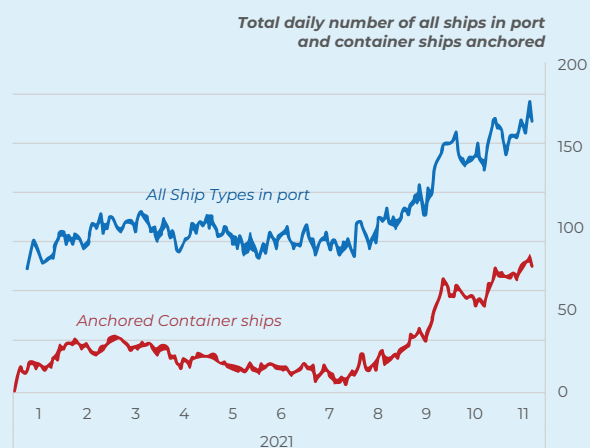
Ekspansi produksi manufaktur global menurun, tercermin dari PMI Manufaktur pada Oktober 2021 yang turun menjadi 58,4, dari 60,7 pada September 2021. Upaya peningkatan produksi terhambat disrupsi *supply chain*, *delay* transportasi, serta kekurangan *input* bahan mentah dan tenaga kerja. Sementara itu, peningkatan *demand* yang lebih cepat dari suplai dapat memberi tekanan kenaikan harga yang lebih lama dari perkiraan. IMF dalam laporan *World Economic Outlook* Oktober 2021 menyatakan bahwa isu *supply bottlenecks* menjadi salah satu *downside risk* bagi perekonomian global.

Grafik 1.7 Global Manufacturing PMI dan Suppliers' Delivery Times Index



Sumber: IHS Markit

Grafik 1.8 Number of container ships waiting to offload



Sumber: Marine Exchange of Southern California
Notes: Data from December 12, 2020-November 17, 2021; ships 'in port' include all ships anchored, at berth and in drift areas

I.2.1. Amerika Serikat

Pemulihan ekonomi yang berlangsung setelah terkontraksi pada 2020 mendapat tantangan dari penyebaran COVID-19 varian Delta. Secara umum, perekonomian AS selama 2021 mengalami perbaikan, ditopang oleh stimulus kebijakan, vaksinasi, dan relaksasi restriksi mobilitas. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 mencapai 12,2%, jauh meningkat dari 0,5% pada triwulan I 2021, yang juga dipengaruhi faktor *base effect*. Namun laju pemulihan ekonomi tersebut tertahan oleh penyebaran varian Delta yang meluas dan mencapai *peak* pada pertengahan September 2021. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 kembali melambat menjadi 4,9%.²

PDB triwulan III 2021 tertahan oleh kenaikan kasus infeksi COVID-19 varian Delta, *supply chain bottleneck*, dan kenaikan inflasi. Kasus infeksi COVID-19 di AS kembali meningkat akibat penyebaran varian Delta, terutama di wilayah Selatan AS dengan tingkat vaksinasi rendah. Kekhawatiran varian Delta telah menahan mobilitas, yang berimplikasi pada tertahannya konsumsi dan produksi. Untuk itu, AS terus memperkuat program vaksinasi. Per 14 Desember 2021, sekitar 92,9% populasi dewasa AS telah menerima vaksin 1 dosis, jauh di atas target pemerintah 70%. AS juga menghadapi tantangan *supply chain bottleneck* yang mengganggu aktivitas produksi. Hambatan suplai berdampak pada kenaikan inflasi yang lebih persisten dibandingkan perkiraan otoritas dan pelaku pasar, dan menahan pemulihan ekonomi.

Peningkatan infeksi varian Delta kembali menahan mobilitas penduduk AS yang sedang dalam fase *reopening* dari *first wave*. Konsumsi pada sektor jasa yang rentan terhadap penyebaran virus seperti hotel dan restoran kembali tertahan, dan kepercayaan konsumen menurun signifikan. The University of Michigan's *consumer sentiment index* November 2021 sempat mencapai 67,4, terendah dalam satu dekade.

Sejumlah perusahaan besar juga menunda rencana untuk kembali bekerja di kantor hingga pandemi dapat dikendalikan.

Ekonomi AS dihadapkan pada tantangan *supply chain bottleneck*. Proses produksi yang terkendala oleh kelangkaan *container* dan *port congestion*, telah meningkatkan biaya logistik dan memperpanjang waktu pengiriman barang. Selain itu, juga terjadi kelangkaan barang input terutama semikonduktor, peningkatan harga komoditas dan energi, serta kelangkaan tenaga kerja. Aktivitas sektor manufaktur menjadi terganggu, tercermin dari indeks PMI manufaktur November 2021 yang kembali menurun ke 58,3 dari 58,4 pada Oktober 2021—terendah sejak Desember 2020.

Hambatan suplai menyebabkan tekanan inflasi tinggi yang lebih lama dari perkiraan otoritas dan pelaku pasar. Inflasi CPI November 2021 mencapai 6,8% yoy, jauh di atas target rerata inflasi the Fed sebesar 2%, dan tertinggi sejak November 1990. The Fed dalam *Summary of Economic Projections* Desember 2021 merevisi inflasi *Personal Consumption Expenditure* (PCE) 2021 menjadi lebih tinggi sebesar 5,3% yoy dari proyeksi September 2021 sebesar 4,2%. Sementara inflasi PCE 2022 diperkirakan akan menurun ke 2,6%, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,2%.

Perbaikan sektor tenaga kerja dibayangi fenomena *great resignation*. Seiring *reopening* ekonomi, aktivitas bisnis kembali dibuka dan sektor tenaga kerja mengalami perbaikan. *Unemployment rate* tercatat 4,2% pada November 2021, level terendah sejak April 2020 sebesar 14,8%. Namun perbaikan dibayangi oleh fenomena *great resignation* (berhenti kerja secara sukarela), ditunjukkan *level quit rate* AS sebesar 3,0% (*preliminary data*) pada September 2021 yang merupakan level tertinggi sejak Desember 2000. *Great resignation* dipengaruhi beberapa hal, yaitu pensiun dini, mencari pekerjaan yang lebih baik, menjaga kesehatan, dan menuntut upah yang lebih tinggi.

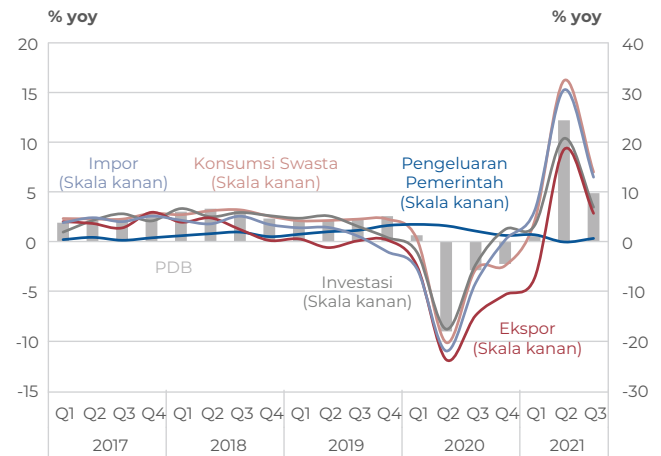
² Second estimate

The Fed masih mempertahankan Fed Fund Rate, namun mulai mengurangi jumlah pembelian aset. Pada FOMC 14-15 Desember 2021, the Fed mempertahankan *Fed Fund Rate* pada *zero lower bound* (0,00%-0,25%). Namun sejalan dengan perbaikan ekonomi dan kenaikan inflasi, the Fed mengumumkan pengurangan laju pembelian *US Treasury* sebesar USD20 miliar/bulan dan *Mortgage-Backed Securities* sebesar USD10 miliar/bulan. Dalam FOMC ini, the Fed juga menghilangkan kata *transitory* terkait inflasi dan menambahkan varian virus baru sebagai sumber risiko terhadap perekonomian.

Pemerintah AS mempertahankan kebijakan fiskal akomodatif. Pada 2021, pemerintah mengucurkan stimulus fiskal yang sangat besar untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi. Stimulus *American Rescue Plan* (USD1.844 miliar atau sekitar 8,8% PDB 2020) difokuskan pada sektor kesehatan, rumah tangga, dan bisnis (termasuk perpanjangan *unemployment benefit program*). AS juga telah meloloskan *bipartisan infrastructure deal* (*Infrastructure Investment and Jobs Act* senilai USD1,2 triliun). Pemerintah juga berencana meluncurkan program *social spending* (*Build Back Better*) senilai USD1,75 triliun. Program tersebut antara lain ditujukan untuk mencapai *climate goals* dan membuka jutaan lapangan pekerjaan.

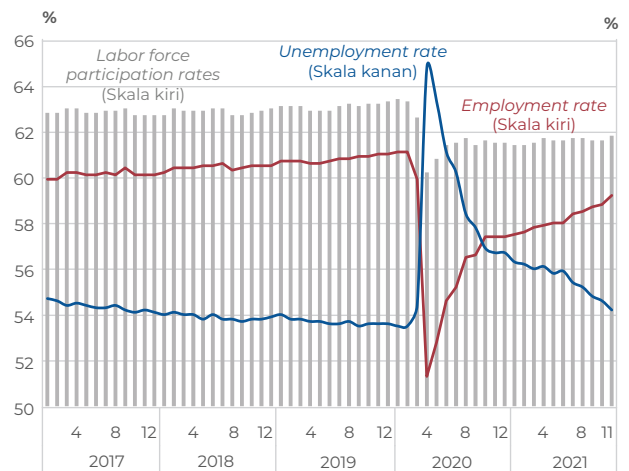
Sejalan dengan terjadinya hambatan suplai, pertumbuhan ekonomi AS 2021 diprediksi lebih rendah dari prakiraan awal. Pada proyeksi Desember 2021, the Fed merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi AS 2021 menjadi 5,5%, dari 5,9% pada proyeksi September 2021. Namun the Fed optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi ke depan dan merevisi ke atas *outlook* PDB 2022 menjadi 4,0%, dari 3,8% pada proyeksi sebelumnya. IMF dalam WEO Oktober 2021 juga merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi tahunan AS 2021 menjadi 6% (dari 7% pada WEO Juli 2021). Selanjutnya, seiring prediksi *herd immunity* akan tercapai dan hambatan suplai mereda, PDB AS 2022 diperkirakan membaik mencapai 5,2%, dari estimasi WEO Juli 2021 sebesar 4,9%. Pemulihan ekonomi AS 2022 yang lebih baik diharapkan dapat memberikan *spillover* positif bagi ekonomi dunia, baik melalui jalur perdagangan maupun keuangan.

Grafik 1.9 Pertumbuhan PDB Amerika Serikat



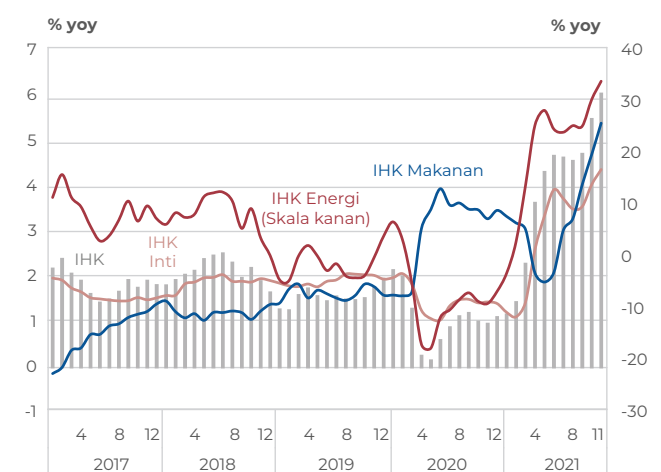
Sumber: US Bureau of Economic Analysis

Grafik 1.10 Indikator Tenaga Kerja Amerika Serikat



Sumber: US Department of Labor

Grafik 1.11 Inflasi Amerika Serikat

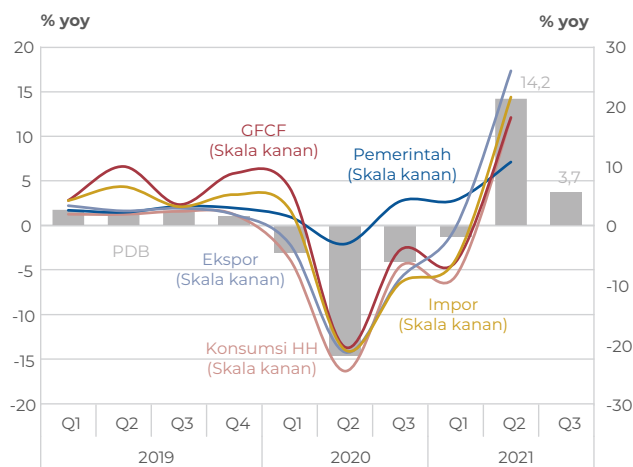


Sumber: US Bureau of Labor Statistics

1.2.2. Kawasan Euro

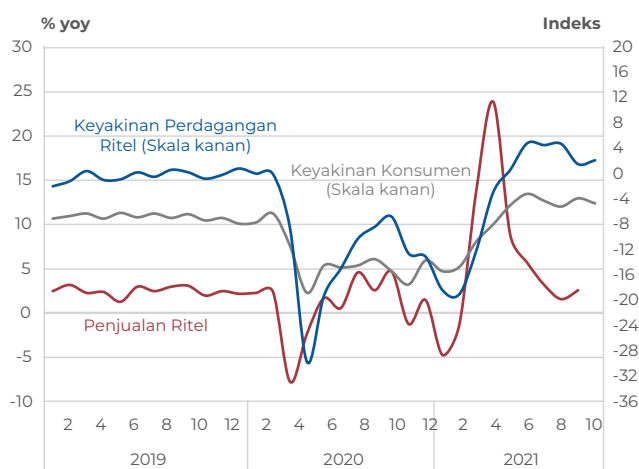
Pemulihan ekonomi Kawasan Euro 2021 tertahan oleh peningkatan kasus infeksi COVID-19 dan hambatan suplai. Setelah tumbuh tinggi pada triwulan II 2021 mencapai 14,2%, PDB Kawasan Euro triwulan III 2021 melambat ke level 3,7%. Penyebaran varian Delta di sejumlah negara menahan perbaikan *pent-up demand* akibat restriksi terbatas yang diterapkan. Hambatan suplai juga menahan kinerja sektor manufaktur. Di antara empat negara inti Kawasan Euro, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Italia (3,9%), diikuti oleh Prancis (3,3%), Spanyol (2,7%), dan Jerman (2,5%). Pemulihan PDB Jerman tertahan oleh disrupsi pada sektor otomotif, yang diakibatkan oleh keterbatasan pasokan semikonduktor.

Grafik 1.12 Perkembangan PDB Kawasan Euro



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.13 Indikator Konsumsi Kawasan Euro

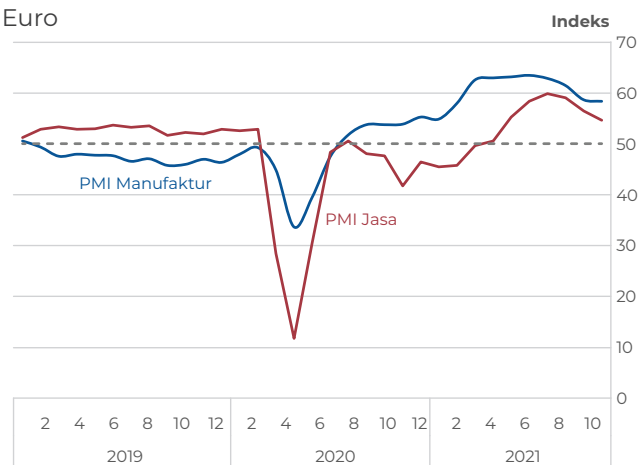


Sumber: Bloomberg

Restriksi mobilitas secara terbatas untuk mengatasi penyebaran kasus COVID-19 varian Delta telah menahan perbaikan konsumsi rumah tangga.

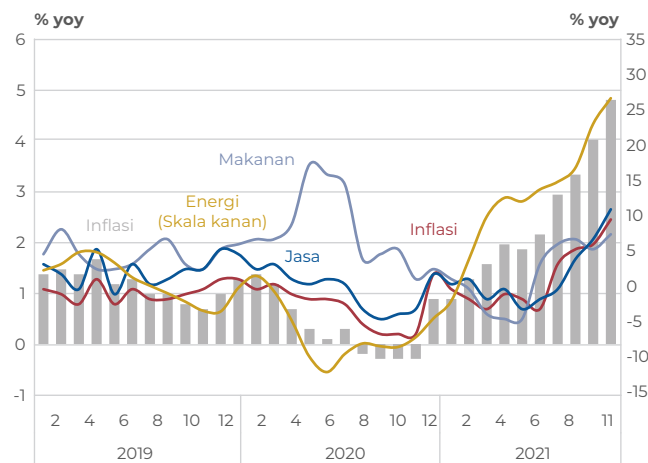
Restriksi yang diterapkan antara lain pembatasan *gathering*, jam operasional dan bar, pemberlakuan *health pass*, penerapan protokol kesehatan, serta pembatasan jam malam di beberapa wilayah (*regional curfew*). Pengetatan restriksi tersebut berimplikasi pada penurunan mobilitas sektor ritel dan konsumsi jasa rekreasi.

Grafik 1.14 Purchasing Managers' Index Kawasan Euro



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.15 Inflasi HICP Kawasan Euro



Sumber: Bloomberg

Pemulihan aktivitas ekonomi sektor manufaktur dan jasa pasca *reopening first wave*, serta kenaikan permintaan global juga kembali tertahan oleh hambatan suplai. *Rebound* pada *Purchasing Manager Index* (PMI) manufaktur termoderasi akibat keterbatasan suplai barang input bahan baku produksi, dan kenaikan tarif *container shipping* dari Asia ke Eropa. Gangguan *supply chain global* membatasi pemulihan aktivitas industri terutama pada sektor otomotif Jerman. Hambatan semikonduktor juga berdampak pada industri komputer dan elektronik.

Kawasan Euro menghadapi tantangan kekurangan pasokan energi terutama gas. Kelangkaan bahan bakar gas antara lain disebabkan oleh peningkatan permintaan pascarelaksasi *containment measures* yang belum dapat diimbangi oleh suplai, penurunan investasi dan perawatan kilang minyak dan gas saat COVID-19, pasokan *hydro energy* dari Norwegia yang menurun karena cuaca panas, transisi kepada *green energy* yang meningkatkan kebutuhan gas dibandingkan *fossil fuel*, serta hambatan pasokan dari Rusia.³ Sejumlah regulasi diterbitkan untuk mengatasi kenaikan harga gas. Italia memangkas pajak energi dan menurunkan harga listrik. Prancis menahan kenaikan harga gas untuk lima juta keluarga dan menurunkan pajak harga listrik sebagai subsidi untuk menjaga kenaikan tarif listrik tetap sebesar 4% hingga Februari 2022. Sementara Spanyol memperpanjang pembebasan pajak *power generation* hingga akhir 2021, menurunkan *special electricity tax* dari 5,1% menjadi 0,5%, serta membatasi kenaikan harga gas alam untuk rumah tangga dan UMKM.

Kawasan Euro mengalami tekanan kenaikan inflasi yang bersifat *transitory* dan berlangsung lebih lama dari perkiraan European Central Bank (ECB). Inflasi *harmonized index consumer price* November 2021 meningkat ke 4,9% yoy, dari 4,1% pada Oktober 2021. Inflasi mencatat level tertinggi sejak Juli 2008 dan jauh diatas target inflasi simetris 2% dan stabil dalam jangka menengah. Peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga energi (gas) sejalan dengan peningkatan kebutuhan menjelang musim dingin.

Tekanan inflasi diperkirakan baru akan menurun pada 2022, seiring meredanya faktor temporer hambatan suplai dan kenaikan harga energi.

ECB melanjutkan kebijakan akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi. ECB mempertahankan *main refinancing operations* sebesar 0,00%, *marginal lending facility* (0,25%), dan *deposit facility rate* (-0,50%). ECB melanjutkan pembelian aset melalui *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) dengan jumlah yang lebih rendah hingga Maret 2022.⁴ Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan moneter dengan target inflasi dalam jangka menengah, ECB meningkatkan pembelian aset dalam *Asset Purchase Program* (APP) dari EUR20 miliar/bulan pada triwulan IV 2021 menjadi EUR40 miliar (triwulan II 2022) dan EUR30 miliar (triwulan III 2022). Selanjutnya, mulai Oktober 2022, ECB akan menurunkan jumlah pembelian aset bersih APP sebesar EUR20 miliar/bulan sepanjang diperlukan untuk menjaga kebijakan moneter tetap akomodatif.

Ekonomi Kawasan Euro juga didukung oleh stimulus fiskal yang akomodatif. European Comissions melakukan pencairan NGEU secara bertahap mulai 2021 hingga 2026. Total dana NGEU sebesar EUR750 miliar, terdiri dari *loan* sebesar EUR360 miliar dan *grant* EUR390 miliar. Seluruh *loan* dan 80% *grant* akan digunakan untuk program *Recovery and Resilient Facility* (RFF) guna meningkatkan investasi yang sejalan dengan program *green economy* dan digitalisasi ekonomi Uni Eropa. Sejak Agustus 2021, sejumlah negara di Kawasan Euro telah menerima masing-masing sebesar 13% dari pagu RFF. Ekonomi diperkirakan terus membaik dalam jangka menengah. ECB memperkirakan *annual gross domestic product* 2021 tumbuh 5%, dan 4,6% pada 2022. Prakiraan tersebut sejalan dengan IMF (WEO Oktober 2021) yang memperkirakan PDB Eropa tumbuh 5% pada 2021, dan 4,3% pada 2022.

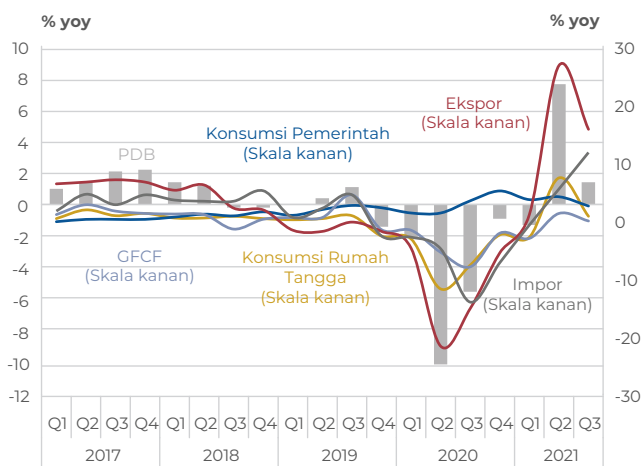
3 Jalur pipa Nord Stream 2 yang mengalirkan gas dari Rusia ke Eropa belum dapat digunakan. Euro Area merupakan net importir gas, dengan 70% pasokan di suplai dari Rusia.

4 Nilai total PEPP adalah EUR1,85 triliun.

1.2.3. Jepang

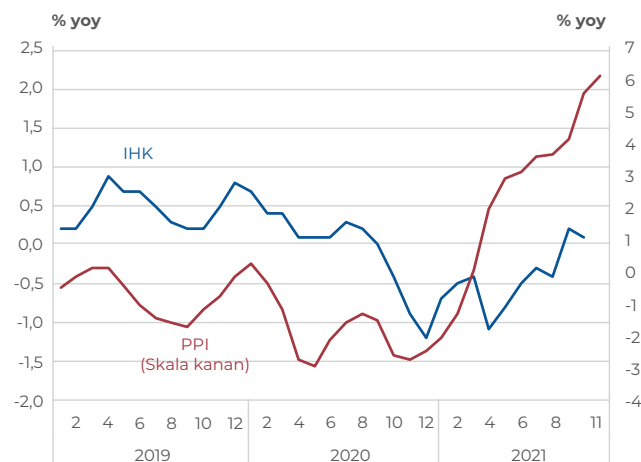
Perekonomian Jepang yang sedang dalam masa pemulihan dari dampak COVID-19, kembali tumbuh tertahan oleh gelombang baru kasus infeksi dan hambatan suplai. Pada triwulan II 2021, Jepang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% yoy, naik tinggi dari kontraksi -1,3% yoy pada triwulan I 2021, dan merupakan level positif pertama sejak triwulan IV 2019. Penguatan program vaksinasi memberi sentimen positif yang mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga dan aktivitas bisnis. Namun, kenaikan kasus COVID-19 yang direspons dengan penerapan *State of Emergency* (SOE), kembali menahan laju pemulihan ekonomi. Selain itu, perekonomian juga menghadapi tantangan hambatan suplai dan peningkatan harga komoditas global. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan PDB triwulan III 2021 tumbuh melambat menjadi 1,4%.

Grafik 1.16 Pertumbuhan Ekonomi Jepang



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.17 Inflasi CPI dan PPI Jepang



Sumber: Bloomberg

Aktivitas produksi tertahan oleh penerapan SoE, kelangkaan semikonduktor, dan kenaikan harga energi global. Pemerintah memberlakukan SoE yang cukup luas mencapai $\pm 78\%$ PDB pada triwulan III 2021, sebagai upaya membatasi penyebaran pandemi. Langkah tersebut menahan perbaikan ekonomi Jepang. Kegiatan produksi manufaktur juga menghadapi tantangan kelangkaan semikonduktor. Sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah permintaan dunia yang tinggi terhadap perangkat teknologi, *high entry barriers* manufaktur semikonduktor, kebakaran pabrik semikonduktor Jepang pada Maret 2021, serta hambatan produksi di Asia akibat pembatasan COVID-19.⁵ Akibat kelangkaan semikonduktor, perusahaan otomotif Toyota mengurangi produksi global sebesar 40%, sedangkan Honda beroperasi 40% dari kapasitas normal. Selain itu, kenaikan harga komoditas energi global yang berdampak pada kenaikan harga energi di Jepang turut menambah tekanan pada sektor manufaktur.⁶

Kenaikan harga komoditas global, termasuk energi, telah memberikan tekanan harga di sisi produsen (PPI), namun inflasi di level konsumen (CPI) masih sangat rendah. Dibandingkan tahun lalu, PPI mengalami kenaikan hingga 7,3% pada Oktober 2021, tertinggi sejak 2008. Namun dampak pada CPI masih relatif *muted* yaitu hanya 0,1% pada bulan yang sama. Minat belanja konsumen Jepang masih rendah, sejalan dengan *consumer confidence* yang menurun. Di samping itu, bobot inflasi energi yang lebih rendah dari inflasi makanan, turut menjadi salah satu faktor rendahnya CPI.⁷

Pemerintah dan Bank of Japan (BoJ) masih mempertahankan *stance* kebijakan fiskal dan moneter akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Suga telah menyalurkan paket stimulus ketiga senilai JPY73,6 triliun, dan *reserve budget* senilai JPY5 triliun untuk *supplementary budget* FY20 dan FY21. Sejalan dengan pergantian PM pada Oktober 2021, Pemerintahan PM Kishida berencana menambah stimulus fiskal sebesar JPY10 triliun dan meningkatkan anggaran FY21, meski

5 Pabrik utama Jepang Renesas Electronic di Hitachinaka terbakar pada 19 Maret 2021.

6 Jepang merupakan konsumen energi terbesar ke-5 dunia yang bergantung pada impor minyak, batu bara, dan gas alam.

7 Bobot inflasi energi sebesar 7,45%; Bobot inflasi makanan sebesar 26,2%.

akan menunda pencapaian target *primary balance surplus* pada 2025. Sejalan dengan langkah pemerintah, BoJ mempertahankan suku bunga jangka pendek pada -0,1% dan jangka panjang (JGB 10 tahun) pada 0%, serta melanjutkan *Quantitative and Qualitative Monetary Easing* (QQE) dengan *Yield Curve Control* (YCC).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang diwarnai dengan *downside risks*. Ekonomi Jepang masih menghadapi ketidakpastian dari risiko varian baru COVID-19 terhadap aktivitas konsumsi, *supply side constraint* semikonduktor, dan perlambatan pemulihan ekonomi global. Proyeksi pertumbuhan FY2021 direvisi ke bawah baik oleh BoJ (3,4% dari proyeksi Juli sebesar 3,8%), maupun IMF (2,4% dari proyeksi Juli 2,8%).⁸ Sedangkan pertumbuhan FY2022 diperkirakan tumbuh lebih baik oleh BoJ (2,9% dari proyeksi Juli sebesar 2,7%), dan IMF (3,2% dari proyeksi Juli sebesar 3,0%).

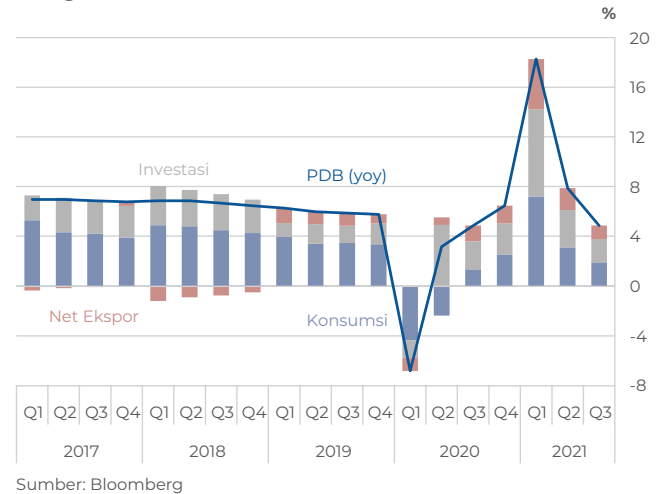
1.2.4. Tiongkok

Perekonomian Tiongkok tumbuh membaik pada 2021, pasca *reopening* ekonomi. Rerata pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat sebesar 9,8% sepanjang tiga triwulan pertama 2021, jauh diatas rerata pertumbuhan 2% pada 2020. Tiongkok adalah negara besar pertama di dunia yang mengalami kontraksi akibat COVID-19 (-6,8% pada triwulan I 2020), namun berhasil pulih terlebih dahulu dibandingkan negara lain. Pencapaian ini tidak lepas dari kebijakan restriksi ketat sejak awal pandemi dan tingkat vaksinasi yang tinggi.

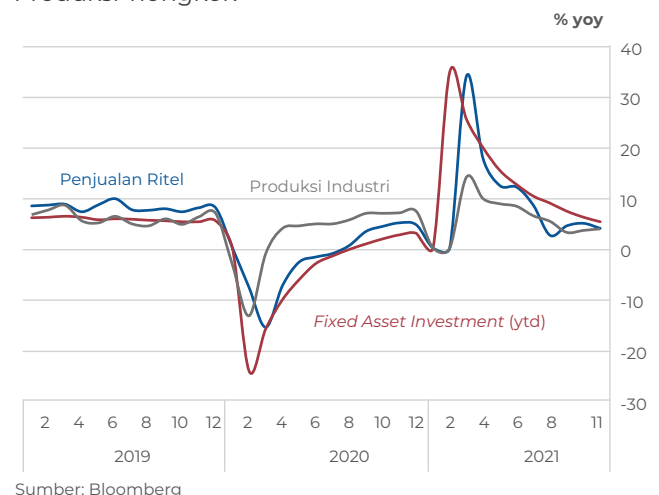
Laju perekonomian Tiongkok kembali melambat pada triwulan III 2021, setelah tumbuh tinggi pada awal 2021. Pertumbuhan ekonomi kembali tertahan oleh pengetatan mobilitas untuk mengatasi peningkatan kasus varian Delta, serta gangguan sisi suplai akibat keterbatasan listrik dan pengetatan regulasi. PDB tahunan triwulan III 2021 hanya tumbuh 4,9% yoy, turun tajam dari 7,9% (triwulan II 2021) dan 18,3% (triwulan I 2021), serta dibawah ekspektasi pasar sebesar 5%. Perlambatan terjadi di sektor sekunder (manufaktur industri) dan tersier (jasa). Komponen konsumsi, investasi dan net ekspor tercatat juga mengalami perlambatan.

⁸ Proyeksi IMF berdasarkan WEO Oktober 2021 dibandingkan Juli 2021. Proyeksi BoJ Oktober 2021 dibandingkan Juli 2021.

Grafik 1.18 Pertumbuhan PDB Tiongkok Menurut Pengeluaran



Grafik 1.19 Indikator Konsumsi, Investasi dan Produksi Tiongkok



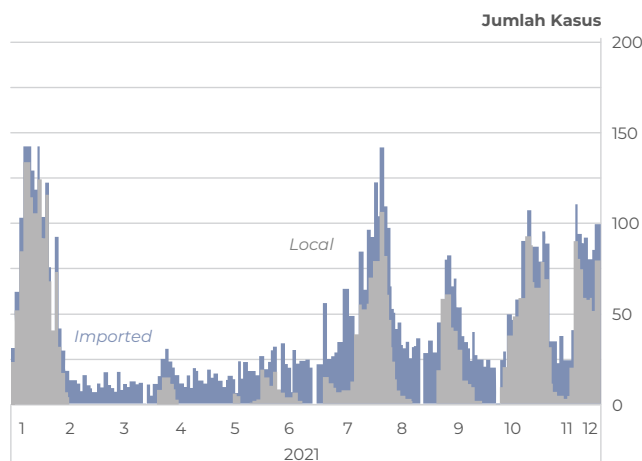
Kinerja konsumsi masih lemah karena pengetatan restriksi mobilitas saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada pertengahan 2021.⁹ Kebijakan *zero COVID tolerance* oleh pemerintah yang sangat ketat dibandingkan negara lain, menyebabkan konsumsi tertekan pada Juli dan Agustus. Pemerintah kembali memperketat restriksi di sejumlah provinsi seiring kenaikan jumlah kasus pada triwulan IV 2021.¹⁰ Indeks restriksi mobilitas Tiongkok mencapai 76, tertinggi

⁹ Rerata pertumbuhan penjualan ritel hanya 5,1% yoy pada triwulan III 2021, dari 14,1% pada triwulan II 2021.

¹⁰ Varian Delta telah menyebar ke 16 provinsi hingga akhir Oktober 2021. Pada Desember, lonjakan kasus kembali terjadi terutama di Hangzhou, Shaoxing dan Ningbo (Prov. Zhejiang). Otoritas memberlakukan restriksi mobilitas di ketiga kota tersebut hingga Maret 2022.

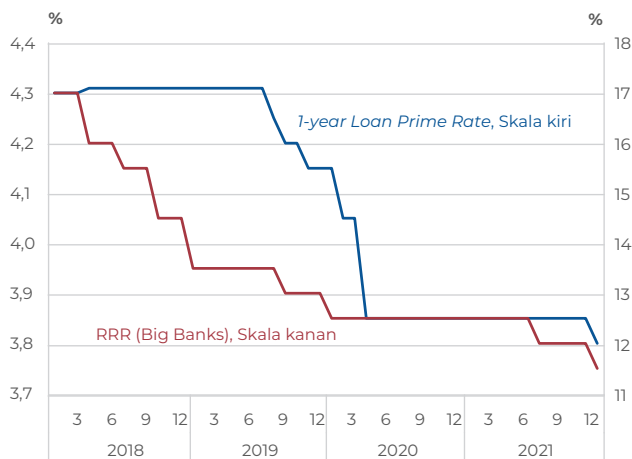
kelima di dunia, jauh di atas rerata global sebesar 49. Restriksi ketat tetap diberlakukan meski jumlah kasus aktif relatif rendah, dan 76% populasi telah divaksin. Hal ini berpotensi menunda pemulihan konsumsi jasa untuk kembali ke level pra-COVID hingga triwulan II 2022.

Grafik 1.20 Kasus Harian COVID-19 di Tiongkok



Sumber: Fitch

Grafik 1.21 Kebijakan Moneter PBOC



Sumber: Bloomberg

Aktivitas produksi melambat terutama karena keterbatasan listrik. Rerata produksi industri (IP) tumbuh 4,9% yoy pada triwulan III 2021, dari 9% pada triwulan II 2021. PMI manufaktur berlanjut kontraksi 49,2 pada Oktober (turun sejak Maret). Penyebab utama perlambatan produksi adalah pembatasan aktivitas produksi akibat keterbatasan listrik mulai September 2021. Mayoritas provinsi melakukan pemadaman bergilir untuk mencapai target emisi 2021. Kebijakan dekarbonisasi pemerintah turut menyebabkan penutupan sejumlah pertambangan batu bara dan

pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan.¹¹ Keterbatasan energi diperkirakan berlangsung hingga akhir musim dingin (awal 2022). Kebijakan *zero COVID* juga menyebabkan sejumlah pelabuhan besar ditutup sementara, sehingga menyebabkan gangguan suplai barang ke negara mitra dagang.

Investasi turut melambat karena pemerintah mengetatkan regulasi di beberapa sektor, terutama sektor properti. Otoritas memperketat syarat pengajuan pinjaman bagi pengembang dan pembeli properti, untuk meredam kenaikan harga dan tingkat utang properti. Pertumbuhan utang pengembang juga dibatasi dengan kebijakan *three red lines* mulai 2021, yaitu: 1) *liability-to-asset ratio* <70%, 2) *net debt* > *net equity*, dan 3) *cash to short-term debt ratio* >1.¹² Pengetatan ini menyebabkan penjualan dan harga properti menurun, sehingga perusahaan properti besar 'Evergrande' gagal membayar kupon obligasi.¹³ Sejumlah pengembang dengan tingkat utang tinggi juga gagal memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar. Pengetatan regulasi juga terjadi pada sektor pendidikan untuk mencapai *common prosperity* agar biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau. Regulator juga menghentikan operasi domestik Didi (perusahaan *ride-hailing* Tiongkok) yang IPO di bursa AS, karena alasan keamanan siber.¹⁴ Pengetatan regulasi menyebabkan ketidakpastian, serta menahan minat investasi swasta ke sektor yang terdampak.

Gangguan rantai pasokan dan kenaikan harga komoditas, menyebabkan inflasi produsen (PPI) naik tajam, dan mulai berdampak pada inflasi konsumen (CPI).¹⁵ Gangguan rantai pasokan global

¹¹ Sekitar 75% sumber energi Tiongkok berasal dari batu bara. 90% batu bara dihasilkan domestik, sisanya impor. Impor batu bara dari Australia dihentikan sementara karena ketegangan geopolitik sejak 2020.

¹² Pengembang yang memenuhi ketiga syarat, dapat menambah utang maksimal 15% pada tahun selanjutnya. Pengembang yang "melanggar" 1 syarat maksimal 10%, 2 syarat 5%, dan pelanggaran 3 syarat 0%.

¹³ Evergrande sempat membayar kupon obligasi USD tepat sebelum batas *grace period* 30 hari berakhir, namun gagal membayar kupon dua obligasi dengan *grace period* 6 Desember. Fitch memangkas *rating* menjadi *restricted default*.

¹⁴ Pemerintah menetapkan perusahaan Tiongkok dengan >1 juta pengguna, harus melalui proses *cybersecurity review* sebelum IPO di bursa asing,

¹⁵ PPI meningkat 12,9% yoy pada November 2021, melanjutkan tren kenaikan pada periode Juli (9%) hingga Oktober (13,5%). CPI November juga meningkat menjadi 2,3%, dari 0,7% (September) dan 1,5% (Oktober).

(terutama perkapalan) mengakibatkan kenaikan harga komoditas, listrik, dan bahan baku. Pemadaman listrik juga mengakibatkan kenaikan harga produk *energy-intensive* (semen dan produk kimia). Kenaikan PPI menyebabkan tingkat keuntungan perusahaan menipis, sehingga investasi swasta ke depan berpotensi turun. Sejalan dengan PPI, CPI berangsur meningkat. Produsen mulai menaikkan harga jual akibat lonjakan PPI dan keterbatasan suplai, di tengah pembatasan produksi akibat COVID-19. Harga makanan berbalik meningkat setelah deflasi selama lima bulan, a.l karena faktor *base effect*. Ke depan, PPI diperkirakan melandai seiring intervensi pemerintah untuk stabilisasi harga komoditas. Sementara CPI diperkirakan meningkat, karena *low base effect* berlalu dan transmisi lonjakan PPI ke CPI dalam beberapa bulan ke depan.

Kebijakan moneter akomodatif untuk menjaga stabilitas ekonomi riil dan mencegah risiko keuangan, di tengah kebijakan fiskal yang relatif terbatas. PBOC kembali memangkas *reserve requirement ratio* (RRR) secara *broad-based* sebesar 50 bps pada 15 Desember 2021, menjadi 11,5% untuk *large banks* dan 8,5% untuk *small-medium banks*. RRR cut sebelumnya sebesar 50 bps pada 15 Juli 2021. Selain itu, PBOC juga memangkas *1-year Loan Prime Rate* sebesar 5 bps menjadi 3,8% pada 20 Desember 2021. Otoritas menyatakan kebijakan moneter pada 2022 akan tetap akomodatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Sasaran kebijakan moneter akan difokuskan untuk membantu UMKM, memajukan teknologi dan mengembangkan investasi hijau. Sementara itu, belanja fiskal relatif terbatas hingga triwulan III 2021, karena penerimaan fiskal melambat akibat kontraksi sektor properti. Belanja fiskal melalui penerbitan obligasi khusus Pemda (*local government special bond*) untuk pembiayaan proyek infrastruktur, juga relatif terlambat.¹⁶

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus melambat dengan risiko yang meningkat. Konsumsi diperkirakan baru pulih ke level pra-COVID pada triwulan II 2022, seiring lonjakan kasus baru. Investasi dan produksi diperkirakan tertahan hingga gangguan suplai dan listrik terselesaikan, serta kekawatiran krisis sektor properti mereda. Keterbatasan produksi juga akan menahan pertumbuhan ekspor ke depan. Sejumlah risiko tersebut mendorong lembaga internasional dan

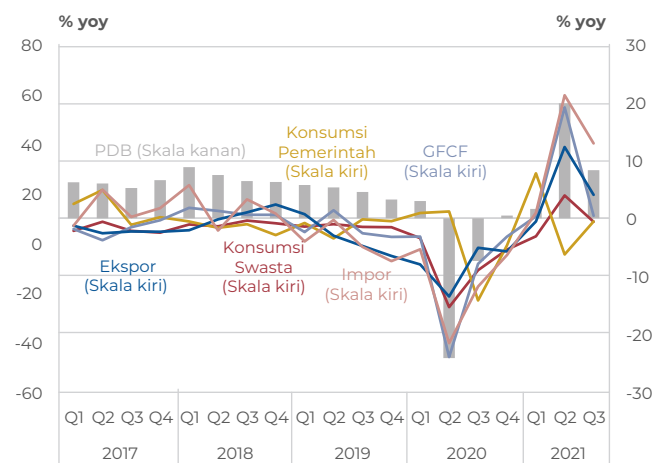
pelaku pasar untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan Tiongkok. IMF dalam WEO Oktober merevisi proyeksi menjadi 8% (2021) dan 5,6% (2022), dari 8,1% dan 5,7% pada WEO Juli. Sementara Pemerintah menargetkan pertumbuhan di atas 6% pada 2021.

I.2.5. India

Perekonomian India 2021 terindikasi mengalami perbaikan, meski dibayangi oleh penyebaran varian Delta. Ekonomi telah mencatatkan level pertumbuhan yang positif setelah berkontraksi -7,1% pada 2020. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2021 tumbuh cukup tinggi mencapai 20,1%, di tengah peningkatan kasus infeksi varian Delta (*second wave*). Konsumsi dan investasi masih dapat tumbuh meningkat sejalan dengan restriksi mobilitas yang lebih longgar dibandingkan *first wave*, serta pengaruh *low based effect* rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Selanjutnya pada triwulan III 2021, ekonomi India tumbuh 8,4%, terutama didorong oleh ekspansi belanja pemerintah dan swasta.

India menghadapi gelombang kedua kasus infeksi COVID-19 yang lebih mengkhawatirkan, namun direspons dengan restriksi mobilitas yang lebih terbatas dibandingkan gelombang pertama. Gelombang kedua COVID-19 dimulai pada Maret 2021 didominasi oleh varian Delta, yang lebih cepat menular dan mematikan. Kasus terkonfirmasi positif naik tinggi dari sekitar 13.000 kasus pada Januari 2021, menjadi 400.000 pada awal Mei 2021. Kapasitas kesehatan tidak memadai untuk menampung pasien yang meningkat cepat dan terjadi kelangkaan oksigen, sehingga tingkat

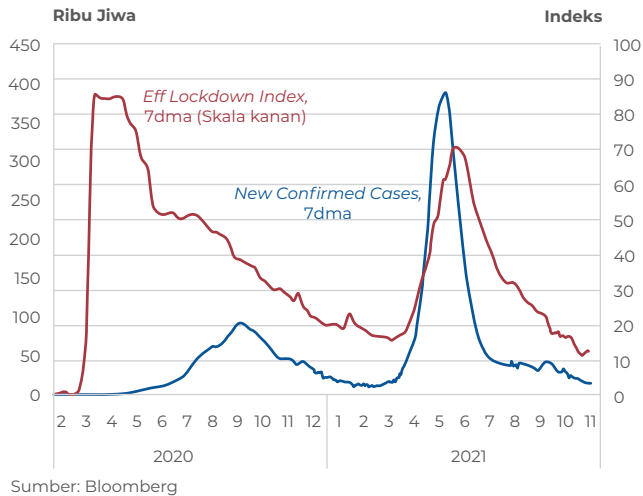
Grafik 1.22 Pertumbuhan PDB India



Sumber: Bloomberg

¹⁶ Penerbitan LGSB baru aktif dilakukan pada pertengahan 2021 (biasanya pada awal tahun), sehingga membutuhkan waktu untuk transmisi ke sektor riil.

Grafik 1.23 New Cases Covid-19 & ELI India



kematian sempat mencapai 3.500 orang per hari. Namun demikian, pemerintah memberlakukan restriksi yang lebih ringan dibandingkan *first wave* untuk meminimalkan dampak pada pelemahan ekonomi.

Pemerintah mempercepat upaya vaksinasi untuk mengatasi penyebaran varian Delta. Otoritas menetapkan target seluruh populasi *fully vaccinated* pada akhir 2021, dan berupaya meningkatkan produksi vaksin.¹⁷ Upaya tersebut menghadapi kendala keterbatasan suplai vaksin meski India merupakan produsen vaksin global dengan pangsa >50% dari total produksi global. Perusahaan produsen vaksin diminta untuk meningkatkan produksi, namun terdapat hambatan keterbatasan bahan baku. Kondisi tersebut direspons dengan larangan ekspor vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut berdampak pada terganggunya suplai vaksin global terutama dalam skema COVAX, yang sangat dibutuhkan oleh negara miskin dan berkembang. Keran ekspor baru dibuka pada Oktober 2021 setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan kasus COVID-19 mulai melandai.

Di tengah pemulihan pasca *outbreak* gelombang kedua, India menghadapi permasalahan kelangkaan batu bara. *Shortage* sumber energi tersebut disebabkan oleh *mismatch* antara *supply* dan *demand* pasca *reopening*. Dari sisi suplai, terjadi kendala produksi akibat pembatasan mobilitas dan cuaca buruk yang

mengganggu aktivitas di pertambangan. India juga mengalami keterlambatan akumulasi persediaan, sejalan dengan penundaan impor batu bara akibat harga yang sudah tinggi. Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi kelangkaan batu bara, antara lain meningkatkan pasokan domestik dan impor, serta meningkatkan penggunaan gas untuk menurunkan permintaan batu bara.

Peningkatan harga energi memberi tekanan kenaikan harga di sisi produsen, sementara dampak pada inflasi konsumen masih relatif terbatas. Inflasi produsen atau *whole price index* (WPI) November 2021 sebesar 14,23%, sedangkan *consumer price index* (CPI) tercatat sebesar 4,91%. Di India, harga makanan memberikan pengaruh yang cukup besar dengan bobot 39%, sementara bobot inflasi *fuel and light* hanya 6,84%. Namun jika peningkatan harga energi berlanjut, India perlu mewaspadai dampak *second round* kenaikan harga energi terhadap inflasi konsumen, yang dapat menahan belanja masyarakat.

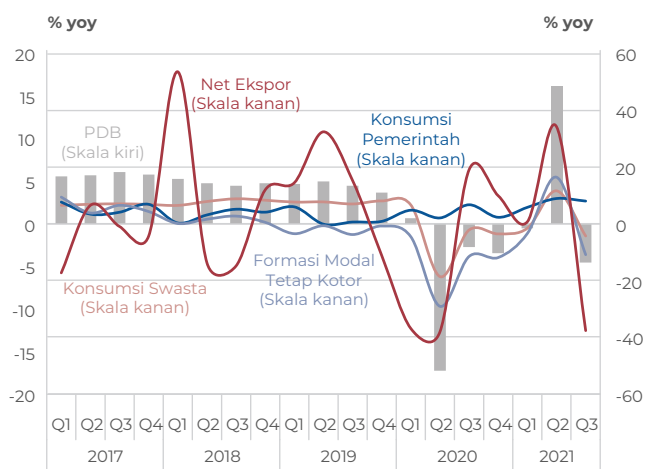
Pemerintah dan Bank Sentral masih mempertahankan kebijakan moneter dan fiskal akomodatif untuk mendukung perbaikan ekonomi pasca-COVID-19. Reserve Bank of India (RBI) mempertahankan *repurchase rate* sebesar 4,0%, dan *repo rate* sebesar 3,35% pada Oktober 2021. RBI memberikan *forward guidance* suku bunga dipertahankan “*as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis.*” Pemerintah juga memberi ruang akomodatif di tengah keberlanjutan perbaikan ekonomi. Meski demikian, defisit fiskal India diperkirakan membaik sejalan dengan normalisasi aktivitas perekonomian sehingga meningkatkan penerimaan dari *direct taxes* dan *Goods and Services Tax* (GST). Peningkatan penerimaan memberi kelonggaran fiskal bagi pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi—terutama belanja kesehatan dan infrastruktur. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, serta dukungan peningkatan vaksinasi, IMF pada WEO Oktober 2021 mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB India 2021 sebesar 9,5% dan PDB 2022 sebesar 8,5%. RBI juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan FY21-22 sebesar 9,5%, dan pada triwulan I FY22-23 mencapai 17,2%.

¹⁷ Tingkat vaksinasi per 13 November 2021: 27,6% tervaksinasi penuh, 56,4% tervaksin dosis satu.

I.2.6. Malaysia

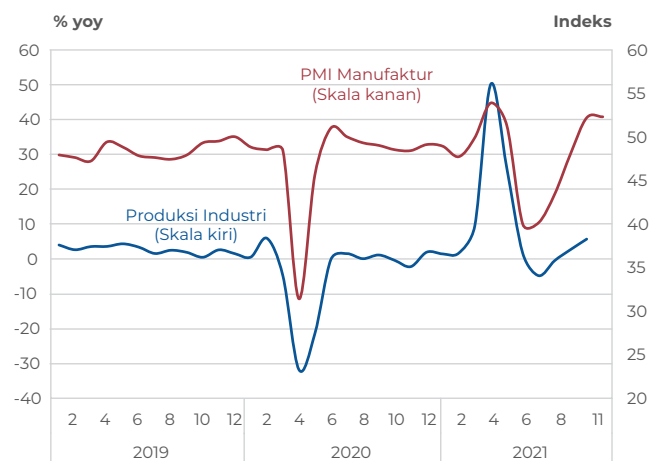
Pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung setelah pelonggaran restriksi mobilitas kembali tertahan oleh kenaikan varian Delta. Setelah berkontraksi dalam empat triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Malaysia triwulan II 2021 cukup signifikan mencapai 16,1%, dari -0,5% pada triwulan I 2021. Perbaikan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi domestik dan ekspor, serta dipengaruhi oleh *low base effect* kontraksi ekonomi tahun lalu. Namun, merebaknya varian Delta pada triwulan III 2021 dan direspons dengan pembatasan mobilitas yang ketat, kembali menjadikan ekonomi triwulan III 2021 berkontraksi -4,5%.

Grafik 1.24 Grafik Pertumbuhan PDB Malaysia Berdasarkan Pengeluaran



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.25 Produksi Industri dan PMI Manufaktur Malaysia



Sumber: Bloomberg

Ekonomi Malaysia menghadapi tantangan peningkatan kasus COVID-19 varian Delta. Pemerintah mengambil langkah pengetatan yang cukup ketat untuk mengatasi perluasan penyebaran virus. Pemerintah menerapkan *National Recovery Plan* (NRP) fase 1 atau *total lockdown* pada 1–28 Juni 2021. Selama fase tersebut, semua sektor ekonomi dilarang beroperasi kecuali sektor esensial. Pemerintah mengizinkan 17 sektor penting untuk tetap beroperasi, termasuk sektor kesehatan, makanan dan minuman, utilitas, perbankan, serta telekomunikasi dan media. Pemerintah juga mengizinkan perusahaan yang berada pada 12 sub sektor manufaktur beroperasi dengan kapasitas 60% antara lain *electrical and electronics* yang berperan dalam pasokan chip global. Sementara beberapa sektor lain seperti *iron and steel* beroperasi dengan kapasitas 10%. Restriksi mobilitas menahan aktivitas manufaktur, tercermin dari indeks PMI manufaktur yang turun ke 39,9 pada Juni 2021, dan produksi industri yang turun signifikan menjadi -5,1% yoy pada Juli 2021.

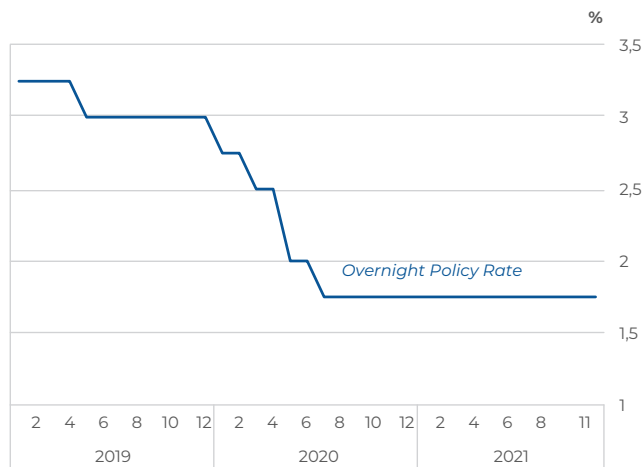
Berdasarkan aturan pemerintah, pabrik-pabrik harus ditutup selama dua minggu untuk sanitasi jika lebih dari tiga pekerja tertular COVID-19. Hal tersebut dialami oleh perusahaan semikonduktor Malaysia Unisem Bhd.¹⁸ yang menutup beberapa pabrik setelah tiga karyawan meninggal karena COVID-19. Penutupan pabrik tersebut berdampak pada pasokan chip yang dibutuhkan oleh Tesla Inc. hingga Toyota Motor Corp.

Kebijakan ketat menambah tekanan hambatan supply semikonduktor global. Malaysia merupakan pemasok produk semikonduktor dengan kontribusi sebesar 13% terhadap total produksi dunia. Negeri jiran tersebut juga berperan penting dalam pengujian dan perakitan chip, serta menjadi lalu lintas perdagangan bagi 7% chip semikonduktor dunia. Kelangkaan semikonduktor berdampak negatif pada industri otomotif dan elektronik global. Produsen mobil Toyota Motor Corp., Ford Motor Co., General Motors Co., dan Nissan Motor Co., mengurangi produksi. Toyota memangkas produksi global sekitar 40% pada

¹⁸ Unisem adalah salah satu perusahaan besar perakitan dan pengujian chip yang berbasis di Malaysia untuk perusahaan seperti Infineon Technologies AG dan STMicroelectronics NV.

September 2021. Ford menangguhkan pekerjaan sekitar satu minggu pada pabrik F-150 di Kansas dan pabrik Fiesta di Cologne, Jerman. General Motors akan mengurangi produksi 100.000 kendaraan di Amerika Utara pada paruh kedua 2021.

Grafik 1.26 Grafik Suku Bunga Kebijakan Bank Negara Malaysia



Sumber: Bloomberg

Otoritas melanjutkan kebijakan akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi. Bank Negara Malaysia memutuskan mempertahankan *overnight policy rate* pada level 1,75% untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dari sisi fiskal, pemerintah merilis paket stimulus sebagai berikut.

1. 18 Januari 2021, merilis Paket Bantuan PERMAI senilai MYR15 miliar untuk mendukung dunia usaha.

2. 17 Maret 2021, meluncurkan paket PEMERKASA senilai MYR20 miliar. Stimulus ditujukan untuk mendukung dunia usaha dan memberi bantuan kepada masyarakat dan sektor terdampak pandemi.
3. 31 Mei 2021, meluncurkan paket bantuan PEMERKASA Plus untuk peningkatan kapasitas kesehatan masyarakat dan mendukung dunia usaha yang terkena dampak ekonomi dari *total lockdown*.
4. 28 Juni 2021, meluncurkan paket stimulus PEMULIH senilai MYR150 miliar, antara lain untuk membantu kesejahteraan rakyat (MYR97,9 miliar), mendukung keberlanjutan usaha (MYR51,1 miliar), dan vaksinasi nasional (MYR1 miliar).

Pemulihan ekonomi Malaysia tertahan oleh merebaknya varian Delta yang disikapi dengan pembatasan restriksi mobilitas ketat. Bank Negara Malaysia merevisi ke bawah *outlook* PDB 2021 menjadi 3%-4% yoy dari estimasi sebelumnya 6,0%-7,5%. Ketidakpastian dampak restriksi mobilitas menahan laju pemulihan pada triwulan III 2021. Sejalan dengan itu, IMF pada WEO Oktober 2021 juga merevisi ke bawah proyeksi 2021 menjadi 3,5% yoy, dari proyeksi sebelumnya 4,7% (WEO Juli 2021). Selanjutnya pada 2022, BNM dan IMF memprediksi ekonomi Malaysia masing-masing tumbuh sebesar 5,5%-6,5% dan 6%. Ekonomi diharapkan kembali normal, sejalan dengan peningkatan vaksinasi dan peningkatan *global demand*.



BAB 2

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Agenda pada sejumlah fora kerja sama internasional pada 2021 secara umum difokuskan pada upaya untuk memperkuat komitmen mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi global. Diskusi pada fora kerja sama internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan pada perekonomian global, terutama yang disebabkan oleh pandemi, serta merumuskan respons kebijakan yang tepat. Selain itu, agenda untuk mengatasi sejumlah permasalahan jangka panjang, seperti produktivitas, *sustainable finance*, dan pertumbuhan inklusif, juga terus dilanjutkan. Sejumlah inisiatif telah digulirkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari krisis yang disebabkan pandemi COVID-19. IMF memiliki inisiatif untuk mengurangi utang negara miskin, dan menambah cadangan devisa global dengan memberikan alokasi *Special Drawing Rights* (SDR) kepada negara anggota. Forum G20 juga terus berkomitmen melakukan kerja sama internasional melalui prinsip-prinsip yang mengacu pada *G20 Action Plan* untuk pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Sebagai Presidensi G20 pada 2022, Indonesia akan menjalankan peran strategis. Melalui tema "*Recover Together, Recover Stronger*" Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Sebagai Presidensi G20, Indonesia tidak hanya berperan penting dalam mendukung perekonomian global keluar dari krisis akibat pandemi dan tumbuh secara lebih berkesinambungan, namun juga memberi manfaat nyata bagi pemulihan ekonomi nasional.

11.1.1. Kerja Sama untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi

Penyebaran kasus infeksi COVID-19 yang berdampak luas terhadap perekonomian global mendorong kerja sama internasional berupaya mencari solusi untuk mengatasinya dan mendukung pemulihan ekonomi. Diskusi pada forum kerja sama internasional diarahkan pada upaya mengatasi berbagai masalah pada perekonomian global, dan merumuskan respons kebijakan yang tepat. Forum Bank for International Settlements (BIS), selain membahas perkembangan ekonomi global terkini, juga menyoroti berbagai isu yang berkembang dan merumuskan respons kebijakan mengatasi dampak pandemi.¹ Isu yang mengemuka dalam pembahasan antara lain dampak pandemi terhadap konsumsi rumah tangga, prospek jangka pendek ekonomi global di tengah pandemi dan ketidakpastian, evaluasi interaksi kebijakan moneter dan fiskal, serta *spillover* dari pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter oleh negara maju, forum BIS membahas elemen kunci untuk menyelesaikan kebijakan normalisasi. Elemen kunci yang didiskusikan adalah: (a) pencapaian tujuan makroekonomi yang konsisten dengan mandat bank sentral; dan (b) perlunya bank sentral membangun kembali ruang yang cukup untuk bermanuver dalam mengantisipasi pelemahan ekonomi pada masa depan atau kejadian tak terduga. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah divergensi pemulihan ekonomi antarnegara menyebabkan waktu dan kecepatan normalisasi kebijakan setiap negara yang juga berbeda.

Gubernur Bank Sentral anggota BIS mendiskusikan kemungkinan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Dalam pembahasan “COVID and Beyond” dikemukakan bahwa resesi global yang sangat dalam akibat pandemi diperkirakan berakhir lebih cepat ditopang oleh

dukungan kebijakan akomodatif. Stimulus fiskal yang besar dan penarikan akumulasi tabungan rumah tangga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan disertai peningkatan inflasi. Namun demikian, penyebaran virus yang tidak terkendali berpotensi menghambat pemulihan ekonomi. Dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi global yang tidak merata dapat menimbulkan tantangan kebijakan bagi negara berkembang. Oleh sebab itu, otoritas perlu meletakkan fundamental ekonomi yang kuat sebagai prasyarat melakukan normalisasi kebijakan, serta mengelola potensi risiko *spillover*.

Perbedaan besaran stimulus kebijakan dan vaksinasi menyebabkan divergensi pemulihan ekonomi antarnegara yang berimplikasi pada perbedaan respons kebijakan. Isu tersebut dibahas pada Forum Executives' Meeting of Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) pada Agustus 2021. Sejumlah tantangan juga mewarnai pergerakan ekonomi dunia antara lain tekanan inflasi di kawasan sebagai dampak dari kebijakan mengatasi pandemi, bagaimana mengomunikasikan kebijakan untuk mengatasi pandemi, dan *exit strategy*. Komunikasi merupakan bagian dari *policy tools* yang berperan penting dalam mendukung bauran kebijakan, terutama untuk mengelola ekspektasi, mengurangi ketidakpastian, dan menjaga kredibilitas. Dari sisi perbankan, sejauh ini kinerja sektor perbankan negara EMEAP pada era pandemi masih resilien, namun cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit.² Kondisi ekonomi yang belum pulih dan antisipasi akan semakin terbatasnya dukungan kebijakan melatarbelakangi kehati-hatian perbankan tersebut.

ASEAN juga berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kawasan. Komitmen tersebut dilakukan melalui dukungan

¹ Berbagai topik tersebut didiskusikan pada BIS Bimonthly Meeting selama 2021.

² Didiskusikan pada pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Head of Supervisory Juli 2021.

digitalisasi dan pendekatan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam Pertemuan Tahunan ke-7 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 30 Maret 2021. Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN 2021 mengusung tema “*We Care, We Prepare, We Prosper*”, dengan tiga strategi utamaya yaitu “*Recovery, Digitalisation, and Sustainability*”. Berdasarkan strategi utama tersebut, Brunei Darussalam menetapkan prioritas jalur keuangan ASEAN sebagai berikut:

1. *Recovery* melalui penandatanganan 9th ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Protocol on Financial Services,
2. *Digitalisation* melalui penyelenggaraan ASEAN Financial Literacy Conferences,
3. *Sustainability* melalui penyusunan ASEAN Taxonomy on Sustainable finance.

Kebijakan yang tepat dan segera merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatasi dampak pandemi. Agenda Kebijakan (*Global Policy Agenda/GPA*) Pertemuan Tahunan IMF-World Bank (IMF-WB) *Annual Meetings 2021* menekankan urgensi kebijakan untuk mengatasi dan membatasi dampak pandemi (*scarring effect*), serta mendukung transformasi ekonomi global. Urgensi dari respons kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh divergensi antar perekonomian akibat perbedaan akses terhadap vaksin dan ruang kebijakan. Selain itu, aspek lain yang dinilai kritis adalah bagaimana upaya untuk menjawab tantangan perekonomian jangka panjang yang disebabkan oleh isu perubahan iklim dan reformasi digital.

GPA 2021 mengangkat tema ‘Vaccinate, Calibrate, Accelerate’ sebagai prioritas kebijakan. Melalui tema **Vaccinate**, IMF mendorong kerja sama global untuk mempercepat vaksinasi yang sangat penting untuk menghentikan penyebaran pandemi, serta mengurangi divergensi ekonomi dan kesehatan. Dengan tema **Calibrate**, IMF menekankan bahwa kebijakan harus disesuaikan dengan perkembangan pandemi, ketersediaan *policy space* untuk mendukung pemulihan, dan upaya membatasi *scarring effect*. Bauran kebijakan pada level domestik perlu mempertimbangkan perkembangan pandemi dan ekonomi masing-masing negara, dengan tetap menjaga kredibilitas kerangka kebijakan fiskal dan

moneter, serta melakukan komunikasi kebijakan yang transparan. Dengan tema **Accelerate**, IMF mendukung transformasi ekonomi global untuk mencapai pemulihan yang inklusif, lebih hijau, dan berbasis digital.

Untuk mengatasi dampak krisis, IMF memiliki inisiatif untuk membantu negara-negara miskin yang terilit utang melalui program pengurangan utang. Dukungan IMF diberikan melalui *concessional loans* dan program pengurangan utang pada negara anggota yang miskin. Pemberian *concessional loans* untuk negara berpendapatan rendah (*Low Income Countries/LICs*) oleh IMF dilakukan melalui *Poverty Reduction Growth Trust* (PRGT).³ Sementara itu, pemberian pengurangan utang dilakukan melalui dua inisiatif yaitu *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) dan *Catastrophe Containment and Relief Trust* (CCRT).⁴

IMF juga menempuh kebijakan untuk menambah alokasi *Special Drawing Right* (SDR) untuk meningkatkan likuiditas global dalam upaya mengatasi dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Penambahan alokasi SDR adalah USD650 miliar atau sekitar SDR456 miliar pada Agustus 2021. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang, memperbaiki kepercayaan pelaku ekonomi, serta mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Alokasi SDR terbesar sepanjang historis ini didistribusikan kepada seluruh negara anggota secara proporsional sesuai kuota masing-masing negara. Atas alokasi tersebut, Indonesia menerima tambahan SDR sebesar SDR4,46 miliar atau setara dengan USD6,31 miliar yang digunakan untuk menambah cadangan devisa negara.

3 PRGT bertujuan membantu negara miskin mencapai dan mempertahankan posisi makroekonomi yang stabil dan berkelanjutan sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan.

4 HIPC ditujukan sebagai pengurangan utang negara miskin yang terilit utang sehingga dapat mencapai posisi utang luar negeri yang *sustainable*. Program CCRT memiliki dua cakupan, yakni: (1) *Catastrophe Containment* untuk membantu penanganan bencana di area kesehatan, dan (2) *Post-Catastrophe Relief* untuk membantu penanganan bencana alam yang besar. Terdapat 29 negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan fasilitas CCRT dan sebagian besar adalah negara di kawasan Sub Sahara Afrika.

Alokasi SDR oleh IMF memberi tambahan cadangan devisa bagi negara anggota, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang domestik atau eksternal yang lebih mahal.⁵ IMF mendorong penyaluran SDR secara sukarela dari negara yang memiliki cadangan devisa dalam jumlah yang besar, untuk disalurkan kepada negara rentan dan miskin yang memerlukan.

Forum kerja sama G20 terus berkomitmen melakukan kerja sama internasional melalui prinsip-prinsip yang mengacu pada *G20 Action Plan* dengan tujuan pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam forum Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, turut serta mengesahkan *G20 Action Plan* dan berkomitmen mendukung proses pemulihan.⁶ Sesuai dengan perkembangan pandemi dan perekonomian global, *G20 Action Plan* diperbaharui di bawah Presidensi G20 Italia pada April 2021. Pembaharuan menyertakan serangkaian komitmen untuk terus mendukung respons kebijakan G20 terhadap pandemi dan mengarahkan koordinasi ekonomi internasional menuju pemulihan, serta mempersiapkan dunia pascapandemi COVID-19. Perkembangan dari *G20 Action Plan* di bawah Presidensi G20 Italia adalah sebagai berikut:

1. Pilar 1: *Health as a Global Common*. Anggota G20 terus mendukung upaya kolektif untuk memastikan bahwa respons kesehatan terhadap COVID-19 dan variannya akan efektif, cepat, dan adil. Per 30 September 2021, G20 telah berkomitmen sebesar USD14,5 miliar untuk *Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A) dan berjanji untuk membagikan 1,2 miliar dosis vaksin melalui ACT-A. Selain itu, FMCBG G20 mengapresiasi pembentukan *Multilateral Leaders Task Force* (MLT) tentang Vaksin, Terapi, dan Diagnostik COVID-19

untuk negara berkembang. Selain itu, G20 juga fokus pada perspektif jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan ketahanan sektor kesehatan terhadap guncangan di masa depan. Hal ini ditegaskan melalui "Deklarasi Roma" yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, 21 Mei 2021.

2. Pilar 2: *Supporting and Shaping the Recovery*.

G20 memantau perkembangan krisis dengan memperhatikan ruang fiskal, stabilitas harga dan keuangan, produktivitas dan ketenagakerjaan, serta potensi digitalisasi. Dari sisi perpajakan, G20 telah mencapai kesepakatan bersejarah tentang agenda reformasi perpajakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi digital. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui penerapan dua pilar perpajakan, yaitu realokasi keuntungan perusahaan multinasional untuk negara pasar (*market countries*), dan penerapan tingkat pajak minimum untuk menghindari perang tarif pajak (*race to the bottom*). Kesepakatan ini diharapkan dapat membentuk sistem perpajakan internasional yang lebih stabil dan adil.

3. Pilar 3: *Supporting Vulnerable Economies*.

G20 menyambut baik dukungan terhadap negara-negara yang mengalami kerentanan ekonomi akibat pandemi. G20 sepakat menyalurkan *Special Drawing Rights* secara sukarela oleh negara-negara yang memiliki posisi eksternal kuat untuk membantu negara-negara yang rentan. Opsi penyaluran yang dipersiapkan yaitu: (a) peningkatan kapasitas *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) guna pendanaan bagi negara-negara miskin, (b) pembentukan fasilitas pendanaan baru berupa *Resilience and Sustainability Trust* (RST) untuk membantu negara yang menghadapi risiko stabilitas *balance of payments* dan kebutuhan pembiayaan agenda reformasi ekonomi (a.l. penguatan sistem kesehatan, pembiayaan transisi perubahan iklim, dan mengatasi dampak dari digitalisasi), dan (c) penyaluran melalui *Multilateral Development Banks* (MDBs) guna mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). G20 juga telah menyepakati perpanjangan *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI) untuk

⁵ SDR merupakan cadangan devisa internasional (*international reserve assets*) yang diciptakan IMF sejak 1969 dan berfungsi sebagai tambahan cadangan devisa negara anggota.

⁶ *G20 Action Plan*, pertama kali disahkan pada April 2020 oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, menetapkan prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan bagi komitmen G20 terhadap langkah spesifik untuk mendorong kerja sama ekonomi internasional dalam penanganan krisis dengan tujuan pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

negara-negara termiskin hingga 31 Desember 2021, yang juga telah disepakati *Paris Club*, serta melaksanakan perbaikan pengelolaan utang luar negeri melalui implementasi *Common Framework to Support Debt Sustainability*. Selain itu, G20 berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program kerja dengan memperkuat elemen struktural lain dalam arsitektur keuangan internasional.

4. Pilar 4: Protecting The Planet. Selama 2021, pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) dan ekonomi hijau telah menjadi topik utama diskusi pada jalur keuangan G20 (*finance track*). Pada awal Presidensi G20 Italia, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 sepakat mengaktifkan kembali Kelompok Studi Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Study Group / SFSG*). Kemudian, pada April 2021 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 sepakat untuk meningkatkan SFSG menjadi salah satu Kelompok Kerja (*working group*) pada *finance track* G20, yaitu Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Working Group / SFWG*). Sepanjang 2021, SFWG telah menghasilkan dua produk utama, yaitu *G20 Sustainable Finance Roadmap* dan *Synthesis Report*. Sementara itu, dari aspek stabilitas sistem keuangan, FSB telah menyusun *FSB Roadmap for Addressing Climate-related Financial Risks* untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap stabilitas sektor keuangan.

Diskusi tentang perkembangan ekonomi terkini juga dilakukan dalam kerangka kerja sama bilateral. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk membangun dan menjaga hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, serta memperjuangkan kepentingan BI dan/atau perekonomian Indonesia. Selama 2021, telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan bank sentral mitra, antara lain dengan Central Bank Sri Lanka (CBSL), Swiss National Bank, Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Saudi Central Bank (SAMA). Topik utama dialog adalah pertukaran pandangan mengenai perkembangan perekonomian terkini, serta peninjauan dan penguatan kerja sama bilateral antara bank sentral. Pada kesempatan tersebut,

Bank Indonesia menyampaikan strategi bauran kebijakan, serta koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yang aktif dilakukan dalam penanganan dampak COVID-19 di Indonesia.

Pemulihan ekonomi global yang berlanjut pascapelonggaran restriksi mobilitas dan sejumlah kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi krisis membentuk persepsi positif lembaga rating, pelaku pasar, maupun organisasi internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang dapat mempertahankan *Sovereign Credit Rating (SCR)* di tengah penurunan SCR yang terjadi di sejumlah negara. Hal ini mencerminkan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap kredibilitas kebijakan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi (Boks: *Sovereign Credit Rating Indonesia Terjaga di Tengah Divergensi Pemulihan Ekonomi*). Lembaga pemeringkat secara khusus menaruh perhatian terhadap perkembangan vaksinasi, kemajuan pemulihan ekonomi, serta kredibilitas kebijakan yang ditempuh oleh otoritas. Kondisi tersebut memperkuat urgensi upaya pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia melalui koordinasi intensif antar otoritas untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

IMF juga menilai positif sinergi kebijakan di Indonesia dalam menghadapi pandemi. Pandangan tersebut dituangkan dalam laporan *IMF Article IV Consultation 2020*.⁷ Sinergi mencakup kebijakan pengendalian pandemi di sektor kesehatan, kebijakan stimulus fiskal, kebijakan moneter akomodatif, pelonggaran kebijakan makro dan mikroprudensial, serta kebijakan *burden sharing* Bank Indonesia dengan Pemerintah. Apresiasi dan catatan positif diberikan IMF terhadap sejumlah kebijakan makroekonomi Indonesia. Pertama, komitmen otoritas untuk secara bertahap mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3% dari PDB pada 2023. Kedua, penerapan kebijakan moneter akomodatif dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi, melalui kebijakan suku bunga rendah dan pembelian SBN oleh BI dalam kondisi *extraordinary* saat ini. Ketiga, kelanjutan upaya reformasi struktural dengan penerapan UU Cipta Kerja dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi. IMF menilai Indonesia telah

⁷ Dipublikasikan pada Maret 2021.

menangani pandemi dengan respons sinergi kebijakan yang jelas, komprehensif, dan terkoordinasi. Selain itu, ketahanan ekonomi Indonesia yang terjaga dinilai sebagai cerminan kebijakan makroekonomi yang baik sejak sebelum pandemi.

OECD menilai positif respons kebijakan Indonesia pada 2020 untuk mengatasi dampak dari krisis COVID-19. Hal tersebut diungkapkan dalam publikasi 'OECD Economic Surveys: Indonesia 2021' pada Maret 2021.⁸ Dalam laporan tersebut, OECD menyoroti perkembangan dan respons kebijakan moneter dan fiskal selama 2020 terutama dalam merespons krisis COVID-19, efektivitas intervensi pemerintah dalam penanganan COVID-19, perkembangan inklusi keuangan, serta reformasi pasca-COVID-19. OECD menilai pemulihan ekonomi Indonesia akan terjadi secara bertahap, dengan penanganan pada sektor kesehatan menjadi faktor yang utama. Indonesia memiliki sumber daya alam dan tingkat populasi muda

⁸ Laporan OECD *Economic Surveys* dilaksanakan dua tahun sekali dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan ekonomi Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi di Indonesia.

yang cukup sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, upaya mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan reformasi di bidang ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja), penciptaan lapangan kerja, serta program peningkatan keterampilan menjadi rekomendasi utama dalam laporan tersebut.

Pandangan yang positif juga diperoleh dari The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).

Dalam *Consultation Report 2020*, AMRO menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh dan *resilient* meski dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Kalibrasi bauran kebijakan dan stimulus telah memberi dukungan yang tepat waktu bagi sektor rumah tangga, bisnis, dan sektor keuangan terdampak, serta mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Sinergi kebijakan antar otoritas serta ketersediaan vaksin secara luas, diharapkan dapat mendukung *rebound* pertumbuhan ekonomi pada 2021. AMRO menggarisbawahi urgensi agar otoritas mempersiapkan *exit* dari paket kebijakan yang dilakukan saat ini untuk menghindari *cliff effect* dan memfasilitasi pemulihan ekonomi pascapandemi.

Sovereign Credit Rating Indonesia Terjaga di Tengah Divergensi Pemulihan Ekonomi

Memasuki 2021, indikasi pemulihan ekonomi mulai terlihat di negara maju dan negara berkembang meski dengan kecepatan yang berbeda.

Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh vaksinasi dan dukungan kebijakan yang berperan penting dalam mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Sejalan dengan perkembangan positif tersebut, dari sisi pergerakan SCR, *positive rating action* tiga lembaga pemeringkat utama (S&P, Moody's, dan Fitch) menunjukkan tren meningkat pada paruh kedua 2021. Peningkatan tersebut didukung oleh ekspektasi lembaga pemeringkat terhadap perbaikan fiskal serta keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah, yang didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural. Ke depan, pergerakan SCR akan dipengaruhi oleh kecepatan pemulihan ekonomi dan kredibilitas kebijakan, di tengah masih tingginya ketidakpastian dan tantangan ekonomi global.

Di tengah upaya mendorong pemulihan ekonomi, Indonesia memperoleh afirmasi (penguatan) SCR dari sejumlah lembaga pemeringkat pada 2021. SCR Indonesia dipertahankan pada kelompok *Investment Grade* dengan peringkat dan *outlook* yang sama seperti hasil *review* pada 2020. Fitch (22 November 2021) dan S&P (22 April 2021) mempertahankan SCR Indonesia masing-masing pada level BBB/*outlook* stabil dan BBB/*outlook* negatif. Sedangkan, lembaga pemeringkat Jepang yaitu R&I (22 April 2021) dan JCR (22 Desember 2020) mempertahankan SCR Indonesia pada level BBB+/*outlook* stabil. Sementara, Moody's pada 2021 tidak melakukan *rating action*, sehingga SCR Indonesia tetap berada pada level Baa2/*outlook* stabil.

Keputusan sejumlah lembaga pemeringkat untuk mempertahankan SCR Indonesia mencerminkan keyakinan terhadap *creditworthiness* dan fundamental ekonomi. Secara umum, keyakinan atas prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih kuat serta beban utang pemerintah yang terjaga menjadi dasar bagi afirmasi SCR Indonesia. Faktor yang juga menjadi pertimbangan antara lain rekam jejak kebijakan yang berhati-hati (Fitch dan S&P), resiliensi ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal yang didukung oleh kebijakan nilai tukar yang fleksibel, kredibilitas kebijakan moneter, akumulasi cadangan devisa (JCR dan R&I), serta ukuran ekonomi Indonesia yang besar (Moody's).

Penguatan SCR Indonesia merupakan bentuk pengakuan atas komitmen otoritas dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, melanjutkan reformasi struktural, dan mempertahankan kredibilitas kebijakan. Pencapaian ini perlu terus dipertahankan melalui penguatan sinergi antar otoritas guna mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Keberlanjutan implementasi reformasi fiskal dan struktural juga perlu dikawal karena menjadi aspek yang diperhatikan lembaga pemeringkat dalam menilai kredibilitas kebijakan otoritas untuk mendukung prospek ekonomi dalam jangka menengah.

Pemulihan ekonomi masih dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi. Indonesia perlu mewaspadai kemungkinan *negative rating action* atas SCR. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari

negative rating action Filipina yang mengalami revisi *outlook* menjadi negatif dengan SCR tetap pada level BBB (12 Juli 2021). Keputusan Fitch merevisi *outlook* Filipina mencerminkan peningkatan risiko kredit sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan implikasi dari kebijakan yang ditempuh, serta pelemahan pada area ekonomi dan fiskal Filipina.

Lembaga pemeringkat memandang prospek *Sovereign Credit Rating* Indonesia akan dipengaruhi oleh perkembangan pemulihan ekonomi serta kredibilitas kebijakan otoritas, termasuk komitmen konsolidasi fiskal. Secara umum, lembaga pemeringkat memiliki keyakinan terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia yang dinilai relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Lembaga pemeringkat juga

mengapresiasi langkah serta sinergi kebijakan yang ditempuh untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain itu, kinerja fiskal dan upaya perbaikan penerimaan pemerintah melalui implementasi reformasi perpajakan, kredibilitas kebijakan fiskal, dan komitmen konsolidasi fiskal menuju target defisit fiskal kembali ke 3% PDB pada 2023 juga menjadi perhatian. Indonesia perlu mewaspadai risiko pelemahan ekonomi Tiongkok, Fed *tapering*, serta isu domestik lain. Berbagai tantangan tersebut memperkuat pentingnya pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia melalui koordinasi kebijakan yang intensif antar otoritas. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga kredibilitas kebijakan.

II.1.2. Kerja Sama untuk Memperkuat Resiliensi Sektor Keuangan

Fora kerja sama internasional menekankan pentingnya komitmen internasional untuk memperkuat resiliensi sektor keuangan. Bank Indonesia—yang mewakili Indonesia bersama Kementerian Keuangan—pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pemulihan ekonomi. Pada Oktober 2021, Financial Stability Board (FSB)⁹ melaporkan sejumlah pelajaran yang dapat diperoleh dari pandemi COVID-19 terutama dari perspektif stabilitas sistem keuangan. Tiga pelajaran dan aksi penting yang dapat dipetik dari laporan tersebut adalah:¹⁰

- a. **Ketahanan pasar dan kelembagaan.** Secara umum, sektor keuangan menunjukkan resiliensi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19, yang merupakan hasil positif dari implementasi agenda reformasi sektor keuangan selama ini. Namun demikian, fungsi permodalan bank dan penyangga likuiditas selama pandemi memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya ketika dukungan kebijakan akan ditarik secara bertahap. Sementara itu, gejolak pasar pada Maret 2020 (awal pandemi) menunjukkan perlunya memperkuat ketahanan lembaga keuangan nonbank (LKNB). Terkait hal ini, FSB sedang menjalankan program kerja yang komprehensif untuk mengases kondisi LKNB dan mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk memperkuat resiliensi LKNB.
- b. **Ketahanan operasional.** COVID-19 menunjukkan pentingnya manajemen risiko operasional yang efektif sebelum terjadi *shock*. FSB akan mengembangkan praktik yang baik (*best practices*) mengenai penyediaan jenis informasi yang diperlukan otoritas, termasuk informasi terkait insiden siber, untuk menjaga stabilitas sistem

keuangan. FSB juga melakukan asesmen mengenai manajemen risiko pemanfaatan pihak ketiga dan *outsourcing*, serta akan mengembangkan panduan pengawasan lembaga keuangan pada penyedia layanan penting/kritikal.

- c. **Kesiapsiagaan krisis.** Pandemi menunjukkan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan pembagian risiko antarnegara yang efektif. FSB akan mengidentifikasi serangkaian praktik yang baik untuk meningkatkan kesiapsiagaan, dan memfasilitasi pengelolaan dan penyelesaian krisis keuangan antarnegara yang dapat memengaruhi *Global Systemically Important Banks* (G-SIB).

G20 menyambut baik laporan kemajuan FSB tentang transisi LIBOR yang diharapkan dapat mengurangi kerentanan dari penggunaan LIBOR.¹¹ Selain itu, G20 juga mendukung laporan akhir FSB tentang usulan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan *Money Market Fund* (MMF).¹² G20 akan menilai dan mengatasi kerentanan MMF, mengenali kebutuhan untuk menyesuaikan tindakan, serta mempertimbangkan aspek lintas batas/antarnegara. FSB akan bekerja sama dengan International Organization of Securities Commissions (IOSCO), untuk mengintegrasikan kemajuan yang dicapai oleh anggota dalam mengadopsi reformasi untuk meningkatkan ketahanan MMF hingga akhir 2023, langkah tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan penilaian efektivitas langkah-langkah yang diadopsi oleh yurisdiksi dalam menangani risiko stabilitas keuangan hingga akhir 2026.

Sejalan dengan potensi risiko pembalikan arus modal dari *exit policy* negara maju, upaya memperkuat Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) terus dilakukan sebagai *second line of defense*. ASEAN+3 telah meningkatkan porsi fasilitas Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) yang dapat ditarik tanpa didahului dengan aktivasi fasilitas IMF (CMIM IMF *De-Linked Portion*) dari 30% menjadi 40%, dan memberi fleksibilitas dalam pemanfaatan kerja sama CMIM dengan mata uang lokal yang dilakukan dengan prinsip *voluntary* dan *demand driven*.

Dalam lingkup kerja sama bilateral, BI kembali memperpanjang kerja sama keuangan internasional

9 Financial Stability Board (FSB) adalah organisasi internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global. FSB didirikan oleh G20 pada April 2009 dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi kebijakan sektor keuangan kepada anggota G20. Keanggotaan terdiri dari 24 negara yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, bank sentral dan/atau otoritas pengawas serta dan organisasi internasional lain, antara lain IMF, World Bank, dan Bank for International Settlements.

10 *Lessons learnt from the COVID-19 pandemic from a financial stability perspective: Final report*. Retrieved from: *Lessons learnt from the COVID-19 pandemic from a financial stability perspective: Final report - Financial Stability Board* (fsb.org)

11 Dalam *FMCBG Communique* Juli 2021, dan *Progress report to the G20 on LIBOR transition issues* Juli 2021.

12 Dalam *FMCBG Communique* Oktober 2021.

berupa **Bilateral Swap Arrangement (BSA)** dengan Jepang pada 14 Oktober 2021 serta kerja sama **Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA)** dan **Bilateral Repo Line (BRL)** dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) pada 5 November 2021. BSA Indonesia-Jepang merupakan perjanjian bilateral pertukaran mata uang antara BI dengan Bank of Japan—sebagai agen dari Kementerian Keuangan—dalam bentuk *swap* antara rupiah dengan dolar AS dan/atau yen Jepang sampai dengan USD22,76 miliar atau nilai yang setara dalam yen Jepang. Sementara LCBSA BI-MAS memungkinkan dilakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai SGD9,5 miliar atau IDR100 triliun (ekuivalen sekitar USD7 miliar). Sedangkan BRL BI-MAS memungkinkan dilakukan transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapat likuiditas dalam dolar AS senilai USD3 miliar dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh negara-negara G3 (Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman) yang dimiliki oleh kedua bank sentral.

Perpanjangan kerja sama internasional juga diiringi dengan kerja sama Local Currency Settlement (LCS). Kerja sama LCS ditujukan untuk mendorong penyelesaian transaksi bilateral dalam mata uang masing-masing negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik. LCS memberikan alternatif penyelesaian transaksi dagang, investasi, dan *income transfer* (remitansi) dalam mata uang lokal. Implementasi LCS juga merupakan salah satu upaya BI dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor ekspor, impor dan investasi. Penggunaan LCS memberi manfaat langsung kepada pelaku usaha, antara lain: (i) biaya konversi transaksi dalam valuta asing lebih efisien melalui *direct quotation*, (ii) tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal, (iii) tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal, dan (iv) diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri.

BI telah memiliki kerja sama **Local Currency Settlement (LCS)** berbasis **Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)** dengan sejumlah otoritas negara mitra dagang utama, yaitu dengan Thailand, Malaysia,

Jepang, dan Tiongkok. Pada 2021, BI berupaya melanjutkan penguatan implementasi kerja sama LCS dengan Malaysia dan Jepang, serta memulai implementasi kerja sama LCS Indonesia dengan Tiongkok. Dalam rangka penguatan implementasi LCS dengan negara mitra, selama 2021 telah disepakati penguatan kerja sama, yaitu:

1. **LCS Bank Indonesia dengan Bank Negara Malaysia (BNM).** BI dan BNM menyepakati penguatan kerangka penyelesaian transaksi LCS menggunakan Rupiah-Ringgit yang telah diimplementasikan sejak 2 Januari 2018. Kerja sama LCS yang semula hanya untuk transaksi perdagangan, kini diperluas mencakup *underlying* transaksi LCS dengan menambahkan investasi langsung dan *income transfer* (termasuk remitansi). Selain itu, penguatan kerja sama LCS antara BI dan BNM juga meliputi pelonggaran aturan transaksi valas a.l. perluasan instrumen lindung nilai, peningkatan *threshold* nilai transaksi tanpa dokumen *underlying* sampai dengan USD200.000 per transaksi, dan penambahan bank yang ditunjuk sebagai bank ACCD di masing-masing negara. Penguatan kerangka LCS dalam Rupiah-Ringgit mulai berlaku efektif sejak 2 Agustus 2021.
2. **LCS ACCD Indonesia dan Jepang.** Pada 5 Agustus 2021, BI-JMOF telah menyepakati penguatan kerangka kerja sama LCS antara kedua negara yang diimplementasikan sejak 31 Agustus 2020. Penguatan dilakukan dengan memberikan pelonggaran aturan transaksi valas dalam kerangka penyelesaian transaksi bilateral kedua negara dengan rupiah-yen, antara lain mencakup perluasan instrumen *hedging* (lindung nilai), pelaksanaan lindung nilai atas dasar proyeksi perdagangan dan investasi, peningkatan fleksibilitas transfer atas rekening IDR di Jepang, dan peningkatan *threshold* nilai transaksi tanpa dokumen *underlying* sampai dengan USD500.000 per transaksi. Penguatan kerangka kerja sama yang berlaku efektif 5 Agustus 2021.
3. **LCS ACCD BI dan People's Bank of China (PBC).** BI dan PBC secara resmi memulai implementasi

kerangka kerja sama LCS ACCD antara Indonesia dan Tiongkok pada 6 September 2021.

Kerangka kerja sama ini disusun berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah disepakati BI dan PBC pada 30 September 2020. Kerangka kerja sama dimaksud antara lain meliputi penggunaan kuota nilai tukar secara langsung (*direct quotation*) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara rupiah dan yuan. Dalam mendukung operasionalisasinya, BI dan PBC menunjuk beberapa bank di negara masing-masing sebagai bank ACCD untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan.

Kerjasama LCS antara Indonesia dan Tiongkok memiliki potensi pemanfaatan yang besar seiring hubungan perdagangan dan investasi yang tinggi antara kedua negara. Dari sisi perdagangan, data rerata tahun 2016 s.d 2021 (Agustus) menunjukkan pangsa ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai $\pm 16\%$, sedangkan pangsa impor Indonesia dari Tiongkok di atas 24%. Dari sisi investasi, data *Coordinated Direct Investment Survey* (CDIS) IMF tahun 2019 menunjukkan Tiongkok merupakan investor *Foreign Direct Investment* (FDI) terbesar ke-8 bagi Indonesia, sementara Indonesia merupakan negara tujuan FDI terbesar ke-12 bagi Tiongkok.

II.1.3. Kerja Sama Sistem Pembayaran dan Inovasi Digital

Peran sistem pembayaran yang sangat penting dalam perekonomian global menjadi perhatian berbagai fora kerja sama internasional. Sejak ditetapkan pada Presidensi Saudi Arabia tahun 2020, G20 terus mendorong implementasi *G20 Roadmap to Enhance Cross Border Payments* untuk mewujudkan pembayaran lintas batas negara yang cepat dan murah, sekaligus lebih transparan dan inklusif. G20

telah menyetujui *G20 Roadmap to Enhance Cross Border Payments* pada 2020. Kerja sama tersebut terdiri dari lima fokus area dan sembilan belas *building block* (BB) yang saling terkait. Penyusunan *roadmap* ditujukan untuk mengatasi friksi atau hambatan nyata pada pembayaran lintas batas negara, yang meliputi komitmen dan visi bersama antara sektor publik dan swasta untuk memperbaiki pembayaran lintas batas (Fokus Area 1), koordinasi pengaturan dan pengawasan (Fokus Area 2), perbaikan infrastruktur dan pengaturan/pengelolaan sistem pembayaran untuk mendukung kebutuhan pembayaran lintas batas negara (Fokus Area 3), peningkatan kualitas data dan pemrosesan untuk mengatasi fragmentasi (Fokus Area 4), dan eksplorasi atas potensi dari bentuk-bentuk sistem pembayaran baru (Fokus Area 5).

Pada 2021, pekerjaan terkait G20 Cross Border Payments Roadmap telah berhasil menyelesaikan fondasi awal guna implementasi yang kuat menuju target penyelesaian pada 2027. Pekerjaan yang dikoordinasikan oleh FSB dan CPMI tersebut antara lain mencakup inventarisasi dan analisis sistem pembayaran dan pengaturan yang berlaku, serta perkembangan di berbagai yurisdiksi terkait pembayaran lintas negara. Inventarisasi yang dilakukan mencakup area standar dan panduan internasional, kerangka data nasional dan regional, jam operasional, akses, elemen umum dari perjanjian/skema tingkat layanan, mekanisme pembayaran, keterkaitan antar sistem pembayaran, dan eksplorasi desain sistem pembayaran di masa mendatang. *Roadmap* ini merepresentasikan berbagai isu operasional yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pembayaran lintas batas negara, seperti isu penyediaan likuiditas dan adopsi standar ISO 20022. Di sisi lain, *roadmap* juga berusaha menjawab arah kebutuhan dan tren ke depan melalui

eksplorasi area yang bersinggungan dengan CBDC dan *stablecoins*.

Dalam rangka memastikan efektivitas dan ketepatan waktu implementasi *roadmap*, FSB menetapkan serangkaian target capaian untuk enam tahun ke depan. Penetapan target global tersebut dilandasi prinsip bahwa target yang disusun harus terkait langsung dengan tantangan yang ada, mampu mencerminkan perkembangan yang telah dicapai, cukup ambisius, dapat dikomunikasikan dengan baik, dan relevan terhadap pemangku kepentingan yang luas. Dalam pelaksanaannya nanti, implementasi atas target global tersebut akan dilakukan untuk seluruh segmen pasar yaitu *wholesale*, ritel, dan remitansi, serta mengacu pada tiga panduan utama yaitu (1) bagaimana target dapat diukur dan sumber data yang diperlukan, (2) bagaimana cara untuk memantau pencapaian target tersebut, dan (3) frekuensi dari pengumpulan data dan publikasi perkembangan.

Presidensi G20 Indonesia pada 2022 akan mendorong konektivitas sistem pembayaran dan pertukaran data pembayaran lintas negara. Kesuksesan *roadmap* ini tentu tidak hanya bergantung pada hasil analisis yang dilakukan, namun bagaimana G20 kemudian mampu mengadopsi proposal yang spesifik dan praktikal. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia akan membangun momentum dan menempatkan prioritas pada upaya bersama untuk mencapai keterhubungan antar sistem pembayaran (*BB13 – Pursue Interlinking of Payment Systems*) dan mengurangi hambatan pertukaran data antarnegara melalui harmonisasi protokol API (*BB15 – Harmonise API for Data Exchange*). Pemilihan fokus pada BB13 dan BB15 dilakukan sejalan dengan arah Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dalam mendorong pengembangan ekonomi keuangan digital, terutama dalam mendukung (i) industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, (ii) integrasi, interkoneksi, interoperabilitas (3I), keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran, dan (iii) kebijakan harga untuk efisiensi.

Presidensi G20 Indonesia pada 2022 juga akan mendorong kelanjutan diskusi global terkait CBDC.

Pada 2021, G20 telah menerima laporan bersama CPMI-BIS/IMF-WB terkait peran CBDC dalam pembayaran lintas batas negara. Dalam laporan tersebut digarisbawahi bahwa CBDC berpotensi untuk mewujudkan pembayaran lintas batas negara yang lebih cepat, terjangkau, dan inklusif. Namun untuk mewujudkan potensi tersebut, masih diperlukan berbagai upaya baik di tataran domestik maupun internasional, khususnya untuk mempelajari peluang sekaligus risiko yang ditimbulkan dari penggunaan CBDC. Oleh karena itu, sebagai bagian dari area pekerjaan BB19 (*Factor an International Dimension into CBDC Designs*) di tahun 2022, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kolaborasi dalam rangka mewujudkan interoperabilitas CBDC, serta membangun pemahaman bersama yang lebih kuat atas implikasi makro-finansial dari CBDC.

Selanjutnya, sebagai upaya memperkuat kerja sama internasional di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia secara aktif melakukan perluasan kerja sama dengan bank sentral atau otoritas mitra. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU) dalam bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital (SP-IKD), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), serta kerja sama dalam kerangka *structured bilateral cooperation* (SBC). Sebagai bentuk implementasi kerja sama, Bank Indonesia telah menjalin kesepakatan di bidang APU-PPT dengan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) yang berlaku sejak Juni 2021. Nota kesepahaman tersebut mencakup pertukaran informasi terkait pengawasan, kerangka kebijakan, dan metodologi APU-PPT.

BI juga melakukan perluasan kerja sama pada bidang SP-IKD dan APU-PPT dengan Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE) yang berlaku sejak November 2021. Secara umum, kerja sama BI-CBUAE mencakup tiga bidang utamanya yakni inovasi digital dalam bidang layanan keuangan dan pembayaran, sistem pembayaran lintas batas termasuk sistem pembayaran ritel, serta kerangka kebijakan APU-PPT. Kesepakatan dengan BDCB dan CBUAE tersebut merupakan salah

satu capaian dalam perluasan kerja sama bilateral Bank Indonesia, khususnya pada bidang APU-PPT. Capaian kerja sama tersebut sekaligus merupakan kontribusi BI dalam mendukung upaya keanggotaan Indonesia dalam *Financial Action Task Force* (FATF) dan mencerminkan komitmen BI dalam memerangi tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

II.1.4. Kerja Sama *Sustainable Finance*

Fora kerja sama ASEAN menaruh perhatian pada upaya pengembangan *sustainable finance*. ASEAN mengembangkan *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* yang akan menjadi panduan dan bahasa umum bagi negara anggota dalam mengembangkan sistem keuangan dan pembiayaan yang berbasis lingkungan. Selain itu, negara ASEAN juga memiliki *ASEAN Sustainable Banking Principles*. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan bagi bank sentral di ASEAN dalam mengembangkan praktik-praktik perbankan berbasis lingkungan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Pembahasan isu *sustainable finance* oleh negara ASEAN merupakan kontribusi bank sentral dalam *sustainable finance journey*, serta mendorong bank sentral untuk mempromosikan adopsi prinsip *sustainable finance* di sektor keuangan.

EMEAP telah melakukan survei untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh negara anggota dalam penyusunan kebijakan terkait perubahan iklim. Respons dari anggota mengindikasikan beberapa kendala yang bersifat global, seperti kurangnya data dan metodologi untuk mengukur risiko iklim. Terdapat beberapa kendala domestik/spesifik, seperti kawasan Asia Pasifik menghadapi transisi yang lebih dalam menuju *net-zero* dibandingkan wilayah lainnya. Asia Pasifik juga terekspos risiko fisik yang unik dan ukuran pasar modal *sustainable finance* yang masih terbatas.

Pembiayaan berkelanjutan dan ekonomi hijau menjadi topik utama dalam diskusi di jalur keuangan (*Finance Track*) G20. Pada April 2021, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 membentuk Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Working Group* atau SFWG). SFWG mendiskusikan berbagai topik dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi hijau, antara lain upaya meningkatkan pembiayaan global dan transfer teknologi. Penyusunan taksonomi ekonomi

dan keuangan hijau, penyediaan data, dan pelaporan/pengungkapan pada laporan keuangan, turut menjadi topik bahasan yang mengemuka. Selanjutnya, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mengesahkan *G20 Sustainable Finance Roadmap* (*SF Roadmap*) dan *Synthesis Report* pada Oktober 2021.

***SF Roadmap* merupakan dokumen multi-tahun tentang upaya G20 untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan.** *SF Roadmap* disusun dengan memperhatikan kondisi saat ini, analisis kesenjangan, dan rencana tindakan untuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Dokumen ini merekomendasikan tindakan konkret, tepat waktu, dan prioritas untuk mengatasi hambatan yang ada. *Roadmap* dapat disesuaikan untuk mencerminkan prioritas Presidensi G20 di masa depan, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing negara anggota. Meski saat ini masih berfokus pada iklim, ke depan akan mencakup isu keberlanjutan lainnya seperti keanekaragaman hayati, alam, dan isu terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs). *SF Roadmap* mempertimbangkan lima bidang yaitu: (i) pengembangan pasar dan pendekatan untuk menyelaraskan investasi dengan tujuan keberlanjutan; (ii) informasi yang konsisten, dapat dibandingkan, dan berguna untuk mengambil keputusan tentang risiko, peluang, dan dampak keberlanjutan; (iii) penilaian dan pengelolaan risiko iklim dan keberlanjutan; (iv) peran IFI, keuangan publik dan insentif kebijakan; dan (v) masalah lintas sektor. Masing-masing bidang memiliki prioritas dan tindakan yang diperlukan untuk membantu meningkatkan keuangan berkelanjutan, guna mendukung Agenda 2030 dan *Paris Agreement*. Penerapan *SF Roadmap* bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta memberi ruang fleksibilitas bagi negara yang berpartisipasi. Selain itu, implementasi dari *SF Roadmap* akan didukung oleh organisasi internasional terkait.

***Synthesis Report* mencakup informasi mengenai hasil kegiatan SFWG selama 2021.** *Report* didasari kajian dan masukan yang disampaikan organisasi internasional dan mitra akademis, serta dari konsultasi dengan pemangku kepentingan (termasuk sektor swasta). Dokumen ini meninjau praktik terkini dan mengusulkan serangkaian rekomendasi untuk kemajuan dalam tiga bidang prioritas: (i) meningkatkan komparabilitas dan interoperabilitas pendekatan untuk menyelaraskan investasi dengan tujuan keberlanjutan; (ii) mengatasi tantangan informasi dengan meningkatkan

pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan; dan (iii) meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam mendukung tujuan *Paris Agreement* dan Agenda 2030. SFWG berencana menyusun laporan kemajuan terhadap pelaksanaan *SF Roadmap* dan menyusun *Synthesis Report* untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20.

G20 juga menyambut baik agenda keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Financial Stability Board (FSB). FSB menyampaikan dua laporan kepada G20, yaitu:

1. Laporan pertama berisi analisis ketersediaan data untuk mendukung asesmen terhadap risiko stabilitas keuangan yang bersumber dari perubahan iklim. Laporan ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi. FSB merekomendasikan otoritas keuangan mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas data tentang eksposur lembaga keuangan terhadap risiko iklim. Lembaga keuangan diharapkan dapat

mengembangkan metode pengukuran/metrik risiko iklim dan meningkatkan kerja sama untuk mendukung ketersediaan dan konsistensi data.

2. Laporan kedua. FSB merekomendasikan promosi pengungkapan terkait iklim yang konsisten, dapat diperbandingkan secara global, dan andal. Otoritas keuangan diharapkan dapat mendorong implementasi pengungkapan atau panduan yang konsisten. Rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* digunakan sebagai referensi utama untuk perusahaan non keuangan dan pengungkapan lembaga keuangan, sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.

Negara anggota G20 menyambut baik *FSB Roadmap for Addressing Financial Risk from Climate Change*. Dokumen ini akan melengkapi diskusi di G20 yang terkait dengan pemantauan terhadap risiko perubahan iklim.

Presidensi G20 Indonesia: Memimpin Pemulihan Global yang Merata dan Kuat

Dunia masih berjuang untuk melawan penyebaran virus dan mengatasi dampaknya setelah terpukul akibat pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020.

Beberapa negara saat ini masih berjuang mengatasi kembali meningkatnya angka kasus baru COVID-19. Meskipun vaksin sudah berhasil ditemukan dan distribusinya telah disetujui pada akhir tahun 2020, produksi vaksin masih terbatas. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi, khususnya pada negara berkembang. Hal ini mengakibatkan pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Selain mengalami disrupsi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, perekonomian global juga menghadapi sejumlah tantangan lain serta peluang. Tantangan perubahan iklim dan bencana alam juga dapat mengakibatkan krisis. Tantangan ini berisiko memberikan dampak yang lebih bersifat jangka panjang dan kompleks dibandingkan pandemi COVID-19. Di sisi lain, pandemi juga memberikan momentum akselerasi digitalisasi. Dalam konteks ini, negara-negara dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendorong produktivitas melalui pemanfaatan teknologi digital.

Di tengah tantangan dan peluang yang dihadapi dunia tersebut, peran dan kepemimpinan G20 menjadi makin penting. G20 bekerja sama untuk menangani akar permasalahan dari produksi dan distribusi vaksin COVID-19 yang belum memadai. Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi, G20 juga perlu fokus pada upaya untuk mengatasi risiko perubahan iklim, melanjutkan agenda reformasi struktural, dan meningkatkan resiliensi sektor keuangan. Pada 2021, G20 di bawah Presidensi Italia telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung pemulihan global. Pertama, komitmen sebesar USD14,5 miliar untuk mendukung inisiatif the Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A).

Kedua, komitmen untuk membagikan 1,2 miliar dosis vaksin melalui Fasilitas COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX). Ketiga, G20 memberikan dukungan terhadap alokasi umum *Special Drawing Rights* (SDR) IMF untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang cadangan aset global guna mendukung negara yang rentan dalam menangani pandemi.

Di tengah upaya tersebut, pemulihan ekonomi global diperkirakan masih tidak sinkron dan belum merata. Negara-negara maju –yang memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke vaksin– pulih lebih awal, sementara negara berkembang dan berpenghasilan rendah pulih lebih lambat. Situasi ini akan memiliki implikasi yang signifikan karena negara maju mungkin akan menghentikan stimulus kebijakan untuk mengatasi pandemi lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya pengetatan kondisi keuangan global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Selain itu, kerusakan yang mendalam pada ekonomi akibat pandemi diperkirakan akan meninggalkan dampak yang berkepanjangan dan membekas (*scarring effect*) sehingga menambah beban bagi negara-negara dalam mendorong pemulihan. Pada 2022, ekonomi global diperkirakan masih menghadapi risiko transisi perubahan iklim, serta perlu menghadapi tantangan dan mengambil peluang dari peningkatan digitalisasi.

Melanjutkan kepemimpinan Italia pada 2021, Indonesia perlu bersiap menyusun strategi dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang dialami oleh perekonomian global. Dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan

yang keberlanjutan dan inklusif. Dalam mencapainya, Presidensi G20 Indonesia memiliki 6 (enam) agenda prioritas di jalur keuangan (*finance track*), sebagai berikut.

1. **Exit strategy to support recovery**

Memastikan kebijakan *exit strategy* yang efektif dan dapat memitigasi efek rambatan sebagai prioritas bagi pembuat kebijakan di setiap negara. Normalisasi kebijakan moneter negara maju akan memengaruhi perekonomian global, terutama pelarian arus modal dari negara berkembang dan berdampak pada stabilitas sistem keuangan global. Agenda ini akan fokus pada strategi kebijakan untuk pulih bersama dari krisis, yang dapat dicapai melalui *framework of policy mix* yang *well calibrated, well planned*, dan *well communicated*. Efektivitas kebijakan strategi ini perlu didukung dengan tahapan dan waktu yang tepat serta koordinasi yang kuat dan komunikasi yang jelas antarnegara anggota.

2. **Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth**

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang besar kepada perekonomian serta menyebabkan terjadinya dampak jangka panjang yang dapat menghambat pemulihan ekonomi dan produktivitas (*scarring effect*). Agenda ini fokus pada mitigasi dampak jangka panjang untuk mengatasi *scarring effect* dari pandemi. Beberapa area yang menjadi perhatian adalah aspek ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

3. **Payment systems in the digital era**

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan adopsi pembayaran digital. Pada 2020, di bawah Kepresidenan Arab Saudi, G20 mengesahkan *G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments* (CBP), yang bertujuan untuk mengatasi empat tantangan, yaitu biaya tinggi, kecepatan rendah, akses terbatas, dan kurangnya transparansi. Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi dari keseluruhan

Roadmap tersebut, dengan dua aspek akan menjadi fokus perhatian Presidensi Indonesia, yaitu keterhubungan sistem pembayaran untuk transaksi lintas batas negara dan harmonisasi protokol *Application Programming Interfaces* (API) untuk pertukaran data. Selain CBP, agenda ini juga fokus pada pembahasan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) untuk melanjutkan diskusi mengenai CBDC, khususnya mendorong interoperabilitas CBDC dan pendalaman implikasi makro-finansial atas implementasi CBDC.

4. **Sustainable Finance**

Peningkatan frekuensi dan dampak bencana alam akibat perubahan iklim terbukti menyebabkan disrupsi ekonomi sehingga memerlukan upaya untuk mengatasi isu perubahan iklim, terutama pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Pembahasan *sustainable finance* akan diarahkan untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi *G20 Sustainable Finance Roadmap*, dengan pengelompokan pada tiga fokus area, yaitu (i) *developing a framework for transition finance*; (ii) *enhancing accessibility and affordability of sustainable finance instruments*, and; (iii) *discussing policy levers that incentivize financing and investment towards transition activities*.

5. **Digital Financial Inclusion**

Pandemi COVID-19 telah memperlebar kesenjangan masyarakat kelompok rentan, termasuk kaum perempuan dan UMKM. Namun demikian, perkembangan ekonomi dan pembayaran digital yang pesat telah dapat meningkatkan akses individu dan UMKM pada layanan keuangan dan sumber pembiayaan. Perkembangan tersebut dapat mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif. Pembayaran digital juga memudahkan program pelayanan dan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah untuk menolong kelompok rentan dan UMKM. Hal ini diharapkan dapat membuka akses pada layanan sektor

keuangan. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kurangnya literasi digital dan keuangan, serta ketidakseimbangan perkembangan infrastruktur digital. Indonesia berencana membahas integrasi sisi penawaran dan permintaan sektor keuangan untuk mempromosikan inklusi keuangan, sekaligus meningkatkan produktivitas dan inklusi ekonomi.

6. *International Taxation*

G20 telah menetapkan target ambisius dalam agenda perpajakan internasional untuk mencapai sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Meski telah tercapai kemajuan, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan G20 dalam agenda reformasi perpajakan internasional. Presidensi G20 2022 akan melanjutkan diskusi implementasi dari kesepakatan global terkait perpajakan digital yang telah dicapai pada 2021.

Presidensi G20 Indonesia pada jalur keuangan pada 2022 juga akan melanjutkan pembahasan tentang isu-isu lanjutan (*legacy*) dari forum G20 di presidensi sebelumnya. Isu-isu tersebut antara lain (i) integrasi risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global (*global risk monitoring*); (ii) penguatan *Global Financial Safety Net*; (iii) peningkatan arus modal; (iv) *Data Gap Initiatives*; (v) peningkatan reformasi regulasi sektor keuangan; (vi) penguatan keberlanjutan dan transparansi utang; (vii) percepatan agenda infrastruktur; (viii) pemanfaatan dukungan *Multilateral Development Banks*; (ix) penguatan *Pandemic Prevention, Preparedness and Response*; dan (x) dukungan berkelanjutan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika, melalui *Compact with Africa* (CwA). Isu-isu lanjutan ini merupakan agenda yang bersifat *multi-year* dan relevan untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai perkembangan lingkungan strategis global.

Keseluruhan rangkaian agenda G20 tersebut akan dibahas secara berjenjang. Pertama, setiap agenda akan didiskusikan pada tataran teknis di tingkat kelompok kerja (*working group*). Kedua, agenda yang telah dibahas di kelompok kerja kemudian dieskalasi ke tingkat deputi, termasuk untuk penyusunan konsep kesepakatan (*komunike*). Ketiga, pembahasan agenda akan berlanjut pada tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, termasuk menyepakati *komunike* Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang telah disusun oleh Deputi. Terakhir, berdasarkan pembahasan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral serta mengacu pada *komunike* yang telah disetujui, hal-hal yang merupakan isu strategis akan dieskalasi lebih lanjut untuk diadopsi dalam *G20 Leaders' Declaration* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dihadiri oleh para Kepala Negara G20. Dalam KTT tersebut, seluruh negara anggota G20 menyatakan komitmen, harapan, dan pandangan mengenai isu-isu yang dibahas dalam seluruh rangkaian kegiatan G20.

Presidensi G20 Indonesia dimulai dengan agenda Pertemuan Pertama tingkat Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 9-10 Desember 2021 di Bali dengan format *hybrid*. Diskusi fokus pada agenda prioritas yang akan dibawa oleh Presidensi Indonesia selama tahun 2022, serta isu terkini terkait pemulihan ekonomi, risiko terhadap perekonomian global, arsitektur keuangan global, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan infrastruktur dan topik perpajakan internasional. Mendahului pertemuan tersebut, Presidensi G20 Indonesia juga menyelenggarakan seminar internasional dengan tema "*Recover Together, Recover Stronger*" yang menghadirkan pembicara *high level* dari beberapa negara G20 lain dan organisasi internasional.

Di bawah kepemimpinan Indonesia, G20 diharapkan tidak hanya dapat mengawal pemulihan global yang kuat dan inklusif, namun juga bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pertama, Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Kedua, Presidensi G20 Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (*showcasing*) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada

dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi. Ketiga, pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, Presidensi G20 Indonesia tidak hanya mencatatkan sejarah di ranah global dengan menuntun perekonomian global keluar dari krisis akibat pandemi, namun juga memberikan manfaat nyata bagi pemulihan ekonomi nasional.

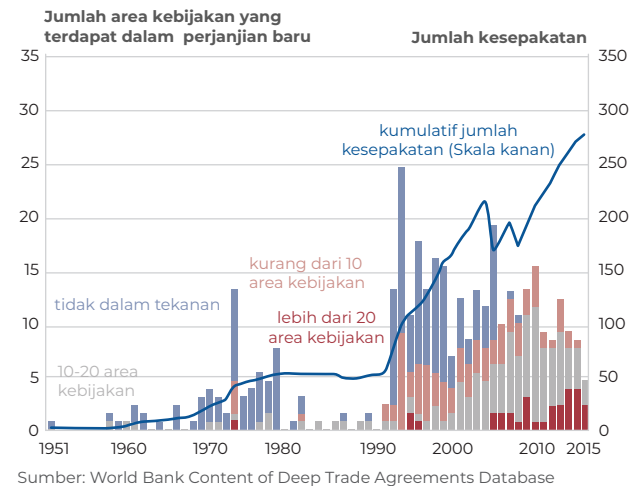
II.2.1. Kerja Sama Perdagangan Internasional

Jalanan perjanjian perdagangan internasional meningkat signifikan dengan cakupan yang meluas.

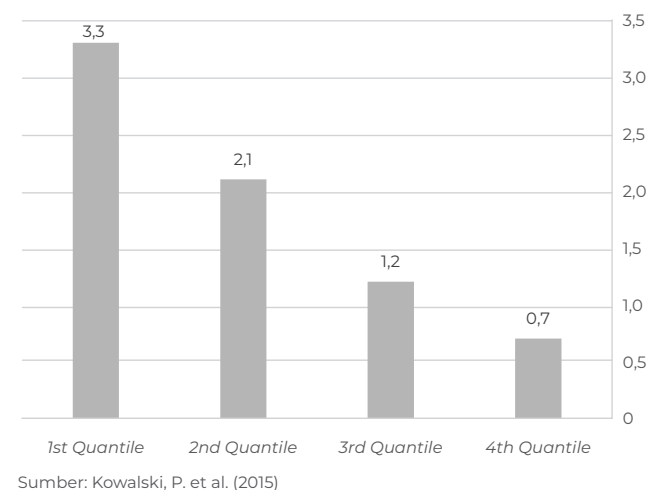
Hal itu tercermin dari keberadaan 50 perjanjian perdagangan pada 1990 yang kemudian mencapai 279 perjanjian pada akhir 2015 (Grafik 2.1). Cakupan aspek yang diatur dalam perjanjian juga makin luas. Perjanjian perdagangan tidak lagi terbatas pada penurunan tarif perdagangan barang, namun juga mencakup antara lain perdagangan jasa, investasi, ketenagakerjaan, hak kekayaan intelektual, dan *electronic commerce* (sering disebut *deep trade agreement*).

Perjanjian perdagangan dengan cakupan makin dalam terbukti meningkatkan keterkaitan sebuah negara dengan *global value chain* (GVC). Keterkaitan tersebut tercermin dari adanya pengaruh terhadap *backward and forward linkages* industri secara global (Boffa, Jensen, & Solleder, 2017). *Deep trade agreement* menstimulasi GVC melalui kemudahan perdagangan lintas batas, penurunan biaya bahan baku/produksi, serta tersedianya disiplin umum yang terstandarisasi antarnegara (Ruta, 2017). Hal ini menjadi penting mengingat $\pm 70\%$ perdagangan internasional saat ini melibatkan rantai nilai global, yang akan berkontribusi positif bagi perkembangan industri nasional, meningkatkan daya saing perekonomian. Kondisi tersebut dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita. Grafik 2.2 menunjukkan bahwa makin tinggi keterlibatan sebuah negara dalam GVC maka makin tinggi pertumbuhan GDP per kapita suatu negara.

Grafik 2.1 Jumlah *Deep Trade Agreements* Terus Meningkat (1955-2015)



Grafik 2.2 Partisipasi dalam *Global Value Chain* dan Pertumbuhan GDP per kapita (%)



Indonesia terus melakukan reformasi struktural di bidang perdagangan dengan menjalin kerja sama perdagangan baru. Setelah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) pada 1995, Indonesia menjalin lebih dari 20 perjanjian perdagangan internasional, baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun regional sebagai salah satu negara ASEAN. Bentuk kerja sama perdagangan yang dijalin bervariasi dari *Preferential Tariff Agreement* (PTA) yang memuat kesepakatan penurunan tarif barang, *Free Trade Agreement* (FTA) mencakup barang, jasa dan investasi, hingga *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) yang memiliki cakupan lebih kompleks.

Indonesia terus memperluas kerja sama ke negara nontradisional serta aktif terlibat dalam penyusunan tatanan baru dunia di bidang investasi dan *electronic commerce*. Selama 2021, Indonesia melanjutkan perundingan perjanjian perdagangan bilateral dengan beberapa negara mitra, antara lain European Union (EU), melakukan perundingan bidang jasa dan investasi dengan Chili (yang pada 2019 telah dijalin kerja sama perdagangan barang), serta mulai melakukan perundingan dengan Uni Emirat Arab (UEA). Di level regional, Indonesia juga terus mempererat integrasi jasa keuangan dan *e-commerce* dengan negara ASEAN serta ikut membangun kerja sama strategis dengan

negara mitra ASEAN melalui proses *general review ASEAN-Australia New Zealand FTA*. Indonesia turut menyusun tatanan baru dunia di bidang investasi dan *e-commerce* melalui keterlibatan aktif dalam inisiatif plurilateral yang berlangsung di WTO, yaitu *Joint Statement Initiative on Investment Facilitation for Development* (JSI-IFD) dan *Joint Statement Initiative on Electronic Commerce* (JSI *e-commerce*).

Jalinan kerja sama perdagangan internasional berpotensi mendorong ekspor RI melalui penurunan tarif bea masuk dan kerja sama pengembangan kapasitas. Dari berbagai kerja sama yang dijalin, RI memperoleh beberapa manfaat antara lain berupa eliminasi tarif bea masuk yang diberikan negara mitra sejak perjanjian berlaku efektif dan atau secara bertahap. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk-produk asal RI karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan produk sejenis dari negara yang tidak menjalin kerja sama perdagangan internasional dengan negara mitra. Sebagai ilustrasi, saat ini RI mendapat keringanan bea masuk 0% ke pasar Australia dan New Zealand dari perjanjian *ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) dan tambahan keringanan bea masuk yang signifikan dari Korea, Jepang, dan Tiongkok dari kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Gambar 2.1 Kerja sama Perdagangan Internasional Indonesia

Concluded Negotiations	On-Going Negotiations	Possible Negotiations
- Indonesia - Japan EPA - Indonesia - Pakistan PTA - Indonesia - Palestine Trade Facilitation for Certain Products - Indonesia - Chile CEPA (Trade in Goods) - Indonesia - EFTA CEPA - Indonesia - Australia CEPA - Indonesia - Mozambique PTA - Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) - ASEAN - Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) - ASEAN - India Free Trade Area (AIFTA) - ASEAN Agreement on Medical Device Directive - ASEAN - Korea FTA (AKFTA) - ASEAN - China FTA (ACFTA) - ASEAN - Hong Kong, China FTA & Investment Agreement - ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) - ASEAN Agreement on e-Commerce - ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) - ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership - ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) - ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM) - Trade Facilitation Agreement (TFA) - ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) - Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	- Indonesia - European Union CEPA - Indonesia - UAE CEPA - Indonesia - Canada CEPA - Indonesia - Turkey CEPA - Indonesia - Pakistan TIGA - Indonesia - Tunisia PTA - Indonesia - Bangladesh PTA - Indonesia - Morocco PTA - Indonesia - Iran PTA - Indonesia - Mauritius PTA - Review ASEAN - India FTA (AIFTA) - Review AANZFTA - Review ATIGA	- Indonesia - South African Customs Union (SACU) - Indonesia - Economic Community of West African States (ECOWAS) PTA - Indonesia - East African Community (EAC) PTA - Indonesia - Djibouti PTA - Indonesia - Algeria PTA - Indonesia - Gulf Cooperation Council (GCC) - Indonesia - Sri Lanka FTA - Indonesia - Colombia PTA - Indonesia - Peru FTA - Indonesia - Ecuador - Indonesia - MERCOSUR - Indonesia - US Limited Trade Deal (LTD) - Indonesia - Fiji PTA - Indonesia - Papua New Guinea PTA - Indonesia - Eurasian Economic Union (EAEU) - Indonesia - Ukraine PTA - Indonesia - India PTA - Indonesia - Afghanistan PTA - ASEAN - Canada PTA - ASEAN - European Union FTA

Sumber: Ditjen PPI Kemendag, November 2021

Beberapa perjanjian perdagangan memuat pengaturan tentang kerja sama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau standar produksi. Pada kerja sama bilateral dengan Australia terdapat pengaturan pengembangan kapasitas UKM dalam bentuk *workshop*, *training* pengembangan produk dan kapasitas ekspor yang sesuai standar Australia, serta beragam program *engagement* dengan pelaku usaha Australia. Hal serupa juga terdapat pada kerja sama yang dijalin dengan European Free Trade Association (EFTA) dimana terdapat pengaturan mengenai kerja sama peningkatan kapasitas UKM dalam hal keamanan dan mutu barang untuk mencapai kesesuaian dengan standar, regulasi teknis dan persyaratan pasar di negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).

Bank Indonesia mendukung seluruh tahapan kerja sama perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan derajat integrasi ekonomi Indonesia dengan perekonomian global dan daya saing dibanding negara *peers*. Pada tahap pranegosiasi, BI ikut terlibat dalam penyusunan asesmen potensi kerja sama negara calon mitra dan pemetaan derajat *compliance* RI dengan disiplin pengaturan domestik sektor jasa yang saat ini sedang dibahas secara plurilateral oleh beberapa negara WTO dalam *Joint Initiative on Services Domestic Regulation* (JI-SDR). Pada tahap negosiasi, BI ikut serta dalam proses perumusan posisi dan perundingan isu-isu yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan BI, diantaranya isu jasa keuangan/ investasi/ *e-commerce/economic cooperation*. Setelah proses negosiasi, BI dalam penyusunan dokumen ratifikasi beberapa perjanjian yang memuat isu jasa keuangan, memfasilitasi diseminasi manfaat kerja sama perdagangan internasional (bersama FTA Center Kemendag), dan ikut serta menyusun rencana kerja yang terkait dengan implementasi perjanjian.

Bank Indonesia juga terus menjaga ruang kebijakan serta pangsa pasar pelaku usaha domestik. Secara umum, Bank Indonesia selalu menjaga agar disiplin yang disepakati dalam seluruh perjanjian perdagangan internasional tidak membatasi ruang kebijakan BI dalam menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran, serta menjaga kemampuan penerapan *safeguard measures* (antara lain kebijakan *safeguard* saat terjadi krisis *Balance of Payment*). BI juga berupaya menjaga pangsa pasar pelaku usaha domestik dengan hanya memberikan komitmen akses

pasar yang sejalan dengan komitmen terdahulu yang telah diberikan di WTO dan hanya melakukan negosiasi pembukaan akses pasar lanjutan secara selektif dengan memperhatikan kesiapan peraturan/pelaku usaha/pasar domestik serta berbasis prinsip resiprositas.

II.2.2. Promosi Perdagangan dan Investasi

Linkage IRU-RIRU-GIRU sampai dengan pertengahan Desember 2021, telah memfasilitasi penyelenggaraan 126 kegiatan promosi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor produktif dan pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk rangkaian kegiatan edukasi/diseminasi potensi investasi/pasar luar negeri. BI telah memfasilitasi penyelenggaraan 37 kegiatan promosi perdagangan di luar negeri yang diikuti 364 UMKM binaan BI untuk mempromosikan produk kopi, *fashion*, makanan olahan, *home decor*, perikanan, dan perhiasan. BI juga memfasilitasi 30 kegiatan promosi investasi untuk mempromosikan 105 proyek yang didominasi sektor pariwisata (21%), kawasan industri (16%), dan infrastruktur (16%). Pertemuan bilateral juga dilakukan untuk merespons minat pasar Luar negeri pada sektor baru. BI memfasilitasi pertemuan bilateral antara investor potensial Tiongkok yang tertarik dengan proyek kawasan industri halal sejalan dengan minat pengembangan industri halal yang makin tinggi. Kegiatan promosi perdagangan dan investasi juga merupakan rangkaian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja.

Fasilitasi promosi dilengkapi dengan *pre-event webinar* edukasi untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan promosi. *Linkage IRU-RIRU-GIRU* telah memfasilitasi 19 kegiatan edukasi di bidang perdagangan untuk meningkatkan pemahaman UMKM binaan BI mengenai peluang pasar ekspor ke luar negeri antara lain Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Singapura, dan Taiwan. Selain itu, tujuh kegiatan edukasi di bidang investasi juga telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman RIRU mengenai proyek investasi yang *clean and clear*. Upaya memperluas jangkauan informasi dilakukan melalui sinergi pada *platform digital* yang tengah dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Langkah tersebut berperan sebagai media untuk mempromosikan potensi investasi dan perdagangan agar tetap dapat dijangkau oleh calon investor maupun *buyer/agregator* di luar negeri.

Strategi promosi investasi dan perdagangan berfokus pada sinergi, targeted dan outcome oriented. Untuk meningkatkan pemahaman investor dan/atau *buyer* potensial di luar negeri mengenai proyek dan/atau produk UMKM Indonesia, sinergi di level IRU, RIRU, dan GIRU juga melibatkan K/L, perwakilan otoritas di luar negeri, serta mitra/*stakeholder* eksternal lain. Beberapa mitra/*stakeholder* eksternal yang dilibatkan pada penyelenggaraan kegiatan promosi, yaitu a.l. Singapore Business Federation, ASEAN-Japan Center, Coffee Association of Guangzhou, *aggregator* dan diaspora di luar negeri. Dukungan diaspora antara lain diberikan dalam bentuk transfer *knowledge* mengenai strategi yang harus dilakukan UMKM untuk menembus pasar luar negeri. Diaspora juga mampu mengatasi kendala bahasa bagi UMKM, terutama pada kegiatan edukasi, seperti terlihat dari antusiasme interaksi UMKM dengan narasumber.

Promosi investasi dan perdagangan dilakukan secara targeted, baik dari sisi jenis investasi/produk ekspor yang dipromosikan maupun negara tujuan promosi. Pendekatan ini sangat bermanfaat agar promosi sejalan dengan pemetaan *demand* dan *supply*. Pendekatan yang lebih *targeted* tercermin pada perluasan akses ke beberapa wilayah baru, seperti Australia, Perancis dan Uni Emirat Arab. Proyek Investasi dan produk yang diikuti sertakan pada kegiatan promosi investasi dan perdagangan telah melalui proses seleksi, kurasi, dan minat oleh calon investor/*buyer*.

Kegiatan promosi diharapkan dapat menghasilkan komitmen dari pembeli dan investor. Sejumlah komitmen investasi telah berhasil diperoleh, antara lain: (i) penandatanganan MoU proyek pengembangan Marina Yacht Pulau Klah Sabang; (ii) pertemuan atau komunikasi lanjutan antara investor Inggris dengan pengelola beberapa proyek sebagai tindak lanjut *Indonesia Investment Forum 2021* di London. Promosi perdagangan juga menghasilkan (i) penandatanganan

MoU sebagai tindak lanjut *In-Store Promotion* UMKM Gayeng Singapura; (ii) pengiriman produk kopi Toraja *Mountain Coffee* dari event *Coffee Business Matching* di Tokyo; (iii) perpanjangan kerja sama *in-store promotion* di *Dept. Store* Jepang pada 2022.

Keberhasilan kegiatan promosi didukung oleh inovasi proses bisnis pada kegiatan promosi investasi dan perdagangan. Inovasi untuk mengoptimalkan kegiatan promosi perdagangan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM produk kopi pada *buying mission* dengan metode kurasi tiga tahap. Keikutsertaan ini diharapkan dapat menghasilkan standar *best practice* bagi proses kurasi untuk produk kopi, sehingga perencanaan promosi produk kopi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih optimal. Inovasi kegiatan promosi juga diarahkan untuk mendorong transaksi penjualan seperti *in-store promotion* di Pusat Perbelanjaan yang strategis serta *showcasing* produk UMKM pada lokasi premium dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan pameran.

Inovasi lain yang dilakukan adalah promosi perdagangan produk kopi melalui partisipasi dalam lelang kopi seperti Singapore Coffee Auction. Model promosi via *auction* dapat memotivasi calon pembeli melakukan penawaran beberapa kali sehingga dapat meningkatkan harga. Inovasi melalui *showcasing* produk UMKM kepada *aggregator* ekspor membuka peluang *showcasing* pada *spot-spot* premium. Langkah tersebut juga disertai pendampingan untuk menyiapkan produk UMKM agar memenuhi standar pasar luar negeri. Dari sisi promosi investasi, inovasi dilakukan dengan penguatan proses pemilihan proyek yang *targeted* untuk merespons minat dari investor melalui *Road to Indonesia Investment Day Abu Dhabi 2021*. Dalam kesempatan ini dihadirkan profil lima proyek investasi prospektif dalam bidang pariwisata, kesehatan, industri, dan infrastruktur.

Bank Indonesia terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kebankseptralan. Selama 2021, BI mempersiapkan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, seperti persiapan substansi dan *event arrangement finance track* Presidensi G20 Indonesia, serta menjadi *chair Asian Consultative Council – Bank for International Settlements (ACC-BIS)*. Presidensi G20 Indonesia yang bertemakan “*Recover Together, Recover Stronger*” akan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan yang keberlanjutan dan inklusif. BI bersama K/L telah menetapkan enam agenda prioritas pada jalur keuangan (*finance track*), yaitu: (i) *Exit strategy to support recovery*, (ii) *Addressing scarring effect to secure future growth*, (iii) *Payment systems in the digital era*, (iv) *Sustainable finance*, (v) *Digital financial inclusion*, serta (vi) *International taxation* (Boks Presidensi G20 Indonesia: Memimpin Pemulihan Global yang Merata dan Kuat).

Eksistensi pada fora internasional ditandai dengan keketuaan ACC-BIS. Gubernur BI menjadi Ketua ACC-BIS mulai 26 September 2021 hingga dua tahun mendatang. BI akan mengarahkan aktivitas ACC-BIS yang berfokus pada riset dan rekomendasi kebijakan di sejumlah isu yang sedang mengemuka, antara lain “*Well Calibrated, Well Planned, and Well Communicated Exit Strategy to Ensure Smooth Recovery; CBDC and Cross Border Payment, Climate Change and Sustainable Finance*.” Keketuaan Gubernur BI di ACC-BIS juga akan dapat mendukung agenda Indonesia pada Presidensi G20 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023 yang akan datang.

Implementasi peningkatan kapasitas melalui kerja sama area kebankseptralan atau *Structured Bilateral Cooperation (SBC)* pada masa pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan baik.¹³ Sepanjang 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan SBC, yaitu:

1. **SBC dengan Bank of Japan.** Telah dilaksanakan *virtual technical discussion (TD)* mengenai “Pengembangan dan Pengawasan BI-RTGS”, yang membahas tantangan dan kebijakan pengawasan RTGS. Selain itu, *High Level Meeting (HLM)* antara Gubernur BI dan BOJ juga telah diselenggarakan dengan membahas perkembangan ekonomi negara masing-masing dan strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bersama bank sentral dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, serta mendiskusikan topik dan agenda Presidensi G20 Indonesia.
2. **SBC dengan Bank of England.** Telah dilaksanakan *Regional Workshop “Enhancing Payment Systems for the Digital Age and the Role of Fintech”* untuk mendiskusikan modernisasi RTGS dan digitalisasi sistem pembayaran, serta CBDC. Sebelumnya, juga telah diselenggarakan *ASEAN regional seminar on Managing Risks from Climate Change* secara *virtual* guna membahas dampak *climate change* bagi perekonomian serta respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan ekonomi hijau.
3. **SBC dengan Bank of Korea (BOK).** Telah diselenggarakan diskusi teknis mengenai *Artificial Intelligence and Analytics* yang membahas isu dan perkembangan penerapan AI pada kedua bank sentral. Kegiatan ini diharapkan mendukung penguatan proyek *omnidata intelligence* di BI. Selain itu juga dilakukan diskusi teknis mengenai *Open Market Operation* yang mengulas strategi dan kebijakan bank sentral dalam memperkuat kerangka operasi moneter.

¹³ **Structured Bilateral Cooperation (SBC)** merupakan kerja sama bilateral di area kebankseptralan yang dilakukan oleh BI dengan bank sentral mitra, dalam kerangka terstruktur, sistematis, dan komprehensif.

4. SBC dengan Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). Telah diselenggarakan diskusi teknis mengenai *Development of Estimation Model for Currency Demand in the CBRT* untuk membahas praktik terbaik di internasional mengenai pengelolaan uang kartal oleh bank sentral. Informasi tersebut menjadi masukan bagi BI dalam penguatan kebijakan pengelolaan uang di era digital. Selain itu juga diselenggarakan diskusi teknis mengenai “*Experiences on Implementing Handbook Securities Statistics with a focus on Debt Securities Statistics*,” yang memberikan *insight* dalam mengimplementasikan komitmen Indonesia pada fora G20, khususnya terkait “*G20 Recommendations of DGI.II-7 Securities Statistics*.”

BI juga bekerja sama dengan SEACEN untuk melaksanakan pengembangan kapasitas SDM bank sentral di kawasan. SEACEN merupakan lembaga penyedia program *capacity building* dan riset area kebanksentralan. Program SEACEN mencakup area moneter, stabilitas keuangan dan pengawasan, sistem pembayaran dan setelmen, serta *leadership and governance*. Selama 2021, BI menyelenggarakan kursus internasional yakni: (i) *SEACEN Course: Data Analytics for Macroeconomic Surveillance*; (ii) *International Macroeconomic Analysis in a Post-COVID-19 World*; dan (iii) *Financial Stability and Macroprudential Supervision*.

Lampiran

Tabel 1. Produk Domestik Bruto

(% yoy)

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,3	3,1	2,3	2,2	2,1	2,3	2,6	0,6	-9,1	-2,9	-2,3	0,5	12,2	4,9
Argentina	0,2	2,9	3,8	4,3	3,0	-2,8	-4,1	-6,4	-6,1	-1,0	-0,3	-0,6	-4,8	-19,9	-10,2	-4,6	2,5	19,6	-
Brazil	0,3	0,8	1,6	2,6	1,9	1,6	2,1	1,7	1,2	1,5	1,3	1,6	-0,3	-10,9	-3,9	-1,1	1,0	12,4	-
Chili	-0,4	0,9	2,3	2,9	4,9	4,8	2,6	2,8	1,4	1,8	2,7	-2,4	-0,1	-13,7	-9,8	-0,2	1,4	17,5	17,3
Meksiko	3,0	3,0	1,6	1,8	2,5	2,2	2,8	1,2	0,3	0,0	-0,1	-0,9	-2,0	-18,8	-8,7	-4,6	-2,7	19,5	-
Asia Pasifik																			
Australia	2,1	2,1	3,0	2,5	3,1	3,2	2,7	2,4	1,9	1,6	1,9	2,1	1,4	-6,2	-3,6	-0,9	1,3	9,6	-
Tiongkok	7,0	7,0	6,9	6,8	6,9	6,9	6,7	6,5	6,3	6,0	5,9	5,8	-6,8	3,2	4,9	6,5	18,3	7,9	4,9
India	6,3	6,1	5,3	6,7	8,9	7,6	6,5	6,3	5,8	5,4	4,6	3,3	3,0	-24,4	-7,4	0,5	1,6	20,1	8,4
Jepang	1,0	1,4	2,1	2,2	1,4	1,2	-0,2	-0,2	0,0	0,4	1,1	-1,4	-2,1	-10,1	-5,5	-0,9	-1,3	7,6	1,4
Korea Selatan	3,1	2,8	3,9	2,9	2,9	3,0	2,4	3,3	1,9	2,3	2,1	2,6	1,5	-2,6	-1,0	-1,1	1,9	6,0	4,0
ASEAN-6																			
Indonesia	5,0	5,0	5,1	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,1	5,1	5,0	5,0	3,0	-5,3	-3,5	-2,2	-0,7	7,1	3,5
Malaysia	5,6	5,7	6,1	5,8	5,3	4,8	4,5	4,8	4,7	5,0	4,5	3,7	0,7	-17,2	-2,7	-3,4	-0,5	16,1	-4,5
Filipina	6,4	7,2	7,5	6,6	6,5	6,4	6,1	6,4	5,9	5,6	6,3	6,6	-0,7	-17,0	-11,6	-8,3	-3,9	12,0	7,1
Singapura	4,6	3,6	5,3	4,6	4,7	4,9	3,0	1,1	1,0	0,2	1,1	1,3	0,0	-13,3	-5,8	-2,4	1,5	15,2	7,1
Thailand	3,8	4,3	4,5	4,1	5,1	4,6	3,2	3,8	2,8	2,4	2,7	1,3	-2,1	-12,1	-6,4	-4,2	-2,6	7,6	-0,3
Vietnam	5,2	6,3	7,5	7,7	7,5	6,8	6,9	7,3	6,8	6,7	7,3	7,0	3,8	0,4	2,6	4,5	4,7	6,6	-6,2
Eropa																			
Kawasan Euro	2,2	2,7	3,0	3,1	2,4	2,1	1,5	1,2	1,9	1,5	1,8	1,2	-3,0	-14,5	-4,0	-4,4	-1,2	14,2	3,7
Inggris	2,4	2,2	2,1	1,8	1,4	1,6	1,8	1,8	2,2	1,8	1,6	1,2	-2,2	-21,4	-8,1	-7,1	-5,8	23,6	6,6
Russia	1,3	2,3	2,6	1,0	2,6	2,7	2,6	3,2	1,3	1,2	2,6	2,9	1,4	-7,8	-3,5	-1,8	-0,7	10,5	4,3
Turki	5,3	5,3	11,8	7,3	7,5	5,8	2,5	-2,6	-2,5	-1,6	1,0	6,1	4,4	-10,4	6,3	6,2	7,2	21,7	-
Afrika																			
Afrika Selatan	0,7	1,1	1,3	1,5	1,3	0,8	2,1	1,8	0,4	0,8	-0,1	-0,6	0,5	-16,8	-5,8	-3,5	-2,6	19,3	-

Sumber: Bloomberg

Tabel 2. Tingkat Pengangguran

Akhir Periode (%)

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat	4,6	4,4	4,3	4,2	4,0	3,9	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,8	13,0	8,8	6,7	6,2	5,9	5,1
Argentina	9,2	8,7	8,3	7,2	9,1	9,6	9,0	9,1	10,1	10,6	9,7	8,9	10,4	13,1	11,7	11,0	10,2	9,6	
Brazil	13,7	13,0	12,4	11,8	13,1	12,4	11,9	11,6	12,7	12,0	11,8	11,0	12,2	13,3	14,6	13,9	14,7	14,1	13,2
Chili	7,0	7,3	7,0	6,5	7,4	7,5	7,5	7,1	7,2	7,3	7,3	7,1	8,2	12,2	12,3	10,3	10,4	9,5	8,4
Meksiko	3,5	3,3	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	3,8	3,6	3,5	3,5	3,3	3,3	5,4	4,8	4,4	4,4	4,0	3,9
Asia Pasifik																			
Australia	5,9	5,6	5,4	5,6	5,6	5,3	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,0	5,3	7,4	6,9	6,6	5,7	4,9	4,6
Tiongkok	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	4,2	4,2	3,9	3,9	
India				8,5															
Jepang	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,3	2,4	2,2	2,5	2,8	3,0	3,0	2,6	2,9	2,8
Korea Selatan	3,6	3,8	3,7	3,7	4,0	3,7	4,0	3,8	3,8	4,0	3,4	3,7	3,8	4,3	4,0	4,5	3,9	3,7	3,0
ASEAN-6																			
Indonesia	5,3		5,5		5,1		5,3		5,0		5,2		4,9		7,1		6,3		6,5
Malaysia	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,9	4,9	4,6	4,8	4,7	4,8	4,5
Filipina	6,6	5,7	5,6	5,0	5,3	5,5	5,4	5,1	5,3	5,1	5,4	4,5	5,3	17,7	10,0	8,7	7,1	7,7	8,9
Singapura	3,3	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,5	3,9	4,8	4,4	4,0	3,5	3,5
Thailand	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	
Vietnam	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0													
Eropa																			
Kawasan Euro	9,4	9,1	8,9	8,7	8,5	8,2	8,0	7,8	7,7	7,5	7,4	7,4	7,1	8,0	8,6	8,1	8,1	7,8	7,4
Inggris	4,6	4,4	4,3	4,4	4,2	4,0	4,1	4,0	3,8	3,9	3,8	3,8	4,0	4,1	4,8	5,2	4,9	4,7	4,3
Russia	5,4	5,1	5,0	5,1	5,0	4,7	4,5	4,8	4,7	4,4	4,5	4,6	4,7	6,2	6,3	5,9	5,4	4,8	4,3
Turki	11,7	10,4	10,4	10,3	9,8	10,2	11,4	13,3	13,9	13,4	14,0	13,6	13,0	13,0	12,4	13,0	13,1	10,4	11,1
Afrika																			
Afrika Selatan	27,7	27,7	27,7	26,7	26,7	27,2	27,5	27,1	27,6	29,0	29,1	29,1	30,1	23,3	30,8	32,5	32,6	34,4	

Sumber: Bloomberg, Trading Economics

Tanda (-): Data belum rilis

n/a: Data tidak tersedia

Tabel 3. Inflasi IHK

Akhir Periode (% yoy)

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat	2,4	1,6	2,2	2,1	2,4	2,9	2,3	1,9	1,9	1,6	1,7	2,3	1,5	0,6	1,4	1,4	2,6	5,4	5,4
Argentina*	35,0	23,4	26,2	26,1	25,4	29,8	39,5	45,5	52,5	53,3	50,8	50,6	44,6	37,4	31,7	30,5	35,0	43,9	48,1
Brazil	4,6	3,0	2,5	3,0	2,7	4,4	4,5	3,8	4,6	3,4	2,9	4,3	3,3	2,1	3,1	4,5	6,1	8,4	10,3
Chili	2,7	1,7	1,5	2,3	1,8	2,5	3,1	2,6	2,5	2,7	2,2	3,0	3,7	2,6	3,1	3,0	2,9	3,8	5,3
Meksiko	5,4	6,3	6,4	6,8	5,0	4,7	5,0	4,8	4,0	4,0	3,0	2,8	3,3	3,3	4,0	3,2	4,7	5,9	6,0
Asia Pasifik																			
Australia	2,1	1,9	1,8	1,9	1,9	2,1	1,9	1,8	1,3	1,6	1,7	1,8	2,2	-0,3	0,7	0,9	1,1	3,8	3,0
Tiongkok	0,9	1,5	1,6	1,8	2,1	1,9	2,5	1,9	2,3	2,7	3,0	4,5	4,3	2,5	1,7	0,2	0,4	1,1	0,7
India	3,9	1,5	3,3	5,2	4,3	4,9	3,7	2,1	2,9	3,2	4,0	7,4	5,8	6,2	7,3	4,6	5,5	6,3	4,4
Jepang	0,2	0,4	0,7	1,0	1,1	0,7	1,2	0,3	0,5	0,7	0,2	0,8	0,4	0,1	0,0	-1,2	-0,4	-0,5	0,2
Korea Selatan	2,3	1,8	2,0	1,4	1,2	1,5	2,1	1,3	0,4	0,7	-0,4	0,7	1,0	0,0	1,0	0,5	1,5	2,4	2,5
ASEAN-6																			
Indonesia	3,6	4,4	3,7	3,6	3,4	3,1	2,9	3,1	2,5	2,8	3,1	2,6	3,0	2,0	1,4	1,7	1,4	1,3	1,6
Malaysia	4,9	3,4	4,2	3,5	1,3	0,8	0,3	0,2	0,2	1,5	1,1	1,0	-0,2	-1,9	-1,4	-1,4	1,7	3,4	2,2
Filipina	3,1	2,5	3,0	2,9	4,3	5,2	6,7	5,1	3,3	2,7	0,9	2,5	2,5	2,5	2,3	3,5	4,5	4,1	4,8
Singapura	0,7	0,5	0,4	0,4	0,2	0,6	0,7	0,5	0,7	0,5	0,4	0,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	1,3	2,4	2,5
Thailand	0,8	-0,1	0,9	0,8	0,8	1,4	1,3	0,4	1,2	0,9	0,3	0,9	-0,5	-1,6	-0,7	-0,3	-0,1	1,3	1,7
Vietnam	4,7	2,5	3,4	2,6	2,7	4,7	4,0	3,0	2,7	2,2	2,0	5,2	4,9	3,2	3,0	0,2	1,2	2,4	2,1
Eropa																			
Kawasan Euro	1,5	1,3	1,6	1,3	1,4	2,0	2,1	1,5	1,4	1,3	0,8	1,3	0,7	0,3	-0,3	-0,3	1,3	1,9	3,4
Inggris	2,1	2,7	2,8	3,0	2,7	2,4	2,5	2,3	1,9	2,0	1,8	1,4	1,7	0,6	0,6	0,5	0,6	2,1	2,8
Russia	4,2	4,3	3,0	2,5	2,4	2,3	3,4	4,3	5,2	4,7	4,0	3,1	2,6	3,2	3,7	4,9	5,8	6,5	7,4
Turki	11,3	10,9	11,2	11,9	10,2	15,4	24,5	20,3	19,7	15,7	9,3	11,8	11,9	12,6	11,8	14,6	16,2	17,5	19,6
Afrika																			
Afrika Selatan	6,1	5,1	5,1	4,7	3,8	4,6	4,9	4,5	4,5	4,5	4,1	4,0	4,1	2,2	3,0	3,1	3,2	4,9	5,0

Sumber: Bloomberg

Keterangan: *) Buenos Aires CPI

Tabel 4. Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral

Posisi Akhir Periode (%)

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat (Fed Fund Rate)	1,00	1,25	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,50	2,50	2,00	1,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Brazil (SELIC Rate)	12,25	10,25	8,25	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50	4,50	3,75	2,25	2,00	2,00	2,75	4,25	6,25
Chili (O/N Rate)	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,75	3,00	2,50	2,00	1,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50
Meksiko (O/N Rate)	6,50	7,00	7,00	7,25	7,50	7,75	7,75	8,25	8,25	8,25	7,75	7,25	6,50	5,00	4,25	4,25	4,00	4,25	4,75
Asia Pasifik																			
Australia (Cash Target Rate)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25	1,00	0,75	0,25	0,25	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10
Tiongkok (Lending Rate)	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
India (Reverse Repo Rate)	6,25	6,25	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	6,50	6,25	5,75	5,40	5,15	4,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Jepang (O/N Call Target)	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,08	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,06	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05
Korea Selatan (Call Rate)	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,50	1,25	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75
ASEAN-6																			
Indonesia (7D RR Rate)*	4,75	4,75	4,25	4,25	4,25	5,25	5,75	6,00	6,00	6,00	5,25	5,00	4,50	4,25	4,00	3,75	3,50	3,50	3,50
Malaysia (O/N Rate)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,00	3,00	3,00	2,50	2,00	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Filipina (O/N Rate)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	4,50	4,75	4,75	4,50	4,00	4,00	3,25	2,25	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00
Thailand (Repo Rate)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,50	1,25	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vietnam (Refinancing Rate)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Eropa																			
Kawasan Euro (Refinancing Rate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inggris (Bank Rate)	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Russia (Key Rate)	9,75	9,00	8,50	7,75	7,25	7,25	7,50	7,75	7,75	7,50	7,00	6,25	6,00	4,50	4,25	4,25	4,50	5,50	6,75
Turki (1 Week Repo)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	17,75	24,00	24,00	24,00	24,00	16,50	12,00	9,75	8,25	10,25	17,00	19,00	19,00	18,00
Afrika																			
Afrika Selatan (Refinancing Rate)	7,00	7,00	6,75	6,75	6,50	6,50	6,50	6,75	6,75	6,75	6,50	6,50	5,25	3,75	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Sumber: Bloomberg

Keterangan: *) Data sebelum penerapan BI 7D RR Rate (19 Agustus 2016) masih menggunakan BI Rate

n/a: Data tidak tersedia

Tabel 5. Pertumbuhan Uang Beredar

Akhir Periode (% yoy)

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat (M2)	6,4	5,7	5,3	4,8	4,0	4,1	3,7	3,7	4,0	4,7	5,6	6,6	10,2	22,9	23,8	24,8	24,4	12,4	12,9
Brazil (M3)	11,2	9,5	9,1	7,4	6,4	7,6	7,6	9,7	7,8	8,8	8,8	7,7	8,8	14,5	16,7	17,9	17,3	12,8	10,2
Chili (M3)	9,1	8,1	6,0	4,8	3,8	6,0	8,1	11,0	11,1	11,1	11,0	10,7	10,8	9,2	9,0	4,3	3,9	5,9	8,5
Meksiko (M3)	9,7	8,2	8,7	10,6	10,8	11,4	8,9	6,3	6,5	6,1	7,8	6,8	11,2	12,7	11,9	12,3	10,7	7,8	9,2
Asia Pasifik																			
Australia (M3)	6,9	7,7	6,8	4,7	3,5	1,8	2,1	2,6	4,2	3,9	2,2	2,5	4,5	8,5	12,3	12,9	9,8	7,9	7,8
Tiongkok (M2)	10,1	9,1	9,0	8,1	8,2	8,0	8,3	8,1	8,6	8,5	8,4	8,7	10,1	11,1	10,9	10,1	9,4	8,6	8,3
India (M3)	6,9	7,0	5,6	10,0	9,2	9,8	9,4	10,2	10,6	10,1	9,6	10,4	8,7	12,3	12,2	12,4	11,8	10,7	9,3
Jepang (M3)	3,5	3,3	3,4	3,1	2,6	2,7	2,5	2,1	2,1	2,0	2,0	2,3	2,7	5,9	7,5	7,6	8,0	5,2	3,7
Korea Selatan (M3)	7,3	6,7	5,9	6,1	6,7	6,7	7,2	7,6	7,6	8,0	8,4	8,2	8,3	8,6	7,9	8,4	9,3	9,4	10,6
ASEAN-6																			
Indonesia (M2)	10,0	10,3	10,9	8,3	7,5	5,9	6,7	6,3	6,5	6,8	7,1	6,5	12,1	8,2	12,4	12,5	7,1	11,6	8,2
Malaysia (M3)	4,7	4,5	5,3	4,9	6,1	7,4	7,5	9,1	6,0	5,1	3,9	3,5	3,7	5,6	6,4	4,0	6,1	3,4	4,7
Filipina (M3)	11,7	13,4	14,8	11,9	14,4	11,8	9,9	9,5	6,1	6,6	7,6	11,5	12,8	14,6	12,2	9,6	8,5	6,5	8,2
Singapura (M3)	7,2	7,0	5,3	3,2	2,8	2,7	3,4	3,9	4,8	5,4	4,9	5,1	6,9	10,7	10,6	12,8	10,4	5,9	3,9
Thailand (M2)	3,3	4,3	4,9	5,0	6,2	5,2	4,9	4,7	3,8	3,3	4,7	3,6	7,7	10,9	9,7	10,1	5,8	3,0	4,9
Eropa																			
Kawasan Euro (M3)	5,3	5,0	5,0	4,7	3,6	4,3	3,5	4,2	4,7	4,6	5,7	4,9	7,5	9,3	10,4	12,3	10,0	8,3	7,4
Inggris (M4)	6,9	5,4	4,8	3,8	2,2	1,7	0,8	2,1	2,2	2,3	3,9	3,8	8,3	13,1	12,4	13,5	10,8	7,0	7,0
Russia (M2)	11,1	10,5	9,5	10,5	9,9	11,4	11,8	11,0	8,9	7,3	9,1	9,7	13,4	14,9	16,1	13,5	11,3	9,5	8,2
Turki (M3)	16,3	17,9	18,7	15,5	17,0	20,3	30,0	18,6	24,1	21,3	15,1	29,5	28,9	39,0	-				
Afrika																			
Afrika Selatan (M3)	5,6	6,1	7,1	6,4	6,4	5,8	7,0	5,6	6,9	9,0	6,2	6,2	9,5	11,1	9,5	9,4	3,6	0,1	4,0

Sumber: Bloomberg

Tabel 6. Neraca Fiskal

(% PDB)

Negara	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amerika						
Amerika Serikat	-2,4	-3,1	-3,4	-3,8	-4,6	-14,9
Argentina	-5,4	-4,6	-6,1	-5,0	-3,8	-8,5
Brazil	-10,2	-9	-7,8	-7,1	-5,9	-13,4
Chili	-2,1	-2,7	-2,8	-2,7	-1,6	-7,1
Meksiko	-3,4	-2,5	-1,1	-2,1	-1,6	-4,6
Asia Pasifik						
Australia	-2,3	-2,4	-1,9	-0,5	0,0	-4,3
Tiongkok	-3,4	-3,8	-3,7	-4,2	-2,8	-3,7
India	-3,9	-3,5	-3,5	-3,4	-4,6	-9,4
Jepang	-4,5	-4,7	-3,9	-3,3	-3,1	-12,6
Korea Selatan	-2,3	-1,3	-1,0	-0,6	-2,6	-6,1
ASEAN-6						
Indonesia	-2,6	-2,5	-2,5	-1,8	-2,2	-6,5
Malaysia	-3,2	-3,1	-3,0	-3,7	-3,4	-3,2
Filipina	-0,9	-2,4	-2,2	-3,2	-3,4	-7,5
Singapura	-1,2	-1,2	0,3	0,4	-0,3	-13,9
Thailand	-2,5	-2,7	-2,7	-2,5	-1,8	-6,1
Vietnam	-4,3	-4,2	-3,5	-3,5	-4,4	-5,8
Eropa						
Kawasan Euro	-2,0	-1,5	-0,9	-0,5	-0,6	-7,2
Inggris	-4,1	-2,8	-2,6	-2,0	-2,5	-14,9
Russia	-2,4	-3,4	-1,5	2,9	1,8	-3,8
Turki	-1,0	-1,1	-1,5	-1,9	-2,9	-3,4
Afrika						
Afrika Selatan	-4,1	-3,8	-4,4	-4,7	-6,9	-10,0

Sumber: Tradingeconomics

Tabel 7. Neraca Berjalan

(% PDB)

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat	-2,0	-2,0	-1,9	-1,8	-1,9	-1,8	-1,9	-2,1	-2,2	-2,3	-2,3	-2,2	-2,1	-2,5	-2,6	-2,9	-3,1	-3,2	-
Argentina	-2,9	-3,2	-3,9	-4,5	-4,9	-5,2	-5,9	-4,8	-3,4	-1,1	0,1	1,0	1,0	1,3	1,7	0,6	0,7	0,6	-
Brazil	-1,2	-1,0	-1,0	-1,1	-1,5	-1,9	-2,4	-2,7	-2,7	-2,8	-3,2	-3,4	-3,8	-2,9	-1,8	-1,6	-1,7	-1,3	-
Chili	-2,6	-2,9	-2,3	-2,3	-1,9	-2,2	-3,0	-4,2	-4,2	-4,4	-4,4	-4,0	-3,7	-1,4	0,2	1,3	0,6	-1,2	-3,6
Meksiko	-2,5	-2,0	-1,9	-1,7	-1,6	-1,8	-1,9	-2,0	-2,1	-1,4	-0,9	-0,3	-0,1	-0,6	1,1	2,3	2,5	3,0	-
Asia Pasifik																			
Australia	-2,7	-2,2	-2,1	-2,6	-2,8	-2,8	-2,6	-2,1	-1,7	-0,8	0,2	0,7	1,2	1,8	2,0	2,7	3,2	3,3	-
Tiongkok	1,5	1,4	1,1	1,5	1,0	0,5	0,4	0,2	0,6	0,8	0,9	0,7	0,3	0,9	1,3	1,8	2,4	2,0	1,9
India	-0,7	-1,2	-1,4	-1,5	-1,8	-1,9	-2,3	-2,4	-2,1	-2,1	-1,6	-1,0	-0,8	0,4	1,3	1,3	0,9	0,4	-
Jepang	4,0	4,0	4,1	4,1	4,0	4,1	3,8	3,5	3,5	3,4	3,3	3,4	3,3	2,8	2,7	3,0	3,0	3,5	3,4
Korea Selatan	5,7	4,8	4,9	4,5	4,1	4,3	4,6	4,6	4,6	4,2	3,8	3,7	3,9	3,7	3,8	4,4	4,9	5,7	-
ASEAN-6																			
Indonesia	-1,5	-1,4	-1,3	-1,6	-1,9	-2,2	-2,7	-3,1	-3,0	-3,0	-2,9	-2,7	-2,4	-2,1	-1,3	-0,4	-0,2	-0,1	0,2
Malaysia	2,0	2,5	3,0	3,0	3,7	3,2	2,6	2,3	2,4	3,1	3,5	3,3	2,8	2,5	3,5	4,4	4,6	4,8	3,8
Filipina	-0,3	-0,4	-0,1	-0,8	-0,6	-1,6	-2,7	-2,3	-2,6	-1,5	-1,0	-0,1	0,4	1,5	2,6	3,5	3,4	1,9	-
Singapura	18,9	18,0	17,0	16,4	15,9	16,2	16,8	17,2	16,8	16,1	14,8	14,3	14,8	15,6	16,8	17,6	18,5	19,0	19,5
Thailand	9,9	9,4	9,7	9,6	9,3	8,6	6,5	5,6	5,0	5,0	6,1	7,0	6,9	6,6	6,2	4,0	1,3	0,1	-
Vietnam	n/a	n/a	n/a	-0,6	n/a	n/a	n/a	1,9	n/a	n/a	n/a	4,0	n/a	n/a	n/a	0,7	n/a	n/a	n/a
Eropa																			
Kawasan Euro	3,2	2,7	2,9	3,2	3,2	3,6	3,3	2,9	2,9	2,5	2,6	2,3	1,7	1,7	1,6	2,0	2,6	2,9	-
Inggris	-4,7	-4,5	-3,9	-3,6	-3,8	-3,6	-3,6	-3,9	-4,4	-4,1	-3,8	-2,7	-1,9	-1,5	-1,3	-2,6	-2,3	-2,3	-
Russia	2,2	2,1	1,9	2,1	2,5	3,7	5,8	7,3	7,3	6,6	5,5	3,8	3,3	3,2	2,8	2,6	2,4	3,3	-
Turki	-3,2	-3,4	-3,9	-4,8	-5,5	-5,9	-4,9	-2,8	-0,9	1,0	1,5	0,7	-0,2	-1,8	-4,0	-4,9	-4,7	-3,7	-
Afrika																			
Afrika Selatan	-2,2	-2,3	-2,1	-2,4	-2,8	-2,9	-3,1	-3	-2,8	-2,8	-2,8	-2,6	-1,6	-1,5	0,65	1,83	2,6	4,55	-

Sumber: Bloomberg, Bank Indonesia-SEKI

Ket: n/a: data tidak tersedia

Tabel 8. Cadangan Devisa

Akhir Periode (Miliar USD)

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat	40,1	41,5	42,4	42,8	44,5	42,4	41,8	41,9	41,5	42,4	41,5	41,6	41,5	42,0	43,1	44,7	42,8	42,8	42,3
Argentina	45,8	42,6	44,7	50,1	56,7	55,1	42,4	59,2	60,1	58,6	42,4	39,2	38,0	37,5	35,6	33,9	34,6	37,6	36,0
Brazil	370,1	377,2	381,2	374,0	379,6	379,5	380,7	374,7	384,2	388,1	376,4	356,9	343,2	348,8	356,6	355,6	347,4	352,5	368,9
Chili	39,0	38,9	37,7	39,0	38,1	37,0	37,1	39,9	38,8	39,5	38,9	40,6	37,9	36,4	37,8	39,2	40,2	45,0	53,3
Meksiko	174,9	174,2	173,0	172,8	173,2	173,2	173,6	174,6	176,6	178,9	180,2	180,7	185,5	188,9	193,9	195,5	194,9	192,9	198,2
Asia Pasifik																			
Australia	50,5	53,1	47,7	57,8	50,6	47,6	44,4	45,4	45,6	45,3	36,8	49,7	46,9	32,0	32,5	32,1	36,8	37,3	38,2
Tiongkok	3.009,1	3.056,8	3.108,5	3.139,9	3.142,8	3.112,1	3.087,0	3.072,7	3.098,8	3.119,2	3.092,4	3.107,9	3.060,6	3.112,3	3.142,6	3.216,5	3.170,0	3.214,0	3.200,6
India	346,3	362,4	375,2	385,1	399,1	380,7	376,2	368,1	384,1	399,9	401,6	424,9	439,7	467,6	499,9	537,5	538,0	566,2	576,7
Jepang	1.168,9	1.188,1	1.203,2	1.202,1	1.205,1	1.197,5	1.200,2	1.209,0	1.229,4	1.255,9	1.255,0	1.255,3	1.296,2	1.305,9	1.308,8	1.312,2	1.287,8	1.293,6	1.284,9
Korea Selatan	375,3	380,6	384,7	389,3	396,8	400,3	403,0	403,7	405,3	403,1	403,3	408,8	400,2	410,8	420,6	443,1	446,1	454,1	464,0
ASEAN-6																			
Indonesia	116,1	117,3	123,4	124,1	119,8	114,0	109,2	114,8	118,6	117,6	118,0	122,7	114,3	124,6	127,7	128,4	130,1	129,9	133,5
Malaysia	92,0	95,5	97,7	98,9	104,2	101,1	99,5	97,8	99,4	98,8	98,9	99,5	97,5	98,8	100,2	102,6	103,9	106,3	105,5
Filipina	80,9	81,3	81,0	81,6	80,5	77,5	74,9	79,2	83,6	84,9	85,6	87,8	104,5	93,5	100,4	110,1	104,5	105,8	106,6
Singapura	259,6	266,3	275,4	279,9	287,1	288,0	291,3	287,7	295,8	273,9	272,2	279,5	279,1	312,5	328,0	362,3	379,8	398,4	416,8
Thailand	172,7	177,3	190,9	194,0	206,9	198,4	196,4	197,0	203,6	206,6	211,1	214,6	216,5	230,3	239,2	246,0	234,4	230,0	223,9
Vietnam	37,8	39,2	41,4	49,1	56,3	57,8	57,0	55,5	62,4	64,3	69,2	78,3	81,7	83,7	88,7	94,8	98,3	100,2	-
Eropa																			
Kawasan Euro	261,8	261,2	263,7	269,1	284,8	284,3	283,7	289,9	291,6	296,5	296,3	296,2	303,9	306,3	312,9	317,8	311,0	319,7	316,3
Inggris	112,5	117,2	118,0	120,4	126,6	124,6	122,8	140,2	130,4	125,6	123,0	137,5	133,7	134,9	129,4	139,6	133,3	129,5	127,9
Russia	330,3	343,5	351,2	355,5	377,5	378,6	383,4	379,2	391,0	405,4	419,6	436,1	450,6	438,6	449,8	449,0	456,0	465,7	485,5
Turki	88,6	90,2	91,5	84,1	84,7	75,6	67,0	72,0	75,4	73,5	75,7	81,2	64,1	51,4	42,4	51,6	50,9	59,2	82,8
Afrika																			
Afrika Selatan	38,9	39,6	41,4	42,7	41,8	42,7	42,8	43,6	41,6	41,1	45,9	45,9	43,0	42,2	43,8	44,3	43,1	44,3	42,9

Sumber: Bloomberg

Keterangan: Tidak termasuk emas

Tanda (-): Data belum rilis

Tabel 9. Nilai Tukar Dunia terhadap USD

Rata-Rata Periode

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Argentina (Peso)	15,68	15,74	17,29	17,46	19,23	23,59	32,00	36,78	37,89	43,38	46,90	58,44	60,54	66,06	71,90	78,03	86,53	93,01	96,52
Brazil (Real)	3,14	3,22	3,16	3,23	3,26	3,61	3,95	3,78	3,78	3,92	3,90	4,13	4,22	5,32	5,33	5,47	5,35	5,45	5,16
Chili (Peso)	655,55	664,35	642,30	632,74	609,65	621,94	663,09	678,39	671,78	677,71	698,53	743,76	780,56	834,82	787,48	772,56	724,18	714,71	759,37
Meksiko (Peso)	20,30	18,55	17,82	18,87	18,85	19,42	18,94	19,72	19,48	19,10	19,36	19,38	18,93	23,48	22,29	20,95	20,16	20,18	20,03
Asia Pasifik																			
Australia (Dollar)	1,32	1,33	1,27	1,30	1,28	1,32	1,37	1,39	1,40	1,42	1,45	1,47	1,47	1,57	1,41	1,39	1,30	1,30	1,35
Selandia Baru (Dollar)	1,41	1,42	1,37	1,44	1,39	1,42	1,50	1,50	1,47	1,49	1,53	1,57	1,53	1,65	1,52	1,48	1,39	1,40	1,43
Hong Kong (Dollar)	7,76	7,79	7,81	7,81	7,82	7,85	7,85	7,83	7,84	7,85	7,83	7,83	7,78	7,75	7,75	7,75	7,75	7,77	7,77
Tiongkok (Yuan)	6,89	6,86	6,67	6,62	6,42	6,38	6,81	6,94	6,81	6,77	6,96	7,07	6,97	7,08	6,98	6,68	6,49	6,48	6,47
India (Rupee)	67,00	64,46	64,30	64,95	64,32	67,06	70,07	72,77	70,88	69,55	69,83	71,28	71,45	75,64	74,92	73,79	73,13	73,51	74,10
Jepang (Yen)	113,62	111,13	110,97	112,86	109,45	109,17	111,49	113,08	110,51	110,86	107,44	108,32	109,30	107,72	106,60	104,90	104,57	109,15	110,11
Korea Selatan (Won)	1.153	1.13	1.133	1.117	1.075	1.08	1.122	1.13	1.122	1.154	1.189	1.182	1.178	1.226	1.195	1.137	1.104	1.123	1.147
ASEAN-6																			
Indonesia (Rupiah)	13.346	13.309	13.333	13.528	13.573	13.956	14.603	14.931	14.224	14.253	14.156	14.091	13.845	15.301	14.475	14.514	14.077	14.419	14.399
Malaysia (Ringgit)	4,45	4,33	4,26	4,20	3,96	3,95	4,09	4,17	4,12	4,12	4,16	4,17	4,13	4,34	4,23	4,13	4,05	4,13	4,19
Filipina (Peso)	50,00	49,86	50,86	51,15	51,23	52,47	53,55	53,37	52,47	52,25	51,69	51,36	50,77	50,71	49,30	48,37	48,17	48,25	49,68
Singapura (Dollar)	1,42	1,39	1,36	1,36	1,33	1,33	1,37	1,38	1,36	1,36	1,37	1,37	1,37	1,42	1,38	1,36	1,33	1,33	1,35
Thailand (Bath)	35,11	34,30	33,37	33,06	31,82	31,93	32,97	32,87	31,95	31,79	30,87	30,38	30,72	32,29	31,25	30,92	30,06	31,19	32,52
Vietnam (Dong)	22.712	22.712	22.73	22.72	22.728	22.8	23.23	23.331	23.231	23.262	23.251	23.201	23.204	23.388	23.18	23.167	23.063	23.057	22.934
Eropa																			
Kawasan Euro (USD/Euro)	1,07	1,10	1,18	1,18	1,22	1,19	1,16	1,14	1,14	1,12	1,12	1,10	1,11	1,10	1,16	1,18	1,21	1,20	1,18
Inggris (USD/GBP)	1,24	1,28	1,31	1,32	1,38	1,36	1,30	1,30	1,29	1,30	1,24	1,27	1,30	1,23	1,28	1,31	1,37	1,40	1,38
Russia (Rubel)	58,70	57,24	58,95	58,37	57,27	62,02	65,59	66,19	66,73	64,86	64,46	64,25	63,19	74,30	72,06	76,74	74,26	74,74	73,41
Turki (Lira)	3,69	3,58	3,51	3,79	3,82	4,37	5,66	5,59	5,32	5,77	5,70	5,75	5,97	6,75	7,04	7,86	7,38	8,17	8,54
Afrika																			
Afrika Selatan (Rand)	13,23	13,20	13,18	13,88	12,21	12,65	14,07	14,31	13,99	14,33	14,62	14,84	14,66	17,93	17,01	16,10	14,92	14,34	14,48

Sumber: Bloomberg, diolah

Tabel 10. Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Dunia

Rata-Rata Periode

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat (Dollar)	13.346	13.309	13.333	13.528	13.573	13.956	14.603	14.931	14.224	14.253	14.156	14.091	13.845	15.301	14.475	14.514	14.077	14.419	14.399
Argentina (Peso)	851	846	771	775	706	592	456	406	375	329	302	241	229	232	201	186	163	155	149
Brazil (Real)	4.245	4.136	4.215	4.192	4.169	3.867	3.699	3.953	3.763	3.637	3.628	3.416	3.28	2.876	2.716	2.654	2.63	2.644	2.791
Chili (Peso)	20,4	20,0	20,8	21,4	22,3	22,4	22,0	22,0	21,2	21,0	20,3	18,9	17,7	18,3	18,4	18,8	19,4	20,2	19,0
Meksiko (Peso)	657,5	717,5	748,2	717,0	720,2	718,8	770,9	757,2	730,2	746,1	731,2	727,0	731,3	651,6	649,4	692,6	698,4	714,7	719,0
Asia Pasifik																			
Australia (Dollar)	10.115	9.992	10.526	10.419	10.599	10.556	10.68	10.71	10.167	10.037	9.752	9.602	9.401	9.727	10.238	10.477	10.833	11.132	10.687
Selandia Baru (Dollar)	9.491	9.381	9.738	9.418	9.769	9.821	9.764	9.927	9.678	9.541	9.282	8.974	9.026	9.263	9.51	9.797	10.12	10.324	10.094
Hong Kong (Dollar)	1.72	1.709	1.706	1.733	1.735	1.778	1.861	1.906	1.815	1.816	1.809	1.799	1.779	1.973	1.868	1.872	1.816	1.857	1.852
Tiongkok (Yuan)	1.938	1.94	1.999	2.043	2.115	2.186	2.146	2.152	2.09	2.106	2.035	1.994	1.986	2.162	2.073	2.173	2.169	2.225	2.226
India (Rupee)	199,2	206,5	207,4	208,3	211,0	208,1	208,4	205,2	200,7	204,9	202,7	197,7	193,8	202,3	193,2	196,7	192,5	196,1	194,3
Jepang (Yen)	117,5	119,8	120,1	119,9	124,0	127,8	131,0	132,0	128,7	128,6	131,8	130,1	126,7	142,0	135,8	138,4	134,6	132,1	130,8
Korea Selatan (Won)	11,6	11,8	11,8	12,1	12,6	12,9	13,0	13,2	12,7	12,3	11,9	11,9	11,7	12,5	12,1	12,8	12,8	12,8	12,6
ASEAN-6																			
Malaysia (Ringgit)	3.002	3.074	3.127	3.222	3.427	3.534	3.57	3.58	3.451	3.458	3.405	3.375	3.352	3.528	3.42	3.514	3.479	3.495	3.439
Filipina (Peso)	266,9	266,9	262,1	264,5	264,9	266,0	272,7	279,8	271,1	272,8	273,9	274,4	272,7	301,7	293,6	300,1	292,2	298,8	289,8
Singapura (Dollar)	9.426	9.56	9.799	9.967	10.243	10.455	10.678	10.838	10.457	10.473	10.329	10.29	10.132	10.771	10.483	10.708	10.594	10.804	10.668
Thailand (Bath)	380,1	388,0	399,5	409,2	426,5	437,1	442,9	454,2	445,3	448,3	458,6	463,9	450,7	473,9	463,2	469,4	468,3	462,3	442,8
Vietnam (Dong)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Eropa																			
Kawasan Euro (Euro)	14.219	14.658	15.671	15.898	16.534	16.63	16.982	17.054	16.19	16.013	15.852	15.56	15.306	16.755	16.741	17.157	17.085	17.331	17.059
Inggris (GBP)	16.54	17.036	17.448	17.886	18.722	18.98	19.029	19.342	18.294	18.531	17.563	17.87	18.05	18.873	18.575	18.958	19.274	20.114	19.935
Russia (Rubel)	227,4	232,5	226,2	231,7	237,0	225,0	222,6	225,6	213,2	219,8	219,6	219,3	219,1	205,9	200,9	189,1	189,6	192,9	196,1
Turki (Lira)	3.612	3.721	3.795	3.57	3.553	3.191	2.581	2.673	2.675	2.471	2.482	2.451	2.318	2.265	2.056	1.847	1.907	1.764	1.686
Afrika																			
Afrika Selatan (Rand)	1.009	1.008	1.011	975	1.112	1.103	1.038	1.043	1.017	995	968	950	944	853	851	901	943	1.005	994

Sumber: Bloomberg, diolah

Tabel 11. Indeks Harga Saham

Akhir Periode (% yoy)

Negara	2017				2018				2019				2020				2021		
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3
Amerika																			
Amerika Serikat (DJIA)	20.406	20.994	21.891	23.312	24.993	24.556	25.594	25.442	24.829	26.096	26.676	27.23	28.493	23.437	26.891	28.361	30.808	33.645	34.815
Amerika Serikat (S&P 500)	2.326	2.398	2.467	2.576	2.717	2.703	2.85	2.756	2.685	2.882	2.958	3.037	3.241	2.783	3.255	3.454	3.797	4.09	4.369
Argentina (MERV)	19.224	21.352	22.852	27.179	31.559	30.03	28.593	30.074	33.772	34.419	33.935	32.948	39.235	32.676	45.613	47.645	50.665	51.023	66.955
Brazil (BVSP)	64.933	63.858	69.113	74.744	81.234	80.003	77.309	85.7	93.792	96.054	102.522	106.054	114.299	80.316	99.725	101.223	117.644	119.252	124.489
Chili (IGPA)	21.963	24.269	25.435	26.942	28.008	28.056	26.855	26.303	26.742	25.864	24.928	24.357	23.404	18.546	20.172	19.139	22.295	23.529	21.55
Meksiko (BOLSA)	47.283	49.247	50.838	48.958	48.628	46.828	49.139	45.144	42.691	43.783	41.709	43.318	44.199	36.156	37.726	38.695	44.602	48.532	50.885
Asia Pasifik																			
Australia (All Ord.)	5.785	5.841	5.777	5.975	6.087	6.114	6.342	5.954	5.997	6.483	6.735	6.803	6.998	5.49	6.148	6.37	7.003	7.214	7.673
Tiongkok (Shanghai)	3.2	3.149	3.291	3.386	3.327	3.084	2.766	2.618	2.737	3.01	2.923	2.938	2.982	2.845	3.232	3.316	3.509	3.47	3.525
India (BSE)	28.308	30.456	31.846	32.918	34.051	34.88	37.269	34.899	36.395	38.971	37.827	39.627	41.001	31.54	36.789	40.804	48.829	49.716	53.723
Jepang (Nikkei 225)	19.245	19.52	19.873	21.903	22.443	22.348	22.625	22.338	21.013	21.418	21.265	22.725	23.469	19.633	22.686	24.237	28.225	29.092	28.243
Korea Selatan (KOSPI)	2.095	2.279	2.385	2.511	2.472	2.439	2.291	2.118	2.133	2.137	2.024	2.097	2.17	1.872	2.237	2.434	2.996	3.13	3.231
ASEAN-6																			
Indonesia (JSX)	5.383	5.693	5.843	5.99	6.387	6.017	5.908	5.871	6.371	6.275	6.305	6.143	6.09	4.664	5.084	5.241	6.181	6.043	6.07
Malaysia (KLSE)	1.702	1.766	1.769	1.74	1.82	1.806	1.772	1.719	1.682	1.636	1.625	1.583	1.563	1.385	1.557	1.532	1.61	1.599	1.538
Filipina (PCOM)	7.259	7.782	8.014	8.359	8.523	7.627	7.532	7.121	7.814	7.882	7.994	7.879	7.551	5.651	6.109	6.341	7.06	6.487	6.742
Singapura (STI)	3.082	3.211	3.266	3.365	3.477	3.468	3.234	3.084	3.173	3.269	3.222	3.184	3.2	2.575	2.606	2.594	2.914	3.155	3.137
Thailand (SET)	1.569	1.569	1.603	1.704	1.788	1.734	1.692	1.667	1.622	1.661	1.674	1.613	1.539	1.233	1.347	1.294	1.495	1.571	1.578
Vietnam (Ho Chi Min)	704	737	783	859	1.057	1.05	962	940	946	967	981	997	949	788	856	940	1.12	1.24	1.339
Eropa																			
Kawasan Euro (DJ Stoxx 50)	3.342	3.552	3.48	3.606	3.495	3.481	3.423	3.216	3.177	3.415	3.459	3.619	3.731	2.864	3.29	3.29	3.606	3.953	4.122
Inggris (FTSE 100)	7.274	7.391	7.38	7.471	7.385	7.549	7.553	7.09	7.003	7.355	7.363	7.282	7.417	5.813	6.142	6.036	6.609	6.905	7.097
Russia (RTS, \$ terms)	1.141	1.068	1.06	1.138	1.23	1.155	1.12	1.135	1.166	1.283	1.336	1.402	1.527	1.104	1.259	1.201	1.427	1.513	1.649
Turki (XU100)	863	954	1.065	1.069	1.15	1.03	945	945	978	925	999	1.018	1.157	976	1.128	1.193	1.491	1.436	1.415
Afrika																			
Afrika Selatan (JSE AS)	52.169	52.941	55.057	58.898	58.661	57.175	57.191	52.672	53.987	57.533	56.142	55.903	56.689	47.968	55.488	55.519	63.264	67.217	67.279

Sumber: Bloomberg, diolah

Tabel 12. Utang Pemerintah

(% PDB)

Negara	2015	2016	2017F	2018	2019	2020F
Amerika						
Amerika Serikat	100,1	105,2	104,6	105,4	106,8	128,1
Argentina	52,6	53,1	57,0	86,4	90,2	102,0
Brazil	65,5	69,8	73,7	75,3	74,3	88,8
Chili	17,3	21,0	23,6	25,6	27,9	33,0
Meksiko	43,9	48,2	46,0	46,0	45,1	52,1
Asia Pasifik						
Australia	15,1	18,3	18,3	18,5	19,2	24,8
Tiongkok	41,5	48,2	51,7	53,8	57,1	66,8
India	68,5	68,8	69,8	70,8	73,7	74,0
Jepang	231,3	236,4	234,5	236,6	238,0	266,2
Korea Selatan	39,5	39,9	36,3	36,6	36,4	42,6
ASEAN-6						
Indonesia	27,0	30,0	29,4	30,0	30,5	38,5
Malaysia	53,6	51,9	50,0	51,2	52,5	60,7
Filipina	44,7	42,1	42,1	41,8	39,6	53,5
Singapura	103,2	111,5	110,6	112,2	126,3	131,0
Thailand	44,4	40,8	41,2	41,8	41,1	50,5
Vietnam	46,1	47,6	46,3	43,6	43,5	46,7
Eropa						
Kawasan Euro	90,9	90,1	87,7	85,7	83,9	98,0
Inggris	79,1	81,5	80,6	78,4	82,6	94,9
Russia	13,6	12,9	13,5	14,5	14,6	17,8
Turki	27,4	28,0	28,0	30,2	32,6	39,5
Afrika						
Afrika Selatan	49,3	51,6	53,1	56,6	63,3	80,3

Sumber: Tradingeconomics

Tabel 13. Harga Komoditas di Pasar Dunia

	Akhir Periode												Rata-Rata											
	2019				2020				2021				2019				2020				2021			
	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
Energi																								
Minyak WTI (USD/barrel)	60,1	58,5	54,1	61,1	20,5	39,3	40,2	48,5	59,2	73,5	75,0	51,8	60,9	56,0	55,4	56,0	25,2	40,7	40,3	53,5	63,5	70,5		
Batubara (USD/ton)	83,5	61,1	63,6	60,3	53,6	55,0	59,5	54,4	60,9	63,5	71,1	80,5	77,6	61,8	64,9	59,6	55,4	54,2	56,6	55,1	59,9	62,3		
Gas Alam (USD/juta BTU)	2,7	2,4	2,4	2,1	1,7	1,7	1,6	2,4	2,5	3,7	5,6	3,3	2,7	2,4	2,5	2,1	1,8	1,9	2,3	3,4	2,7	3,8		
Logam																								
Emas (USD/ounce)	1.292	1.41	1.472	1.517	1.577	1.781	1.886	1.898	1.708	1.77	1.757	1.288	1.29	1.45	1.483	1.545	1.669	1.86	1.89	1.839	1.787	1.803		
Timah (USD/mt)	21.4	18.825	15.925	17.175	14.602	16.722	17.494	20.325	25.388	31.255	33.921	20.304	20.351	17.601	16.5	16.888	15.156	17.359	18.257	22.18	27.44	32.877		
Tembaga (USD/mt)	6.483	5.993	5.725	6.174	4.951	6.015	6.672	7.766	8.786	9.375	8.937	6.114	6.29	5.846	5.83	5.955	5.188	6.263	6.893	8.157	9.515	9.469		
Aluminium (USD/mt)	1.912	1.8	1.722	1.81	1.526	1.62	1.765	1.98	2.212	2.524	2.859	1.892	1.854	1.789	1.75	1.763	1.544	1.691	1.865	2.047	2.341	2.532		
Nikel (USD/mt)	12.984	12.69	17.05	14.025	11.484	12.805	14.517	16.613	16.068	18.214	17.936	11.784	12.645	14.764	16.116	13.418	12.029	13.721	15.382	17.893	16.864	18.726		
Pangan																								
Jagung (USD/bushel)	3,3	4,2	3,7	3,8	3,3	3,2	3,6	4,7	5,5	7,0	5,0	3,5	3,5	3,9	3,7	3,7	3,2	3,1	3,8	4,9	6,1	6,3		
Gandum (USD/bushel)	3,8	4,2	3,5	4,3	4,4	4,0	4,7	5,6	5,3	6,2	6,7	4,4	3,8	3,7	3,6	4,1	4,1	4,0	4,9	5,7	5,9	6,0		
Gula (cents/pon)	12,7	13,3	12,8	13,5	10,6	12,1	13,3	14,8	14,8	17,9	20,0	12,8	12,6	12,5	12,7	14,1	11,0	12,5	13,6	15,2	16,4	18,3		
Kedelai (USD/bushel)	8,3	8,6	8,6	9,3	8,7	8,7	9,9	13,1	14,3	14,4	12,2	8,5	8,2	8,4	8,8	8,9	8,4	8,8	10,5	13,2	14,9	14,0		
Beras (USD/mt)	384,5	385,5	401,5	395,3	476,0	518,5	474,8	519,8	517,0	444,5	393,0	384,7	386,6	396,3	404,3	415,1	512,1	493,3	473,3	518,0	511,4	423,1		
CPO (USD/mt)	457,9	452,6	479,8	739,6	554,4	559,7	703,0	935,2	991,2	944,2	1.114,3	483,1	474,3	481,5	556,2	684,8	524,5	622,7	766,6	939,7	1.040,4	1.002,9		

Tim Penyusun PEKKI Edisi 2021

Penanggung Jawab

Doddy Zulverdi, Ricky Perdana Gozali

Editor

Diah Indira

Tim Produksi

Diah Indira, Fenty Tirtasari Ekarina, Michael Christian, Gabriel Fedrichson, Dita Normalaksana Putri, dan Azmi Utama Nawawi

Kontributor Tulisan, Tabel, dan Grafik

Perkembangan Ekonomi Global

Diah Indira (*Perkembangan Ekonomi Global*) dan Michael Christian (*Pasar Keuangan*)

Perkembangan Ekonomi Beberapa Negara dan Kawasan

Gabriel Fedrichson (*Amerika Serikat*); Fenty Tirtasari Ekarina (*Kawasan Euro*); Dita Normalaksana Putri (*Jepang dan India*); Michael Christian (*Tiongkok*); Azmi Utama Nawawi (*Malaysia*); Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia New York, London, Tokyo, Singapura, dan Beijing.

Perkembangan Kerja Sama Internasional dan Lembaga Internasional

Argo Hadiano, Hayyu Vitria Sari, Dadan Gandara, Masagung Suksmonohadi, Aldy Pradana, Betty Purbowati Cahyadewi, Anita Lubis, dan R. Utama Jaya Wardhana

Lampiran

Azmi Utama Nawawi

